



RAKYAT MENGGUGAT

Judul terinspirasi INDONESIA MENGGUGAT
Karya Bung Karno Presiden RI

huda hadi

INDONESIA NEGARA BESAR;

Kaya Sumber Daya Manusia, Terdiri Dari
Berbagai Suku, Agama, Ras, Bahasa,
Adat Istiadat, Dan Berbagai Seni
Serta Kreatifitas Yang Lain.

Kaya Sumber Daya Alam Yang Membentang
Dari Sabang Sampai Merauke.
Hampir Semua Yang Ada Didunia,
Indonesia Memilikinya.

Lautan; Ikan, Terumbu Karang, Mutiara, Dan
Berbagai Ekosistem Biota Kehidupan Laut.
Daratan, Hutan, Pegunungan, Tambang,
Sawah, Ladang Dan Perkebunan.

Karena Itu, Jangan Sampai Kekayaan Itu
Dijarah, Dirampok, Dirusak, dikuasai,
Dan Dinikmati Hanya Oleh Segelintir Orang.
#saveindonesia

RAKYAT MENGGUGAT

© ® huda hadi

Atur Huruf Reka Bentuk dan Lay Out
Tim MMC
Desain Sampul
Nam Siong

Buku ini terbit (di play store) dan bisa dibaca secara gratis oleh semua orang termasuk anda, berkat jasa baik Sahabat Ichwanul Muslimin al-Kalibatani, atas nama Mulya Management Centre
@ *Mulya Media Publishing*
Buku ini belum terbit dalam bentuk percetakan dan penerbitan.

Sekiranya anda berkenan untuk mendonasikan sebagian rizki, dengan senang hati kami ucapkan terima kasih. Itu semua untuk pengembangan MMC dan Pelaksanaan Training Kepribadian dan Kepemimpinan sebagaimana terdapat dalam isi buku.
Kami (saya) juga siap kerjasama untuk mengadakan bedah buku.

Donasi bisa di transfer ke:
BRI Syariah
No. Rekening : 1025250679
Atas nama Huda Hadi.

Segala Informasi/Komunikasi Via:
WhatsApp : 085234369969
Email : mashuda369@gmail.com
huda_hadi@yahoo.com

Terima Kasih.

RAKYAT MENGGUGAT

Apa Yang Diberikan Negara Kepada Rakyat Biasa?

Daftar Isi

Babak Pertama.....12

Preamble12

1. Pengantar Penulis 112
2. Pengantar Penulis 2...13
3. Dibutuhkan Komunitas Relawan KPK3 Untuk
Tiap-Tiap Daerah Tingkat Dua.....15
4. Wawasan 2045, Berdikari, Maju
Dan Modern.....18
5. Beberapa Presiden Indonesia Dalam
Kaca Mata Saya.....23

Babak ke-Dua.....34

Beberapa Pertanyaan.....34

1. Apa Kabar Century?.....34
2. Kepada Siapa?.....35
3. Kepada Siapa ? 237
4. Negara Ini Mau Dibawa Kemana?.....38
5. Negara Ini Mau Dibawa Kemana? 2.....42
6. Negara Berbisnis Dengan Rakyat?.....43
7. Mengapa Harus Ada Gaji Ke-13?44
8. Pemilih Jokowi Tertipu?46
9. Apa Yang Diberikan Negara Kepada
Rakyat Biasa?47
10. Pra Peradilan Itu Apa?50
11. Kelangkaan Plat Nomor (STNKB)?52

12. Untuk Menteri Anis Baswedan,
Unas Sistem Online?54

Babak Ke-Tiga56

Tentang Ke Jokowi-an56

1. Menilai Kelas Kepemimpinan Jokowi56
2. Pilih Jokowi Tertipu?61
3. Jokowi Jangan Kecewakan Dan
Khianati Kami....62
4. Jokowi Jangan Umbar Janji Dan
Banyak Alasan.....64
5. Jokowi Jangan Melakukan Blunder.....66
6. Pemerintahan Jokowi Dalam
Bayang-Bayang Balas Dendam.....67
7. Revolusi Mental Ala Pak Jokowi versus
Revolusi Mental Program Saya70
8. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu Pak
Sby, Kabinet Kerja Pak Jokowi,
Dan Susunan Kabinet Ala Saya72
9. Daftar 34 nama menteri Kabinet
Kerja Jokowi JK 2014-2019....73
10. Berikut 34 nama menteri Kabinet Indonesia
Bersatu SBY 2009-2014.....74
11. Inilah susunan 15 Kabinet
kementerian yang saya angkat.....77

Babak ke-Empat.....79

Tentang ke-Pemilu-an.....79

1. Pilkada Serentak yang tidak serentak...79
2. Laksanakan Pemilu Serentak Untuk; DPD,
DPRD II, DPRD I Dan DPR Pusat, Serta
Pilbup. Pilwakot, Pilgub Dan Pilpres.....80
3. Jadikan Pemilu Sebagai Pesta

- Demokrasi.....81
- 4. Pilkada Jangan Satu Paket.....82
- 5. Tinjau Ulang Dan Bubarkan Keberadaan KPUD I Dan II.....83
- 6. Mudahkan Sistem / Persaratan Penjaringan Kandidat Calon.....85

Babak Ke-Lima.....87

Berbau Larangan.....87

- 1. Jangan Main-Main Dengan Harga BBM..87
- 2. Jangan Ada Naturalisasi Untuk Pemain Bola88
- 3. Jangan Demonstrasi Yang Mengganggu Kepentingan Umum Apalagi Sampai Anarkhis.....90
- 4. Stop Menebus TKW Dengan Berpuluh Milyar Rupiah.....92

Babak Ke-Enam.....96

Saran, Anjuram, Usulan.....96

- 1. Tinjau Ulang Sertifikasi96
- 2. Tinjau Ulang Dan Bubarkan Keberadaan KPUD I Dan II.....98
- 3. Laksanakan Pemilu Serentak Untuk; DPD, DPRD II, DPRD I Dan DPR Pusat, Serta Pilbup. Pilwakot, Pilgub Dan Pilpres.....99
- 4. Cabut/Batalkan Wacana Larangan Impor Pakaian Bekas.....101
- 5. Bentuk Komisi Pemberantasan Kemiskinan, Kebodohan Dan Keterbelakangan (KPK3).....103
- 6. Pencarian Dan Pemberian Fasilitas Bibit

- Unggul (Anak Berprestasi) Sejak Dini...107
7. Beri Kesempatan Mereka Yang Berbakat Dan Berpotensi.....108
 8. Pindahkan Ibu Kota Dari Jakarta Ke Papua.....110
 9. Sederhanakan Sebutan Mata Uang Rupiah.....114
 10. Sejahterakan Rakyat Dan Jangan Dipersulit.....117
 11. Hapus UN, UAN, UNAS Serta Ujian Nasional Yang Lain.....120
 12. Galakkan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi....122
 13. Dirikan Sekolah Unggulan Disetiap Daerah Tingkat Dua Dirikan Universitas Unggulan Disetiap Provinsi.....124
 14. Kembalikan Nama Sekolah Kejuruan Kenama Semula.....126
 15. Lindungi Rakyat Dari Kecurangan Pedagang Dan Produsen... 127
 16. Minimalkan Kunjungan Keluar Negeri Anggota DPR.....130
 17. Hentikan/Hapuskan 'KARTU SAKTI' (KIS/Kartu Indonesia Sehat, KIP/Kartu Indonesia Pintar, KKS/Kartu keluarga Sejahtera, Dan Macam-Macam Kartu Yang Sifatnya Sering Merepotkan dan Membingungkan).....132
 18. Gratiskan Biaya Pengobatan, Perawatan Di Puskesmas Atau Rumah Sakit Kelas 3 (Milik Pemerintah).....134
 19. Ganti Dan Pecat Pegawai Negeri (PNS, TNI, POLRI), Wakil Rakyat Yang Tidak

Produktif, Tidak Disiplin, Tidak Punya Integritas Dan Tidak Melayan Rakyat...	136
20. Jadikan Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Bisnis Dan Bahasa Pergaulan.....	138
21. Perkuat KPK Dengan Memperbanyak Penyidik Dan Perangkatnya	140
22. Batasi Tayangan Sinetron Yang Tidak Bermutu.....	141
23. Beri Slot 1 Jam – 1.5 Jam Perminggu Untuk Tayangan Edukatif.....	143
24. Batasi Tayangan Infotainment Yang Mengangkat Artis Sensasional Dan Tidak Mendidik.....	143

Babak ke-Tujuh.....146

Membangun Negara.....146

1. Maksimalkan potensi anak negeri.....146
2. Undang pakar dan tenaga kasar dari luar negeri untuk terlibat dalam membangun negara.....147
3. Tidak perlu mengundang investor dari luar negeri.....148
4. Manfaatkan kekayaan sumber dan hasil kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat Indonesia seluruhnya.....149
5. Buka dan kembangkan pulau-pulau tidak berpenghuni dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada...149

Babak ke-Delapan.....151

Untuk Para Menteri.....151

1. Untuk Menteri Jonan I151
2. Untuk Menteri Jonan II, Lion Air Si Raja

- Delay.....154
3. Untuk Menteri Susi Pudjiastuti155
 4. Untuk Menteri Khofifah.....157
 5. Untuk Menteri Anis Baswedan,
Unas Sistem Online? ...158
 6. Untuk Menteri M Nasir,
(MenRistek dan Pendidikan Tinggi).....158

Babak ke-Sembilan.....160

Sentilan.....160

1. Kebijakan Publik Pemerintah Sering
Menyengsarakan Rakyat....160
2. 100 Hari Yang Bergejolak.....161
3. Blusukan Bukan Tugas Dan Kerja Seorang
Presiden.....163
4. PLN Ku Yang Menyedihkan.....165
5. Negara Ini Dimiliki (Dinikmati) Oleh Para
Pejabat, Wakil Rakyat, Pegawai Negeri
(PNS, TNI dan POLRI) Serta Para Cukong
Dalam Dan Luar Negeri Serta
Konglomerat.....167
6. Apa Yang Diberikan Negara Kepada Rakyat
Biasa?.....172
7. Reformasi Itu Ternyata Hanya Sebuah
Kudeta Belaka.....172
8. Kasus Ahok vs DPRD DKI Menguak
Perselingkuhan Eksekutif dan Legislatif Di
Indonesia.....174
9. Jalan Terjal Perindo.....175
10. Amin Rais, Sudahlah177

Babak ke-Sepuluh.....180

Datar-datar saja.....180

1. Andai Indonesia Diembargo Seluruh Dunia,
Indonesia Masih Bisa Hidup.....180
2. Semua Yang Nampak Tidak Bermasalah
Belum Tentu Tidak Ada Masalah.....181
3. Syahrini Super Lebay Yang Top
Markotop.....182

Babak ke-Sebelas.....185

Untuk Rakyat.....185

1. Jujurlah Dan Jangan Ngeyel.....185
2. Jangan Demonstrasi Yang Mengganggu
Kepentingan Umum Apalagi Sampai
Anarkhis.....187
3. Bersatulah Untuk Membangun Negara..189

Sedikit Tentang Penulis.....191

RAKYAT MENGGUGAT

Babak ke-Pertama

Preamble

1. Pengantar Penulis

Alhamdulillah, wassyukurullillah, wassholatu wassalamu ‘ala Rosulillah, walaahaula walaaquata illa billah. Puji syukur kepada Alloh yang telah memberi segala anugerah dan kenikmatan. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada manusia suri tauladan sepanjang zaman, yaitu kanjeng Nabi Muhammad saw.

Buku ini lahir sebagai bentuk kecintaan kepada negara dan bangsa Indonesia, kecintaan dan penghormatan kepada bapak Jokowi (Jokowi) sebagai Presiden RI dan bapak Jusuf Kalla (JK) sebagai wakil presiden RI. Kecintaan kepada seluruh Kabinet Kerja dan kecintaan kepada wakil rakyat, aparat, pejabat dan seluruh rakyat Indonesia.

Ungkapan kegelisahan, kegalauan hati akan kondisi nasib rakyat anak negeri menjadi dorongan kuat untuk menuliskannya dalam buku berjudul “Rakyat Menggugat”. Bukan bermaksud menghina atau meremehkan, kalau ada indikasi semacam itu mohon dianggap sebagai megkritisi untuk dipahami.

Tulisan ini hanya sebagian kecil permasalahan yang ada di negara kita. Masih terlalu banyak untuk diungkap satu persatu. Setidaknya ini bisa mewakili dan mengawali untuk penggalan permasalahan yang lainnya. Rakyat adalah penduduk negeri yang tidak

terlibat secara langsung dalam mengelola sistem pemerintahan, otomatis rakyat tidak menerima gaji dari negara. Meggugat merupakan ekspresi dalam bentuk protes, mengkritisi atau menyentil.

Apapun yang saya tulis dalam buku ini mempunyai harapan yang besar untuk memulihkan Indonesia kemasa kejayaan nusantara sebagaimana masa silam, sebelum datangnya penjajah Belanda yang menghancurkan. Dan berkembang diteruskan dalam beberapa era pemerintahan.

Semoga bisa membuka wawasan kita, ada manfaatnya dan menghasilkan pembaharuan perubahan kearah perbaikan. Jika ada beberapa pihak yang merasa kurang nyaman dengan isi buku ini, anggap saja ini celotehan orang jalanan yang melihat lalu lalang orang pengendara dijalanan yang tanpa menghiraukan peraturan. Jadi mohon dimaafkan. Mari kita bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan lebih baik.

Madiun, 2 Maret 2015

HUDA HADI

Penulis

2. Pengantar Penulis 2

Alhamdulillah dan terima kasih saya sampaikan kepada pembaca tercinta, salam kenal dan salam sejahtera. Kita adalah bersaudara sebagai sesama anak bangsa. Segala perbedaan yang tertera dalam sara bukan untuk disengketakan, tapi saling melengkapi, mengisi dan menguatkan.

Edisi yang anda baca ini, merupakan edisi yang kesekian. Pada awalnya buku ini hanya difoto kopi oleh beberapa peminat yang ingin menambah wacana tentang pemikiran anak bangsa. Saya tawarkan ke penerbit, tapi tidak ada jawaban bisa terbit apa tidaknya.

Self publishing sebagai media penerbitan independent yang dimediasi oleh Gramedia group. Pembacapun bisa menerbitkan karyanya disini.

Buku ini, terbit bertepatan dengan menjelang perayaan peringatan kemerdekaan RI yang ke 70. Karena itu tepat sekali buku ini untuk dibaca, dikaji dan diterapkan dalam mengisi kemerdekaan. Rasa keadilan, rasa kemakmuran, kedamaian dan kenyamanan masih terasa jauh dari kehidupan rakyat.

Perlakuan tidak adil dari pemerintah hampir dirasakan oleh semua kalangan diseluruh pelosok negeri. Pemerintah hanya lebih memperhatika para pegawai negeri, tni dan polri. Sedang rakyat biasa dibiarkan menderita dan merana.

Sebarkan dan beri pencerahan kepada semua rakyat melalui buku ini. Biar terbuka wacana baru dalam memahami persoalan dalam negeri.

Terima Kasih untuk kerjasamanya. Mohon maaf jika ada kata dan tulisan yang tidak berkenan. Ini bukan ilmiah akademik, tetapi buku kasuistik yang kita jumpai dipelosok negeri.

Madiun, 6 Agustus 2015

HUDA HADI

Penulis

3. Dibutuhkan Komunitas Relawan KPK3 Untuk Tiap-Tiap Daerah Tingkat Dua

Sebagai wujud dari pelaksanaan program Komisi Pemberantasan Kemiskinan, Kebodohan dan keterbelakangan. Dibutuhkan banyak relawan diseluruh Indonesia untuk tiap-tiap daerah Kabupaten/Kota.

Kantor atau cabang atau home base daerah berada di kabupaten atau kotamadya/kota administratif. Kantor cabang kita sebut Markaz Daerah. Contoh Markaz Daerah Pandeglang. Keberadaan Markaz Daerah diusahakan berada didalam kota atau pinggiran kota yang mudah dijangkau sarana transportasi. Dan banyak terjangkau sinyal HP.

Markaz provinsi tidak harus berada di ibu kota provinsi, tapi dibuat bergilir setiap daerah tingkat dua dalam satu provinsi secara bergantian dengan syarat dan ketentuan tertetu. Markaz Pusat berada di pusat ibu kota negara, sebab mendekati pusat pemerintahan untuk memudahkan koordinasi dan sosialisasi degan pemerintah pusat.

Keanggotaan bebas tidak ada persyaratan yang memberatkan seperti umur, ijazah, kelulusan, skck, kartu kuning, surat dokter, tidak perlu itu. Keinginan kuat untuk merubah keadaan dan ikhlas/rela bekerja demi rakyat dalam kebersamaan itu yang utama, dan yang pasti berdasar domisili setempat.

Kepengurusan akan ada persyaratan tertentu, dalam satu Markaz Daerah ada lima orang pengurus dan beberapa koordinator kecamatan satu orang per kecamatan. Semua akan dibuat AD ART nya. Yang jelas tidak ada perbedaan agama, suku ras, jenis

kelamin. Dan tidak boleh membawa-bawa partai dan SARA ini larangan.

Untuk sementara kantor pusat berada di rumah saya yang sekaligus sebagai tempat tinggal saya, hal ini untuk memudahkan pendataan awal sampai nanti ada kejelasan keberadaan kantor pusat di Jakarta. Kecuali ada pihak yang bersedia menawarkan tempat di Jakarta dengan segala perlengkapannya KPK3 bisa segera pindah di Jakarta.

Bagi yang menginginkan menjadi relawan harap menghubungi kami melalui surat yang dikirim melalui pos dengan menuliskan di pojok kiri atas asal daerah (kab/kota, Provinsi), sekali lagi melalui pos untuk memudahkan memilah-milah (mengelompokkan) asal daerah dan mengkoordinasikannya. Anda cukup menuliskan:

Nama	:
Tempat tgl lahir	:
Pendidikan Akhir	:
Alamat	:
Kab/Kota	:
Provinsi	:
Nomor HP	:
Pin BBM	:
E-Mail	:
WhatsApp	:

Kirimkan ke alamat:

Huda Hadi

Blaru RT 37/5, Glonggong, Dolopo
Madiun, Jawa Timur 63174

Diantara tugas relawan adalah mengidentifikasi permasalahan dilingkungan terdekat tempat tinggalnya kemudian melaporkan ke koordinator kecamatan. Di musyawarahkan di Markaz Daerah, diputuskan dan ditindak lanjuti (dikerjakan) bersama. (sementara kepengurusan belum terbentuk).

Apapun bentuk persoalan yang ada kita akan kerjakan. Bisa jadi nanti sebagai intelijen, dan semua hal yang bisa kita kerjakan. Termasuk mengorek kebobrokan pejabat dan aparat. Terlebih yang berkenaan dengan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan itu sebagai prioritas utama. Semua demi kesejahteraan, kenyamanan dan rasa keadilan sebagai rakyat Indonesia.

Yang pasti kita sebagai mitra semua instansi pemerintah yang syah, boleh dikata kita sebagai pelaksana bayangan pemerintah daerah. Kita tidak melakukan konfrontasi tapi melakukan kerja sama, koreksi dan mengkritisi serta mengadakan dialog demi kebaikan bersama. Dengan begitu kita akan berjalan seiring sejalan untuk mensejahterakan rakyat.

Keterangan lebih detail tentang program KPK3, baca Babak ke-Lima “Bentuk Komisi Pemberantasan Kemiskinan, Kebodohan, dan Keterbelakangan (KPK3) halaman 103

4. WAWASAN 2045 BERDIKARI, MAJU DAN MODERN

Tulisan ini saya muat dalam buku saya berjudul; “Seandainya Saya Menjadi Presiden RI”. (saya tulis tahun 2008). Sebuah program jangka panjang sebagai target dari kepemimpinan saya sebagai presiden RI. Seorang presiden harus mempunyai visi misi dan target jauh kedepan. Dengan adanya visi dan misi, kerja akan terencana dan terprogram dengan baik.

Sebagai seorang presiden saya akan membuat satu rumusan kedepan untuk mencapai target terhadap perkembangan Indonesia. Hal ini juga boleh dikata sebagai visi dan misi bangsa. Saya akan tancapkan tonggak visi dan misi ini sebagai acuan untuk membangun negara.

Setidaknya ada tiga hal utama yang akan saya capai dalam menuju Indonesia masa depan. 1. Berdikari, 2, Maju dan 3. Modern. Ketiga hal ini akan saya targetkan paling lambat dalam tahun 2045 sudah tercapai.

Pada tahun tersebut umur kemerdekaan Indonesia sudah mencapai 100 tahun alias satu abad. Sudah seharusnya kita sejajar dengan negara-negara maju bahkan kita lebih maju dari nagara-negara yang sudah lebih dulu maju.

Karena itu saya mengharap kepada presiden-presiden dan pemimpin setelah saya mampu menerjemahkan, meneruskan dan menyempurnakan apa yang menjadi visi-misi bangsa (wawasan) 2045 ini.

1. Berdikari

Saya memakai istilah berdikari sebab istilah ini adalah khas milik kita. Setahu saya istilah berdikari dipopulerkan oleh proklamator kita yang sekaligus sebagai presiden RI pertama yaitu Soekarno. Berdikari merupakan kependekan dari Berdiri diatas Kaki Sendiri. Ini bermakna kita mandiri.

Dalam tahun 2045, saya berharap kita bangsa Indonesia dan seluruh rakyatnya sudah mampu memenuhi kebutuhan sendiri dengan tidak tergantung kepada orang lain apalagi bangsa lain. Pada tahun ini kita sudah betul-betul mapan dari semua sektor. Tidak ada lagi hutang luar negeri, tidak ada lagi pengiriman TKI dan TKW keluar negeri (kalaupun ada adalah tenaga Professional yang diminta pihak luar negeri).

Swasembada pangan, dan kebutuhan dasar yang lain sudah bisa kita penuhi sendiri. Tidak adalagi import apapun bentuknya, kecuali hal-hal yang bersifat sekunder. Dalam kurun tersebut tidak ada rakyat Indonesia yang kelaparan karena ketiadaan pangan, baik karena tidak ada produksi atau karena mahal harganya. Sandang, pangan dan papan sudah tidak menjadi masalah.

Pada masa tersebut semua kebutuhan tersedia dengan melimpah, dengan harga yang wajar dan pihak petani atau produsen tidak dirugikan. Daya beli masyarakat sangat terjangkau. Tidak ada istilah tidak mampu membeli kebutuhan dasar atau sembako. Bahkan kebutuhan sekunder bisa dengan mudah kita beli.

Peluang-peluang kerja sangat banyak, bahkan

mungkin kita kekurangan tenaga kerja. Kalau perlu kita akan ambil pekerja dari luar negeri untuk dikerjakan di beberapa sector, terutamanya buruh kasar, pembantu rumah tangga dan bidang-bidang yang sudah tidak diminati oleh anak negeri.

Nilai uang kita pada masa itu sangat stabil dan tinggi, sehingga pekerja kasar dan rendah pun bisa menikmati hidup yang nyaman. Orang Islam mudah untuk menunaikan ibadah umroh bahkan ibadah haji. Orang non Islam mudah untuk pergi melancong keluar negeri, kita disegani oleh dunia luar. Pendek kata kita sudah mampu dalam banyak hal. Dengan tidak bergantung kepada pihak asing. Kita betul-betul bisa Berdiri diatas kaki sendiri

2. Maju

Maju disini saya terjemahkan sebagai kita berada di garis depan dalam banyak bidang terutamanya teknologi dan peradaban. Kita setaraf dengan negara-negara barat bahkan kita satu langkah lebih maju.

Dalam teknologi kita akan kuasai semua bidang, baik itu permesinan atau teknologi telekomunikasi, informasi dan luar angkasa. Kita akan siapkan sedini mungkin generasi-generasi yang akan mengisi peluang pada masa itu. Kita cari bibit-bibit unggul dan kita biayahi, kita kuliahkan ke beberapa negara yang lebih dulu maju dari negeri kita.

Semua bidang yang berkenaan dengan teknologi akan kita gali dan kembangkan, penguasaan angkasa luar sampai kedalaman samudra akan kita kaji dan teliti. Pengembangan ilmu

teknologi menjadi prioritas utama, sebab ini juga merupakan sarana untuk menguak ayat-ayat Tuhan yang berupa alam semesta dan bisa menjadi penunjang kemajuan ekonomi.

Dalam bidang olah raga, kita kerahkan sekuat daya tenaga untuk melatih atlit-atlit berbakat. Kita kembangkan bakat dan potensi mereka. Untuk menunjukkan prestasi terbaiknya. Kita akan berjaya diperingkat antar bangsa (internasional) terutamanya dalam Olimpiade dan berbagai event olah raga yang lain. Setidaknya kita berada diperingkat tiga atau lima besar, sesuai jumlah penduduk kita yang nomer empat atau lima terbesar di persada bumi ini.

Dalam bidang seni dan budaya kita galakkan bengkel-bengkel seni, kita fasilitasi kreatifitas mereka, kita dukung dan kembangkan. Seni lukis, arsitektur, drama, film, tari dan semua yang berkenaan dengan seni budaya. Sehingga hasil dan kemampuan seni budaya kita amat dihargai dan disanjung di dunia internasional.

Dalam bidang pendidikan, kita menjadi rujukan dan tujuan para mahasiswa, pakar dan akademisi untuk belajar, meneliti dan study banding di Indonesia. Fasilitas pendidikan dan penelitian sangat lengkap dan modern, semua bidang ilmu kita kembangkan.

Saya akan kaji semula sejarah kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Pada masa itu, pembukaan lapangan-lapangan ilmu sangat dihargai. Sehingga pada masa itu Islam telah lebih dulu maju daripada dunia-dunia barat yang lain. Sehingga banyak peninggalan-peninggalan dan warisan yang berupa ilmu telah diterjemahkan kedalam dunia barat.

3. Modern

Modern disini saya maksudkan adalah, semua sarana dan prasarana kehidupan sehari-hari kita telah menggunakan teknologi. Dari yang paling sederhana sampai yang super canggih kita sudah terbiasa dan mampu menggunakannya.

Pada tahun 2045 saya telah memimpikan semua rakyat Indonesia sampai dipelosok pedalaman sudah dapat menikmati fasilitas teknologi modern. Disetiap rumah sudah ada sarana komunikasi, telepon dan internet. Kalaupun belum mampu setidaknya mereka sudah paham akan hal-hal itu dan mudah dicari ditempat terdekat dari rumahnya.

Sarana hiburan berupa televisi disetiap rumah sudah pasti ada bahkan disetiap kamar tersedia. Mereka tinggal pilih chanel mana yang dia sukai. Peralatan rumah semua tersedia dengan menggunakan teknologi modern. Kita tidak perlu bersusah payah untuk menyediakan hidangan yang kita inginkan.

Tidak ada lagi orang memasak pakai kayu apalagi kompor minyak tanah. Semua sudah memakai kompor gas, bio gas, batu bara atau listrik. Sudah tentu listrik dan sarana air bersih sudah tersedia dengan mudahnya. Air keran dari pam/pdam bisa langsung diminum tidak perlu memasak lagi.

Hampir setiap rumah mempunyai mobil, setidaknya sepeda motor. Harga mobil dan sepeda motor sangat terjangkau, sehingga hampir tidak ada perbedaan antara kota dan desa dari segi fasilitas dan sarana.

Itulah yang menjadi wawasan 2045 negara

Indonesia. Sebagai presiden saya tidak mungkin bekerja sendiri. Saya akan angkat para pakar dan semua tokoh masyarakat serta rakyat semua untuk mewujudkan cita-cita ini. Sebagai penjabaran selegkanya sudah saya tuliskan dalam buku saya yang berjudul; "Seandainya Saya Menjadi Presiden RI".

5. Beberapa Presiden Indonesia Dalam Kaca Mata Saya

Tulisan ini saya muat dalam buku saya berjudul; "Indonsia dalam Kuasa Roh Jahat". Saya tulis tahun 2012 pada masa pemerintahan SBY periode kedua Dan kini (2015) SBY sudah lengser dari jabatannya sebagai presiden untuk yang kedua kalinya. Presiden periode ini Jokowi.

1. Soekarno

Saya tidak merasakan kepemimpinan Soekarno, sebab beliau sudah dilengsengserkan atau dikudeta sebelum saya dilahirkan. Tetapi dari berbagai sumber yang saya dapatkan tentang gaya kepemimpinan Soekarno saya bisa menyimpulkan dan membuat penilaian tersendiri versi kaca mata saya.

Sebagaimana kita ketahui Soekarno bersama Muhammad Hatta adalah sebagai bapak proklamator kemerdekaan Indonesia. Soekarno menjadi presiden Indonesia yang pertama dan Moh Hatta sebagai wakilnya.

Soekarno terkenal sebagai jago pidato atau singa podium, orang yang berfikiran cerdas, mempunyai visi jauh kedepan, menguasai berbagai

bahasa didunia, mempunyai gelar insinyur (Ir), berpenampilan flamboyant dan sederet gaya khas Soekarno yang lain. Pidato-pidato Soekarno telah membius dan membakar semangat juang jutaan rakyat Indonesia. Isi pidatonya bukan hanya sekedar laporan kekayaan negara yang sama sekali tidak dinikmati oleh rakyat apalagi berisi keluhan dan pencitraan, tapi pidato Soekarno telah menjadi ajaran.

Banyak istilah-istilah yang muncul selama kepemimpinan Soekarno. Diantaranya adalah; MANIPOL USDEK, NASAKOM (Nasionalis Agama Komunis), BERDIKARI (Berdiri Diatas Kaki Sendiri), Ganyang Malaysia, JASMERAH (Jangan Sampai Melupakan Sejarah), Indonesia Menggugat, Pemimpin Besar Revolusi, Penyambung Lidah Rakyat, dan beberapa istilah lain yang saya belum ketahui.

Sosok kepemimpinan Soekarno yang kharismatik sampai sekarang masih di ingat dan dirindukan oleh sebagian rakyat Indonesia. Hanya Soekarno yang berani menentang PBB dan keluar dari PBB, demi menyatukan dan menyelamatkan sesama negara serumpun dari ancaman imperialisme dan kolonialisme barat, Soekarno menginvasi Malaysia dengan slogannya yang terkenal 'Ganyang Malaysia'.

Kehebatan kepemimpinan Soekarno tidak diragukan lagi dan telah mendapat pengakuan dari dunia Internasional. Di dalam negeri Soekarno sangat dikagumi dan mendapat tempat dihati rakyat. Dengan kharisma yang dimiliki membuat Soekarno terhanyut oleh buaian roh jahat yang senantiasa

menjerumuskan manusia. Soekarno mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup.

Ini diantara petaka yang menjadi penyebab kejatuhan Soekarno dari singgasana kekuasaan presiden Indonesia. Soekarno lengser setelah adanya kudeta halus dari Soeharto yang dengan jitu menghembuskan isu-isu adanya dewan jendral dan komunisme.

2. Soeharto

Soeharto menjadi presiden berkat surat sakti yang bernama '*supersemar*' (surat perintah sebelas maret). Isi supersemar sendiri sampai sekarang masih menyimpan misteri yang belum terpecahkan.

Awal kenaikan Soeharto disertai dengan pertumpahan darah dimana-mana, yang terkenal dengan istilah G 30 S PKI, begitu juga dengan jatuhnya Soeharto juga disertai dengan pertumpahan darah dan kerusakan dimana-mana, yang terkenal dengan adanya gerakan reformasi..

Sebagai seorang militer, Soeharto memegang teguh garis komando sehingga sukses menggenggam Indonesia selama 32 tahun. TNI khususnya angkatan darat seakan-akan menjadi warga Negara kelas 1. Pos-pos TNI mulai dari pusat sampai ke pelosok desa siap sedia. Strategi dan management yang bagus membuat semakin kuat kuku orde baru menancapkan kekuasaannya.

Efek dari itu telah menimbulkan kronisme yang luar biasa. Ciri khas penjajahan Belanda yang mengeruk keuntungan bumi pertiwi dimanfaatkan oleh anak dan kroni-kroni Soeharto. Seakan bumi Indonesia adalah warisan nenek moyangnya, dimana-

mana terjadi penjarahan. Mulai hutan, tambang, lautan, daratan sampai udara mau dikusai semua oleh keluarga dan kroninya.

Soeharto terkenal dengan sebutan bapak pembangunan. Dan kenyataannya Soeharto memang sukses membangun Jakarta menjadi kota besar di Indonesia. Semua *'tumplek blek'* di Jakarta. Semua hasil kekayaan alam seluruh Indonesia disedot oleh Jakarta baik oleh cukong atau pejabat. Daerah asal sama sekali tidak mendapat bagian apa-apa. Dalam pembangunan Jakarta jauh meninggalkan kota-kota besar di Indonesia.

Gaya kepemimpinan yang semi dictator telah menuai protes dimana-mana, siapa yang berseberangan pendapat dengan Soeharto akan dilenyapkan. Nilai positif dari gaya ini, keamanan relative terkendali. Hampir tidak ada gejolak yang meresahkan warga.

Semua serba terkontrol, harga-harga kebutuhan pokok tidak begitu melonjak kenaikannya. Tidak ada kelangkaan pupuk seperti yang sering terjadi sekarang ini. Para petani dengan mudah mendapat pupuk, obat-obatan dan ada penyuluhan. Lewat forum *'klompencapir'* (kelompok pembaca dan pirsawan) Soeharto sering mengadakan pertemuan dengan para petani.

Kondisi yang relative stabil, aman dan terkendali tersebut banyak dimanfaatkan oleh keluarga dan kroni-kroni Soeharto. Dengan tidak sadar dan terbuai oleh alunan roh jahat lewat kroninya Soeharto menikmati kondisi yang sedemikian rupa,

hingga hal ini mengakibatkan Soeharto lengser dari singgasana kepresidenan Indonesia.

Adalah gerakan reformasi lokomotif yang dikendarai para mahasiswa untuk menggulingkan Soeharto. Tekanan perubahan dan pengunduran diri telah memporak porandakan tatanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kerusuhan, penjarahan terjadi dimana-mana.

Saat itu roh-roh jahat sangat kuat bergentayangan di Indonesia, manusia kehilangan rasa 'kemanusiannya', pemerkosaan, penjarahan dan pembunuhan dimana-mana. Hukum rimba seakan yang berkuasa.

Melihat kenyataan dan keadaan yang seperti ini, Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menyatakan diri mundur dari jabatan presiden RI yang sudah dijalani selama 32 tahun.

3. Habibi

Habibi naik menjadi presiden sebab berkah dari lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan. Pada masa itu Habibi menjadi wakil presiden, secara otomatis jabatan presiden diteruskan oleh wakilnya. Sebuah keberuntungan Habibi bisa merasakan jadi presiden RI. Ini juga berkat konsep getrakan reformasi yang hanya sepotong.

Habibi mengawali karirnya dalam dunia politik semenjak dilantik menjadi menristek dan bergabung dengan Golkar. Latar belakang Habibi adalah sorang ilmuwan dalam bidang kedirgantaraan. Kepakaran dalam membuat pesawat diakui oleh dunia internasional, sehingga ada beberapa teori yang

ditemukan Habibi. Seperti; “*Habibie Factor*“, “*Habibie Theorem*” dan “*Habibie Method*“.

Sebagai seorang teknokrat Habibi kurang pas untuk masuk dalam dunia politik. Sepak terjangnya selama menjadi menteri juga sering menimbulkan kontroversi, seperti penukaran pesawat buatan IPTN dengan beras ketan dari Thailand. Selama jadi menteri Habibi juga dipercaya untuk mengelola pulau Batam.

Satu hal yang tidak akan dilupakan dan menjadi bahan sejarah adalah, semasa Habibi menjadi presiden RI Timor-timur lepas dari NKRI dengan adanya referendum. Kesalahan fatal ini, mengakibatkan LPJ Habibi tidak bisa diterima oleh MPR.

Dan kedudukan Habibi segera dilengserkan dengan diadakan pemilu untuk yang pertama kali dalam era reformasi. Habibi menjabat sebagai presiden RI selama 518 hari atau sekitar 1 tahun 5bln.

4. Gus Dur

Gus Dur menjadi Presiden RI juga karena berkah, sebab adanya poros tengah dan sebab pengunduran diri Yusril Ihza Mahendra untuk maju menjadi calon Presiden RI. Atas ide Amin Rais Gus Dur dicalonkan untuk maju menjadi capres, ini dilakukan untuk mengganjal laju Megawati yang juga mau mencalonkan diri jadi capres. Dan atas ide Amin Rais juga Gus Dur dilengserkan.

Selama menjadi presiden Gus Dur banyak sekali mengunjungi berbagai negara di belahan dunia. Seakan seperti ‘*aji mumpung*’, sampai-sampai muri mencatat Gus Dur presiden yang baru dilantik tapi sudah mengunjungi berpuluh negara.

Kegemaran Gus Dur mengelilingi berbagai negara sedang dalam negeri banyak terjadi kekacauan mengakibatkan kekecewaan sebagian besar rakyat Indonesia. Sehingga pada 23 Juli 2001 MPR melakukan sidang istimewa yang intinya melengserkan Gus Dur dari kursi kepresidenan RI. Isu yang diangkat adalah, Gus Dur tersandung kasus “Brunei Gate”.

Gaya bicara Gus Dur yang ceplas-ceplos sering menimbulkan pro kontra. Ada slogan ‘*gitu aja koq repot*’ kata itu yang mempopulerkan Gus Dur. Selama menjadi presiden Gus Dur banyak membuat perubahan, seperti pembubaran departemen penerangan, dibolehkan perayaan imlek, penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua dan banyak lagi gebrakan-gebrakan yang telah dilakukan Gus Dur.

Gus Dur memang pemberani, selama menjadi presiden Gus Dur juga kerap kali melakukan reshuffle kabinet. Bahkan Gus Dur pernah mengeluarkan dekrit presiden yang isinya pembubaran parlemen. Tapi dekrit ini tidak meman justeru Gus Dur digulingkan oleh parlemen.

5. Megawati

Megawati menjadi presiden juga lebih karena berkah, sebab Gus Dur dilengserkan dan Megawati sebagai wakil presiden otomatis naik menjadi presiden. Popularitas Megawati tidak terlepas dari nama besar ayahnya yaitu Soekarno. Dan ini yang mendongkrak harga Megawati.

Selama menjadi presiden RI hampir tidak ada gebrakan dan perubahan yang dilakukan. Bahkan Megawati cenderung terkesan pendiam, kurang

komunikatif dan lamban dalam merespon peristiwa. Pada masa itu terorisme berkembang dengan pesat, terjadinya peledakan bom Bali dan bom-bom yang lain.

Adem-adem dan dingin itulah kesan masyarakat terhadap kepemimpinan Megawati. Padahal yang diperlukan kepemimpinan Indonesia adalah yang tegas, cerdas, berwibawa, bisa mengayomi, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, lebih dari itu bisa mensejahterakan dan menenteramkan rakyat.

6. SBY

SBY tercatat dalam sejarah menjadi presiden pertama kali dalam pemilu yang diadakan khusus untuk memilih presiden dan wakilnya. Pada awal naiknya SBY menjadi presiden, seakan bangsa Indonesia menemukan presiden yang bisa diharapkan mampu menjadi pemimpin besar dan membawa perubahan yang mampu mensejahterakan rakyat.

Program BLTnya (bantuan langsung tunai) berhasil mengantarkan SBY kembali terpilih menjadi presiden RI yang kedua kali. Sungguh sebuah kesuksesan manusia Indonesia telah terjadi pada SBY. Karir militernya bisa mencapai puncak tertinggi menjadi jenderal, begitu juga karir di pendidikannya juga mencapai prestasi tertinggi meraih gelar doctor (S3). Dalam pemilihan presiden secara langsung, yang masa jabatan seorang presiden dibatasi hanya dua periode, SBY juga berhasil mencapainya.

Sayangnya semua kesempatan dan kesuksesan itu, tidak memberi manfaat kepada rakyat Indonesia. *SBY terlalu inklusif, jaga imej, pencitraan*

dan hanya berdiam dimenara gading. Tidak beranjak, tidak bergerak untuk membuat satu langkah, keberanian, gebrakan dan terobosan yang mampu membawa perubahan menuju kesejahteraan rakyat.

Dia lebih menikmati pada dunianya sendiri yang lebih kepada seniman musik. Dikala kampanye dia akan menyanyi, dikala menjadi presiden sering berkaraoke dan menciptakan beberapa lagu dan direkam, pada momen seperti ini terasa betul penghayatan dan penjiwaannya.

Tapi dalam menghadapi problem rakyat terasa hambar, lamban, ragu, bahkan terkesan penakut, sama sekali tidak mencerminkan seorang jenderal dan seorang doctor. Saya masih ingat kasus bencana banjir bandang Wasior di Papua.

Sudah ada rencana mau kesana (itupun sudah lambat) tapi ditunda atas alasan yang dibuat-buat. Anehnya dia tampil di televisi menyaksikan pertandingan sepak bola. Sungguh tidak ada rasa empati sama sekali sebagai seorang pemimpin, rakyatnya meregang nyawa menderita karena bencana, tapi pemimpinnya enjoy berkaraoke ria dan menonton sepak bola.

Itulah sosok SBY dalam kaca mata saya. Menjadi presiden untuk pertama kali lebih karena factor keberuntungan, mengingat saat itu pesaingnya cukup hebat. Sedang terpilihnya yang kedua lebih karena berkah sebab program BLTnya.

Dan diakhir masa jabatannya SBY mendapat gelar baru Bapak Pilkada Tidak Langsung. Sebab partainya SBY (Demokrat) mendukung plkada tidak langsung yang dipelopori anggota DPR dari KMP (Koalisi Merah Putih) pimpinan Prabowo Subianto.

Sampai SBY lengser kasus Century belum ada titik terang.

7. Jokowi

Karir Jokowi melesat mantab dan sampai ke puncak tertinggi dalam kepemimpinan sipil, yaitu Presiden RI. Berawal dari menjadi Walikota Solo selama hampir dua periode. Jokowi naik pangkat menjadi Gubernur DKI. Belum genap dua tahun menjadi Gubernur DKI, Jokowi terpilih menjadi Presiden RI yang ke-7. Secara penampilan fisik serasa tidak mungkin Jokowi menjadi presiden RI, *“tidak ada tampang”*.

Blusukan sudah menjadi branding Jokowi ketika menjadi Gubernur DKI. Gaya kepemimpinan yang tidak lazim sebagaimana gubernu DKI sebelumnya. Mengunjungi tempat kumuh, pasar, sampai masuk gorong-gorong, membuat rakyat terpesona. Jokowi menjadi fenomena sosok pemimpin gaya baru.

Waktu hampir dua tahun mampu menghipnotis rakyat Indonesia untuk mengangkat Jokowi menjadi presiden RI. Proses pencapresan Jokowi diwarnai penuh intrik. Mulai awal pencapresan, menjelang kampanye, masa kampanye, sampai pilpres usai dan penghitungan suara usai, masih penuh liku perjalanan Jokowi menjadi presiden RI.

Baru pada tanggal 20 Oktober 2014 Jokowi benar-benar syah menjadi presiden RI seiring pelantikannya pada waktu itu. Awal Jokowi menjadi Presiden RI kisruh di parlemen terjadi. Antara kubu pendukung Jokowi dalam KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan kubu KMP (Koalisi Merah Putih)

pendukung Prabowo. Dua kubu tersebut ‘eker-ekeran’ rebutan kursi kuasa di parlemen.

Awal pemerintahan Jokowi memberi kado kepada rakyat dengan adanya kenaikan harga BBM. Terjadinya kisruh antara KPK versus POLRI, terjadinya kriminalisasi terhadap ketua KPK. Seratus hari yang pertama pemerintahan Jokowi diwarnai penuh gejolak.

Rakyat sepertinya belum bisa tersenyum dengan adanya presiden yang baru ini. Sebab yang terjadi adalah kenaikan BBM yang berimbas kepada naiknya harga barang-barang. Rakyat masih berada dalam ketidakpastian, komoditas pertanian merangkak naik, suasana politik juga masih bergejolak perseteruan dua kepemimpinan parpol dan perseteruan KPK – POLRI.

Kita masih belum bisa menilai seperti apa kepemimpinan Jokowi kedepan. Indikasi yang ada berhembus kuat Jokowi berada dalam bayang-bayang kehendak Megawati sang bos partai Jokowi. Kita lihat saja apa yang terjadi nanti.

**kesimpulan ringan*

Menurut kaca mata saya, selama 69 tahun Indonesia merdeka, kita baru merasakan memiliki presiden 2.5 orang. 1. Soekarno, beliau seorang proklamator dan negarawan ulung. 2. Soeharto, sang jenderal besar dan menejerial handal, dan 0.5. Gus Dur sang fenomenal.

Sedang yang lain hanya sebagai pelengkap dari sebuah pemerintahan. Sebab tidak ada efek yang berarti. (Jokowi belum masuk hitungan baru enam bulan)

Babak ke-Dua

Beberapa Pertanyaan

1. Apa Kabar Century?

Sebagai rakyat jelata saya berhak menanyakan kabar cerita bagaimana *'kabul kawusanane'* (cerita selanjutnya) tentang kasus Bank Century. Seperti lenyap ditelan bumi, hilang tanpa bekas, begitu cerita Century. Waktu 5-6 tahun sudah berlalu kasus Century, tapi sama sekali tidak ada titik-titik cahaya penerang bagaimana nasib kasus Bank Century.

Rp 6.7 Triliun uang negara hilang tanpa ada keterangan. Uang yang sangat banyak cukup membebaskan biaya kuliah mahasiswa satu provinsi. Cukup untuk membiayahi operasi pengobatan pasien se pulau Jawa. Tapi uang itu menguap entah kemana.

Sungguh aneh bagaimana uang segitu banyak tidak bisa terlacak keberadaannya. Mengalir kemana dan berhenti dimana. Berbeda dengan kasus Hambalang relatif cepat kasus itu terungkap. Akankah kasus Century akan lenyap tanpa ada yang berani bertanggung jawab?

Sebagai rakyat berharap uang itu akan kembali dan pelakunya bisa ditangkap dan diadili. Uangnya dikelola untuk memberi beasiswa kepada para mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu secara ekonomi. Bisa juga untuk membiayahi pengobatan pasien yang tidak mampu. Sedang pelakunya dihukum seberat-beratnya.

2. Kepada Siapa? 1

Para petani antri berjam-jam bahkan berhari-hari untuk mendapatkan solar guna mengisi disel mereka untuk mengairi sawah dan mengisi traktor untuk membajak sawah. Betapa susah-payahnya para petani untuk membeli kebutuhan pokok berupa solar yang itu untuk mencukupi kebutuhan hidup. Petani tidak bisa berbuat apa-apa dengan adanya kelangkaan solar ini. Kepada siapa petani akan mengadu? Ke pemilik POM bensin? Apa ada petani yang berani mengadu tentang hal ini?

Petani kembali dibuat resah dan kebingungan disaat tanaman padi mereka membutuhkan pupuk. Petani akan membeli pupuk tidak ada stok alias habis. Kembali petani dibuat susah dan menderita karena kelangkaan pupuk. Kepada siapa petani akan mengadukan hal ini? kepada pemilik toko? gudang? Penyalur?

Para sopirpun dibuat kelabakan karena kelangkaan BBM, bensin, solar semua habis. Sopir tidak bisa bekerja sebab mobil angkot dan bis mereka tidak ada bahan bakar untuk armadanya. Kepada siapa sopir akan mengadu? Majikan yang punya armada? Kepada pemilik POM bensin? Pertamina?

Rakyat kecil yang tergolek sakit dirumah sakit membutuhkan biaya untuk pengobatan, perawatan dan operasi, tapi tidak mendapat layanan. Sebab mereka tidak mampu menyediakan uang untuk itu semua, jangankan biaya pengobatan, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja sulit terpenuhi. Pagi makan, siang tidak., sore makan, malam tidak. Kepada siapa orang-orang seperti ini akan mengadu?

Kepala rumah sakit? Ketua RT? Pak Lurah? Pak Camat?

Para pencari kerja susah mendapat pekerjaan. Ditolak sana-tolak sini, persyaratan tidak memenuhi atau tidak ada lowongan, tidak punya uang sogokan atau tidak punya orang dalam. Kepada siapa pencari kerja akan mengadu? Kepada Depanaker yang memberi surat/kartu kuning? Kepada bos perusahaan? Kepada mantan kepala sekolah yang telah memberi ijazah?

Para pencari surat-menyurat di birokrasi pemerintahan sering diping-pong sana-sini, dipersulit, diperas, dimintai upeti, dimintai uang administrasi. Padahal kerja mereka di birokrasi sangat tidak memuaskan. Kepada siapa orang-orang ini akan mengadu? Kepada pimpinn kantor? Kepala dinas? Pak Camat? Pak Bupati?

Rakyat hidup dalam kemiskinan, kelaparan, ketidak pastian, dan serba ketidak nyamanan dalam negara. Hidup terlunta-lunta dalam negri sendiri, hidup miskin dalam negara kaya. Kepada siapa mereka akan mengadu? Kepada DPR? Lurah? Camat? Bupati? Gubernur? Presiden?

Kepada siapa rakyat akan mengadukan semua masalahnya? Semua orang yang berhak dan wajib dijadikan tempat mengadu sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk mencari keuntungan sendiri, sibuk mencari aman, sibuk menumpuk kekayaan. Lantas untuk apa mereka bekerja atas nama pemeritahan kalau tidak bisa membantu permasalahan rakyat? Sedang mereka mendapat gaji dan makan minum segala kebutuhan hidup didapat dari uang rakyat?

Kepada Siapa? Tanyakan kepada nuranimu, kepada siapa kamu akan mengadu. Kalau semua sudah tidak ada yang peduli, hanya kepada Tuhanmu tempat kamu kembali. Inna lillahi.

3. Kepada Siapa? 2

**tulisan ini pernah saya muat di buletin Suara Hati edisi 1 Jumat Legi, 12-02-2012*

Dahulu dimasa kecil saya, sering dicekoki dengan keadaan negara kita yang kaya raya, subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Begitu juga dengan adat budaya kita sebagai bangsa timur yang menjunjung tinggi sopan-santun, ramah-tamah dan bertoleransi.

Namun sekarang apa yang kita lihat, kita dengar dan kita rasakan? Seakan semua itu hanya omong kosong, dongengan belaka. Kita tidak melihat rakyat hidup dalam kemakmuran, tidak melihat kekayaan dimiliki oleh rakyat, tidak mendengar merdunya suara penuh kesyukuran, tidak merasakan lezat dan nikmatnya kekayaan.

Yang ada hanyalah, rakyat hidup dalam penderitaan, ketidak adilan, dan ketidak pastian. Rakyat menjadi kuli, babu, dan pelacur dinegeri orang sedang pemimpin dan wakil rakyat sibuk rebutan kursi, sibuk dalam pencitraan, sibuk mencari proyek, sibuk mencari dukungan, sibuk menimbun pundi-pundi kekayaan dan memperkosa hak-hak rakyat.

Adakah kita melihat anak muda membungkukkan badan ketika melewati orang tua? Adakah kita melihat pemimpin dan wakil rakyat berjuang membela rakyat? Adakah kita melihat

pemimpin dan wakil rakyat kita hidup dalam kemiskinan dan penderitaan?

Bisakah kita menemui wakil rakyat dan pemimpin yang kita pilih untuk mengadukan masalah kita? Tahukan anda, lebih dari separo kekayaan kita dimiliki oleh orang asing, pejabat, wakil rakyat, dan konglomerat bahkan sumber kekayaan kita 70% sudah dikuasai asing, dan dijadikan bancakan oleh petinggi kita.

Lantas.....!!! Kepada Siapa, kita akan mengadu? Kepada Tuhan? Presiden? Menteri? DPR? Bupati? Tanyakan pada hati nuranimu.

4. Negara Ini Mau Dibawa Kemana?

Nyaris tanpa bentuk dan tanpa arah. Itulah gambaran Indonesia pada saat ini. Ibarat bangunan rumah sesama tiang, dinding, atap, genting semua tidak beraturan. Semua ingin menempatkan dirinya pada posisi diatas dengan tidak menyadari kondisi dan perannya. Saking semrawutnya Justin Biber pernah mengatakan “Indonesia adalah negara antah berantah” alias tidak jelas.

Mendapat ‘ejekan/cemoohan’ seperti itu, spontan kita bereaksi membela diri, tidak terima dengan ucapan itu. Beberapa kali kita mendapat perlakuan kurang mengenakan dengan negara tetangga Malaysia. Soal penyerobotan hak milik, perlakuan majikan, dan penyebutan orang Indonesia yang berada di Malaysia dengan sebutan ‘Indon’.

Kita sering sensitif dan reaktif bila orang luar menyinggung kita. Tapi kita sering menutup mata dan telinga melihat kelakuan para pejabat dan petinggi kita yang sering melecehkan rakyat dan bangsa

sendiri. Entah apa yang ada dalam benak orang Indonesia dan bagaimana cara berfikirnya.

Kalau ada orang luar memberi imej yang cenderung negatif terhadap Indonesia tentu mereka punya alasan tersendiri. Tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Sebagai warga negara Indonesia yang pernah hidup di luar negeri, saya bisa membandingkan bagaimana situasi dan kondisi dimasing-masing negara yang pernah saya kunjungi dan tinggali.

Indonesia adalah negara besar, dengan jumlah penduduk terbesar nomor empat didunia. Dari sumber daya alam, Indonesia kaya raya. Hampir semua yang ada didunia, di Indonesia juga ada. Andai Indonesia di embargo oleh seluruh dunia, Indonesia masih bisa hidup bahkan lebih dari cukup.

Umur kemerdekaan Indonesia tahun 2015 sudah memasuki 70 tahun. Sebuah usia yang cukup dewasa. Tapi sayangnya kematangan dan kedewasaan itu masih jauh dari harapan. Kenyataannya justru semakin tidak jelas dan tidak karu-karuan.

Indonesia tidak jelas, baik dari segi apapun. Yang kuat menyeruak ke permukaan dunia Indonesia sebagai negara terkorup. Negara sebagai pengeksport TKI/TKW terbesar di dunia. Sungguh sebuah predikat negatif yang terbangun dari imej-imej sebuah peradaban.

Korupsi menjadi penyakit akut dinegara ini, sudah mendarah daging, mengalir kesetiap aliran darah seiring dengan dengusan nafas para penguasa, mulai dari terendah sampai tertinggi. Mereka kompak me

manfaatkan posisi dan jabatan untuk mencari keuntungan, baik secara sembunyi, terang-terangan atau blak-blakan.

Sebagai negara timur dan negara beragama yang konon menjunjung tinggi sopan santun dan rasa malu, kini sudah lenyap dari kehidupan. Sulit saya merumuskan bagaimana bentuk dan kondisi bangsa ini. Dari semua segi kita hampir tidak punya identitas yang dibanggakan.

Pendidikan? Tidak tahu kemana arahnya, banyak sekolah favorit dan mahal tapi hanya untuk mengejar nilai rapor dan ijazah. Munculah lembaga-lembaga 'bimbel' yang seharusnya ini tidak perlu ada andai pihak sekolah menjalankan tugas dan perannya dengan baik. Bimbel menjadi sekolah kedua yang lebih mahal biayanya hanya untuk mendongkrak angka rapor dan ijazah. Itulah ironi pendidikan kita.

Ekonomi? Rakyat semakin menderita. Semua barang naik terus dan semakin mahal, tidak terjangkau oleh mayoritas rakyat Indonesia. Terbaru saat tulisan ini dibuat harga beras melambung tinggi, padahal beras adalah sumber pangan utama kita. Sebelum ini harga cabe yang melangit. Konon Indonesia negara agraris, tapi anehnya semua hasil pertanian impor. Mata uang kita mungkin paling rendah diseluruh dunia. Karena itu banyak rakyat kita yang rela menjadi kuli, babu dan pelacur dinegeri orang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi.

Hukum? Ini semakin tidak karu-karuan, tidak jelas hitam-putihnya. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar tergantung '*uang*'. Proses hukum dan bentuk hukuman kita, juga tidak bisa ditebak.

Makelar kasus bergentayangan, siapa yang punya uang '*hukuman*' bisa diatur. Hukum tajam kebawah, tapi tumpul keatas. Itu fakta yang berlaku di Indonesia, jadi rakyat kecil jangan harap mendapat keadilan dinegeri ini.

Politik? Serasa belum dewasa, masih kenakanakkan, gontok-gontokkan, ngambekan dan keroyokan. Belum lagi perilaku pejabat dan politisi yang bersikap arogan, sudah *bloon* berlagak *pilon*. Mereka hanya mencari keuntungan pribadi, partai dan kroni. Konon wakil rakyat, tapi kenyataannya mereka sama sekali tidak mewakili suara dan kehendak rakyat. Mereka sibuk rebutan kursi, kekuasaan dan mengejar kedudukan serta materi.

Agama? Banyak sekali penganut agama di Indonesia. Sebagai agama mayoritas adalah agama Islam. Islam di Indonesia mempuyai bentuk dan penampakan yang berbeda-beda. Sulit dan nyaris tidak bisa dipersatukan, masing-masing merasa paling benar. Kekhusukan dan ketaatan dalam menjalankan ritual agama tidak berefek pada kehidupan nyata.

Identitas? Kita bangga dengan keberagaman etnis, budaya, bahasa dan berbagai kekayaan kearifan lokal. Tapi tidak sadar kita mulai menggerus kekayaan sendiri dengan menukar identitas luar negeri. Lihat penampilan, rambut dicat pirang, baju terbuka, pendek kata kita lebih bangga dengan penampilan ala barat atau korea.

Jadi apa yang akan kita banggakan dengan Indonesia? Kekayaan jadi bancakan penguasa. Kelakuan pejabat sudah jauh dari misi kemerdekaan. Rakyat berhamburan jadi kuli, babu dan pelacur diluar

negeri. Terus mau dibawa kemana Indonesia, pak Jokowi?

5. Negara Ini Mau Dibawa Kemana? 2

^tulisa ini saya tulis saat ramianya kasus BG, KPK vs POLRI

Pak Presiden Joko Widodo yang terhormat, sebagai rakyat kecil yang tidak punya kuasa untuk menentukan arah kebijakan negara, saya juga bukan pegawai negeri dan juga bukan anggota DPR. Mengetuk kepada nuranimu terdalam, mau diapakan dan dibawa kemana negara ini?

Sebagi presiden penguasa negara, penentu arah kebijakan negara, apa yang akan anda kerjakan? Apakah anda tidak punya daya untuk membuat kebijakan demi kesejahteraan rakyat? Apakah anda lebih taat kepada bos partai anda yang telah mengusungmu menjadi presiden? Apakah anda tidak mendegar suara rakyat?

Sedih sekali melihat kondisi negara yang semakin hari semakin kalang-kabut. Masing-masing mengutamakan egosime untuk menuruti nafsu ingin mereguk kuasa dan harta. Semua sudah dibutakan oleh kopentingan golongan dan kroninya. Kapan mereka akan berfikir untuk mensejahterakan dan membuat rakyat aman? Tidak dibuat bingung dan resah dengan ulah para penguasa.

Pak Jokowi, anda seorang presiden penguasa negara Indonesia, anda punya mandat penuh dari rakyat. Berbuatlah, bersikaplah, dan bertindaklah demi rakyat. Belalah rakyat untuk meraih kehidupan yang layak dinegeri sendiri, nyaman dinegeri sendiri, bukan menjadi babu, kuli dan pelacur dinegri orang.

Semua pejabat pegawai, tni dan polri ada dibawah kendalimu. Berbuatlah yang bijak dan tegas, tindak mereka yang tidak taat, tidak membela rakyat dan hanya menuruti ego kepentingannya. Sikat mereka jangan takut dan kuatir rakyat dibelakangmu.

Jangan plin-plan hanya beretorika ini dan itu, bersikaplah sebagaimana seorang presiden. Seorang pemimpin besar bangsa Indonesia. Maju mundurya Indonesia kini berada ditangan anda. Mau dibuat kalang kabut, kacau balau, rebutan kuasa, atau kondisi tenang, rakyat nyaman, bekerja dengan aman demi mencapai kesejahteraan, itu ada padamu.

Pak Jokowi rakyat menunggu sikap dan tindakanmu, bukan sekedar pencitraan sebagaimana presiden sebelumnya. Jangan banyak janji dan alasan ini itu. Berbuat dan bertindaklah yang nyata demi rakyat sejahtera, aman, adil dan nyaman.

6. Negara Berbisnis Dengan Rakyat?

Ironi, hampir setiap kebijakan berkenaan dengan ekonomi, birokrasi dan administrasi pemerintahan, negara akan melakukan hitung-hitungan untung rugi. Tidak wajar jika negara berbuat demikian, sebab negara yang diwakili para pejabat dan wakil rakyat adalah ibarat orang tua terhadap anak-anaknya yaitu rakyat.

Kenaikan harga BBM, TDL, GAS, Kereta Api, semua dihitung kerugiannya. Tidak pernah negara mengatakan keuntungannya. Bukankah sudah seharusnya negara memberi pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap rakyat. Apakah itu subsidi, bantuan, hibah atau apapun namanya.

Selama ini keuntungan dari semua BUMN dibuat apa? Apa hanya untuk menggaji pegawainya dengan gaji tinggi, atau dibuat bancakan para pejabat dan wakil rakyat? Selama ini sudah menjadi ‘rumor’ kalau para pegawai BUMN mendapat gaji tinggi melebihi pegawai yang lain pada level yang sama.

Tidak seharusnya negara menerapkan sistem bisnis dengan hitungan untung rugi dengan rakyat. Saya yakin kalau negara ini dikelola dengan baik, profesional, jujur, adil dan amanah negara tidak akan rugi. Sebab negara ini kaya raya. Tapi sayangnya semua kekayaan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kekayaan satu orang kaya Indonesia, nilainya sama dengan kekayaan satu juta orang miskin Indonesia bahkan lebih.

7. Mengapa Harus Ada Gaji Ke-13?

Sub bab ini sedikit saya ulas tentang perilaku para pegawai. Kebanyakan mereka tidak mempunyai etos kerja dan tidak melayani rakyat. Mereka bekerja menjalankan tugas atasan berdasar perintah dan jadwal waktu. Dibuat kaku, saklek seakan itu yang paling penting, sehingga urusan rakyat dikesampingkan.

Pegawai negeri adalah warga negara nomor satu dinegara ini. Mereka tidak perlu bekerja keras membanting tulang, kerja lebih waktu atau kerja yang menyengsarakan. Pekerjaan mereka relatif ringan atau bahkan terkesan biasa-biasa saja.

Dari etos kerja dan cara kerja mereka yang hanya semacam itu. Tapi mereka mendapat fasilitas yang sangat memadai. SK mereka bisa dijamin untuk mencari pinjaman, tidak perlu ribet dan bertele-

tele. Mereka juga mendapat jatah beras, uang makan-minum, uang kunjungan kerja, uang lelah, dan beberapa bonus dan kemudahan yang lain.

Mereka seakan-akan para abdi negara yang betul-betul mengabdikan kepada negara dan rakyat dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Dengan begitu mereka harus diberi penghargaan oleh negara dengan pemberian gaji ke-13.

Sebagai rakyat biasa, sungguh terasa menyakitkan menyaksikan uang negara dihaburkan untuk memberi orang yang tidak pantas untuk diberi. Mereka tiap bulan dapat gaji, ‘*ceperan*’ kenikmatan, kemudahan dan macam-macam fasilitas negara yang lain. Yang itu tidak pernah dirasakan oleh rakyat biasa.

Negara tidak pernah membela rakyat dengan sesungguhnya. Banyak orang miskin membutuhkan biaya pengobatan, rumah, pekerjaan. Anak-anak cerdas miskin tidak ada biaya untuk membayar sekolah atau melanjutkan pendidikan. Negara tidak peduli, diam membisu dan tuli.

Tapi negara ambil berat perhatian terhadap para pegawai dengan memberi mereka gaji ke-13. adalagi tunjangan hari raya. Untuk apa negara memanjakan para pemakan uang negara? Sedang rakyat melarat dan sekarat tidak mendapat tempat. Sungguh dzolim wahai pemimpinku. Stop gaji ke-13. Kasih saja gaji ke-13 untuk orang-orang miskin yang membutuhkan biaya pengobatan atau operasi dirumah sakit.

8. Pemilih Jokowi Tertipu?

Kasihani Jokowi jadi bulan-bulanan dimedia sosmed, merasa tertekan dengan ulah sang majikan. Kalau dulu dipuja-puja dibela habis-habisan dan matimatian, kini jadi cemoohan. Mungkinkah anda menjadi tumbal moncong putih kepala bantheng pak Jokowi?

Lebih kasihan adalah rakyat pemilihmu yang dulu bersitegang dengan kubu lawan. Membelamu ibaratnya sampai titik darah penghabisan dengan segala argumen dan kekuatan. Mereka bukan anggota partai juga bukan tim sukses, tapi dengan ikhlas dan rela hati memilihmu.

Banyak mantan orang-orang golput bersedia turun gunung untuk sekedar memberikan suaranya kepadamu. Banyak seniman dan musisi rela membelamu demi menjadikanmu seorang presiden yang diharapkan mampu merubah Indonesia kearah perbaikan.

Dilapangan terendah bagi-bagi uang menjelang pencoblosan sudah menjadi hal yang jamak dan lumrah. Walau pada saat itu tim suksesmu kurang menyentuh keakar rumput, tidak ada yang bagi uang sebagaimana kubu lawan. Mereka rela memilihmu demi kemenanganmu. Kubu lawan membagi uang dua kali lipat dari yang dibagi timmu, tapi pemilih tetap memilihmu, demi menjadikanmu Presiden RI.

Begitu rela rakyat memilihmu. Bahkan sebagian politisi pusat rela berseberangan dengan instruksi bos partainya dan rela dipecat demi memilihmu dan menjadikanmu presiden. *Tumpek-blek*, rakyat mendukung dan memilihmu dan akhirnya kemenangan ada dipihakmu.

Setelah menang dan anda menjadi Presdient RI ke-7, dirimu mulai menunjukkan gejala tidak beres. Kamu tidaik membela rakyat lagi tapi tunduk pada bos partaimu. Mantan pemilih dan pendukung kubu lawan bersorak gembira, karena yang dulu dikatakan anda boneka mungkin nyata.

Kalau dulu dibeberapa media online setiap ada yang memojokkanmu, pembaca mati-matian membelamu, kini hampir tidak ada lagi yang melakukan itu. Kamu menjadi cemoohan, ajang kekecewaan dan penyesalan telah memilihmu. Kalau sudah begitu apakah rakyat yang memilihmu sudah tertipu?

Masih ada waktu untuk menunjukkan kemampuan dan kelasmu sebagai seorang pemimpin. Waktu masih panjang empat tahun lebih. Tunjukkan bahwa kamu layak dihormati sebagai seorang Presiden RI, seorang pemimpin beneran, bukan kw-kw an. Tapi jika itu tidak kamu laksanakan dan terus tunduk pada bos partaimu, sudah pasti rakyat telah tertipu olehmu.

9. Apa Yang Diberikan Negara Kepada Rakyat Biasa?

Di Indonesia ada ungkapan "*Orang Miskin Dilarang Sakit*". Ungkapan ini satu-satunya yang ada didunia. Sungguh miris dan pilu melihat nasib orang-orang miskin di negara ini. Hidup teramat sangat berat untuk dijalani. Hidup melarat, serba kekurangan, tinggal disebuah rumah yang sangat jauh dari standart layak. Ada yang tinggal di kandang hewan, kolong jembatan dan tempat-tempat tidak layak untuk ditinggali manusia. Susah hidup, susah mencari

makan, susah mencukupi kebutuhan, sering sakit-sakitan, tanpa ada perhatian sama sekali dari pihak pemerintahan apalagi sampai mendapat bantuan.

Kontras dengan para pegawai pemerintahan (PNS, TNI, POLRI, DPR), hidup dalam kenyamanan dan serba kecukupan. Setiap bulan dapat gaji. Bahkan gaji mereka sampai empat belas kali melebihi jumlah bulan yang ada dalam satu tahun yang hanya dua belas bulan. Hampir setiap tahun gaji mereka akan naik, walau etos kerja mereka sama sekali tidak ada kenaikan dan peningkatan.

Belum lagi berbagai fasilitas yang mereka dapatkan. Mendapat mobil dinas, sepeda motor dinas, rumah dinas yang semua tinggal pakai dan gratis. Ada lagi uang makan minum perhari, uang saku bila tugas luar, fasilitas penginapan di hotel, semua serba gratis. Bahkan masih mendapat uang saku yang nilainya cukup banyak.

SK mereka bisa untuk mengajukan pinjaman dengan tanpa survey. Mereka juga mendapat fasilitas perawatan kesehatan gratis, walau kononnya dipotong gaji, tapi tetap saja terasa gratis sebab tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar.

Setiap akhir tahun semua instansi/dinas akan mengadakan rapat ini-itu, yang intinya menghabiskan dana anggaran. Rapat itu berada dihotel, lebih kepada penghamburan uang, sebab hakekatnya tidak ada hal penting yang perlu dirapatkan. Selesai rapat, pulang masih mendapat uang saku sisa anggaran.

Apabila bepergian untuk urusan pribadi para pegawai juga mendapat potongan harga tiket yang lumayan besar. Bahkan ketika sudah tidak bekerja

mereka masih menikmati gaji dan berbagai fasilitas empuk yang lain yang bernama pensiun.

Sungguh lezat dan sedapnya menjadi pegawai negeri, kehidupan mereka sampai mati sudah ditanggung oleh negara yang itu merupakan uang rakyat bahkan

kenikmatan itu masih bisa diwariskan dan diteruskan oleh istri dan anak-anaknya.

Lantas apa yang diberikan negara kepada rakyat biasa? Rakyat jelata? **TIDAK ADA!** Rakyat dibiarkan menderita dan terlunta-lunta hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan yang berkepanjangan sampai ajal menjemputnya.

Sungguh biadap negeri ini, banyak orang hidup teramat sangat miskin, kelaparan sampai merenggut nyawa. Kampung primitif, kampung gila, kampung idiot, kampung keterbelakangan mental, dan berbagai jenis kampung penderitaan yang lain. Sementara segelintir orang yang menjadi orang pemerintahan termasuk pemimpin dan wakil rakyatnya hidup dalam gelimang harta dan kemewahan.

Orang kecil akan menjadi obyek pemerasan oleh aparat dan pejabat. Mau mengurus surat administrasi kepemerintahan dipersulit, diperas dan dipandang hina sebelah mata. Mau berobat tidak dilayani dengan sewajarnya sebab tidak punya jaminan apa-apa.

Sudah seharusnya **RAKYAT MENGGUGAT** dengan perlakuan ketidakadilan ini. Negara telah mengkhianati kepercayaan rakyat, mengkhianati pendiri negeri untuk memakmurkan seluruh penduduk negeri. Faktanya rakyat tidak mendapat apa-apa sama sekali. Rakyat diperas oleh negara, dipersulit

dan hanya dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan para individu oknum pemerintahan dan wakil rakyat.

Rakyat harus membayar dalam banyak hal dalam kebijakan negara. Pengaspalan jalan kampung rakyat harus membayar swadaya, penerangan jalan rakyat harus membayar ke PLN, berobat harus membayar, BPJS? Itu bentuk bisnis dari pemerintah dengan rakyat. Sudah tidak pernah mendapat gaji, tapi harus membayar premi. Sungguh dzalimnya negeri ini.

Negara tidak mampu memberi pelayanan kepada rakyat. Negara tidak mampu memberi rasa nyaman dan aman kepada rakyat. Calo dan begal meraja lela. Korupsi dan pemerasan semakin menjadi-jadi.

Jadi apa yang diberikan negara kepada rakyat? Sekali lagi TIDAK ADA. Yang ada hanya janji-janji manis saat kampanye. Sudah saatnya **RAKYAT MENGGUGAT!** Menuntut hak keadilan, persamaan dalam berbagai layanan, kesejahteraan dan kemakmuran.

10. Pra Peradilan Itu Apa?

Kasus kemenangan komjen Budi Gunawan dalam sidang pra peradilan melawan KPK menjadi satu fenomena hukum dinegeri ini. Sebagai orang yang awam tentang seluk-beluk hukum di Indonesia saya bertanya-tanya tentang apa itu pra peradilan.

Berawal dari pencalonan komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri yang notabene menurut catatan KPK Budi Gunawan mempunyai catatan rekening gendut alias terindikasi korupsi. Maka bersamaan dengan pencalonan Budi

Gunawan sebagai calon tunggal kapolri, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.

Merasa langkahnya diganjal KPK Budi Gunawan bersama institusinya dikepolisian unjuk kekuatan dengan menangkap Bambang Widjojanto (wakil ketua KPK) dan memborgolnya walau Bambang Widjojanto tidak melawan. Satu persatu orang-orang KPK dtersangkakan oleh polisi. Sungguh miris melihat perilaku para aparat dan petinggi negeri yang mengedepankan emosi dan kekanak-kanakkan.

Budi Gunawan ambisinya untuk menjadi kapolri belum pupus apalagi sudah mendapat restu dari DPR. Sudah menjadi hal biasa dinegeri ini seorang pejabat yang dijadikan tersangka masih merasa punya muka dan berambisi merebut kuasa. Rasa malu tidak ada dalam kamus mereka, yang ada bagaimana melanggengkan kuasa demi gengsi dan harta.

Berbagai cara ditempuh Budi Gunawan untuk memuluskan dan memulihkan namanya demi menjadi kapolri. Maka Budi Gunawan menempuh jalur hukum dengan mem'pra peradilan'kan KPK.

Kenapa ada pra peradilan? Kenapa tidak di adili sekalian? Dilakukan sidang, di bentangkan semua bukti dan alasan. Kalau memang bersih dan tidak bersalah, seorang tersangka bisa dibebaskan dari segala tuduhan. Kalau memang terbukti bersalah ya harus menjalani hukuman.

Sekali lagi tidak aneh dinegeri ini demi meraih kursi dan mempertahankannya segala cara akan ditempuh walau sudah menjadi tersangka. Langkah Budi Gunawan yang mempraperadilankan KPK dan memenangkannya, ditiru oleh Surya Darma Ali sang mantan menteri agama, mantan ketua umum PPP

yang kita semua tahu beliau seperti orang yang tidak bersalah sama sekali dengan mengatakan itu salah faham. Sebagai tersangka Surya Darma Ali masih leluasa dimuka umum dengan mengatas namakan partai Islam.

Pra peradilan itulah fenomena hukum baru bagi saya, dan rasanya seperti akan bergulir terus. Pra peradlan akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu malu, tidak percaya diri dan tidak percaya Tuhan. Semua demi gengsi, kekuasaan, kursi dan harta materi dunia belaka. Kalau memang gentle dan tidak bersalah tempuhlah prosedur hukum yang lazim. Kalau benar akan bebas, kalau salah dihukum, jika didzolimi, Tuhan yang akan membela.

11. Kelangkaan STNKB? (Plat Nomor)

Di Jawa Timur sudah lebih satu tahun ini, terjadi kelangkaan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atau plat nomor. Informasi yang didapat dari samsat bahwa kelangkaan itu disebabkan 'kehabisan bahan'. Entah apa maksudnya degan kehabisan bahan tersebut. Bahan apa yang habis, bagaimana antisipasinya sehigga sampai kehabisan bahan.

Sangat ironi kalau itu yang dijadikan alasan. Di kaki lima masih banyak bertebaran penjual jasa pembuatan plat nomor, dan sepertinya mereka tidak pernah kehabisan bahan sama sekali. Setiap hari ada orang order plat nomor pasti dilayani degan baik.

Bagaimana sebuah negara tidak bisa mengantisipasi hal ini, kehabisan bahan STNKB sudah berlangsung lebih dari setahun. Begitu susahkah mendapatkan bahan plat nomor ini? Apa

tidak ada yang memproduksi bahan tersebut? Kalau tidak ada, kenapa tidak megimpor?

Kasus seperti ini sudah banyak terjadi dinegeri ini. Dulu kelangkaan buku BPKB, kehabisan buku Nikah, Paspor, Pupuk dan yang sering berulang adalah kelangkaan BBM. Bagi saya kejadian seperti ini susah diterima oleh cara berfikir saya. Negara adalah penguasa yang punya segalanya. Seharusnya penyelenggara negara yang berkompeten mengantisipasi bagaimana caranya agar tidak sampai kehabisan. Toh uang, fasilitas untuk mengurus itu ada dan tinggal menganggarkan dan menggunakan.

Setiap terjadi kelangkaan atau 'kesalahan' yang dilakukan oleh pemerintah rakyat yang selalu dirugikan. Rugi waktu, tenaga dan sudah pasti rugi keuangan. Tapi jika yang mengalami 'kesalahan' rakyat, rakyat pasti akan mendapat kesusahan. Didenda, ditilang atau entah apa bentuk hukuman dar kesalahan yang walau kadang tidak disengaja.

Begitulah kedzoliman negeri ini berjalan berterusan seakan tidak ada yang menegur dan mengingatkan. Negara berbuat semena-mena terhadap rakyat, tapi tidak pernah berfikir bahwa negara juga sering menyengsarakan rakyat. Kelangkaan apapun bentuknya, sudah pasti disebabkan pengelola negara yang bersangkutan tidak profesional, tidak cerdas, tidak amanah bahkan mungkin tidak ikhlas bekerja untuk rakyat. Padahal para pegawai negara tersebut makan dan digaji dari uang rakyat. Kalau sudah begitu sebaiknya pecat dan ganti saja mereka yang bersangkutan yang sering menyengsarakan rakyat.

12. Untuk Menteri Anis Baswedan, Unas Sistem Online?

Ya Allah, Ya Tuhanku, ide apalagi ini, untuk apa, biar apa, apa maksudnya? Kenapa online, apa beda substansinya dengan konvensional? Sebagai orang yang menyarankan dihapuskan sistem unas, sudah barang tentu saya sama sekali tidak mendukung program ini. Apapun alasan dan bagaimanapun bentuknya

Unas sistem online, tetap tidak merubah paradigma berfikir para pelajar dan sekolah, intinya tetap mejunjung tinggi pencarian nilai berupa angka-angka. Tidak merubah attitude siswa untuk menjadi yang terbaik berdasar kejujuran, integritas, moralitas dan skill pribadi.

Unas sistem online akan menambah beban sekolah, sebab harus menyediakan perangkat komputer dan jaringan internet. Akan smakin ribet dan merepotkan. Kualifikasi/spek komputer harus sesuai standart, bagaimana pengoperasiannya, maintainannya. Jumlah komputernya, listriknya dan bla bla bla yang lain. Sunggguh bukan satu kemajuan, justru menambah masalah dan beban.

Anis Baswedan adalah menteri pendidikan sekarang, beliauah yang bertanggung jawab dengan program ini. Anis Baswedan namanya harum ketilka menggalakkan program Indonesia mengajar. Dari situ Anis Baswedan dicatat sebagai warga negara yang punya kontribusi pada negara

Mungkin berdasar itu nama Anis Baswedan mulai diperhitungkan dikancah perpolitikan dan kepemimpinan di Indonesia. Anis Baswedan merasa punya kemampuan dalam merubah negara ke arah

kemajuan, beliau ikut konvensi capres partai Demokrat. Tidak lolos atau kalah dalam konvensi.

Anas Baswedan bergabung dalam tim sukses JokowiJK, takdirnya JokowiJK memenangkan piplres. Dewi fortuna mengiringi kesuksesan Anis Baswedan. Bisa ditebak Anis Baswedan dijadikan menteri Pendidikan.

Tapi entah apa program dan bagaimana visimisinya sebagai menteri pendidikan. Pada awal menjadi menteri Anis Baswedan menghentikan kurikulum 2013 yang sudah dijalankan sebagian. Ini merupakan ide yang telah dirancang dan menjadi program menteri pendidikan Mohamad Nuh, yang dirasa menurut Anis Baswedan belum pas untuk diterapkan. Pro-kontra pun terjadi. Ini yang menjadi gebrakan awal menteri Anis Baswedan, selebihnya belum terdengar.

Justru sekarang muncul wacana pelaksanaan unas dengan sistem online. Innalillahi wainna ilaihi roji'un, dunia pendidikan bukan bertambah maju dari segi kualitas pendidikan siswa, justru berjalan ditempat. Mungkin dianggap maju dengan adanya sisten online, tapi itu tidak ada bedanya dengan yang sudah ada kecuali caranya.

Pak Menteri Anis Baswedan, tolong hentikan program unas online, benahi dan rubah sistem pendidikan Indonesia yang mengarah kepada kwaliatas siswa menuju kearah perbaikan moralitas, kecerdasan yang jujur, berintegritas tinggi dan menambah ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Alloh Subhanahu Wata'ala. Terima kasih.



Babak ke-Tiga

Tentang Ke-Jokowi-an

1. Menilai Kelas Kepemimpinan Jokowi

Secara pribadi saya tidak mengenal sosok Jokowi (Joko Widodo) secara langsung. Saya mulai mengetahui nama Jokowi ketika heboh mobil nasional ESEMKA yang dirakit oleh siswa-siswa SMK di Surakarta. Pada saat itu kemunculan mobil ESEMKA membawa pro kontra. Jokowi sebagai wali kota Solo tampil membela dan mempromosikan mobil ESEMKA sebagai embrio mobil nasional.

Dari situ saya baru mengetahui kiprah Jokowi dalam kancah kepemimpinan nasional, khususnya skup lokal wali kota Solo. Seakan-akan betul-betul mau “*membumikan*” mobil ESEMKA menjadi mobil nasional. Tidak ketinggalan sang gubernur Jawa Tengah yang saat itu dijabat Bibit Waluyo megkritik tajam tentang mobil ESEMKA.

Begitulah nama Jokowi melambung di skala nasional. Nama Jokowi melambung sebagai pemimpin yang memperjuangkan kerakyatan. Apalagi konon katanya selagi menjabat sebagai wali kota Solo, Jokowi sukses memindahkan pedagang kaki lima dengan aman, tertib dan terkendali. Selama ini pemindahan pedagang kaki lima bisa dipastikan mendapat perlawanan hebat dari para pedagang. Tapi Jokowi sukses memindahkan pedagang kaki lima dengan tenang dan tanpa gejolak.

Pilgub DKI Jakarta 2012 PDIP menyodorkan nama Jokowi sebagai cagub penantang cagub incumbent pak Fauzi Bowo atau pak Foke. Sebagai

pendatang dari daerah sekelas wali kota ada yang menyindir (Amin Rais) Jokowi tidak pantas atau belum layak untuk menjadi Gubernur apalagi di DKI.

Nama Jokowi yang saat itu sedang naik daun dengan mobnas ESEMKA-nya mendapat tempat dihati pemilih Ibu kota. Fauzi Bowo yang merupakan representasi dari SBY bergaya orde baru, serasa sudah menjemukan bagi rakyat Jakarta. Walau Fauzi Bowo dalam hitungan kertas berdasar peta kekuatan partai poliitk dukungan Fauzi Bowo bisa memenangkan pilgub ini.

Faktanya Fauzi Bowo kalah oleh Jokowi. Jokowi berpasangan dengan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok memenangkan pertarungan pilgub DKI Jakarta.

Awal menjabat sebagai Gubernur DKI Jokowi berperilaku dan berpenampilan tidak seperti kebanyakan gubernur dan pemimpin DKI selama ini. Gaya Jokowi yang suka blusukan ke kampung-kampung, pasar dan tempat-tempat kumuh yang lain. Semakin memikat rakyat dengan Jokowi.

Pada saat itu Jokowi bak dewa atau malaikat yang tanpa cela. Setiap ada yang mencela atau meremehkan Jokowi didunia maya, secara spontan pembela Jokowi akan membela matia-matian. Jokowi berhasil merebut simpati warga DKI dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Pemunculan Jokowi dimedia televisi, setiap hari, seperti satu iklan gratis yang semakin mendongkrak nama Jokowi sebagai pemimpin terbaik dinegeri ini. Jokowi mendapat sebutan sebagai *media darling*. Entah apa maksud dan persepsi tentang itu. Yang pasti Jokowi menjadi trend baru para pencari

berita. Dimana ada Jokowi disitu akan berjubel wartawan dan masyarakat yang ingin melihat, bertemu, bersalaman dan mengajak foto.

Jokowi benar-benar melambung bak selebritis menjadi milik rakyat dan diidolakan rakyat. Berkat media dengan segala bentuk pemberitaannya menjadi promosi yang tanpa disadarinya dalam membackup beritanya.

Jokowi menjabat Gubernur DKI masih memasuki tahun yang kedua. Pemilu, pileg dan pilpres 2014 akan dilaksanakan. Nama Jokowi sudah merasuki dan menghipnotis jutaan rakyat Indonesia disaentero pelosok negeri bahkan rakyat yang diluar negeri. Mereka menginginkan Jokowi menjadi presiden RI.

Megawati sebagai bos Jokowi dalam parpol PDIP yang mengusungnya menjadi Gubernur DKI. Pada awalnya Megawati berkeinginan maju sebagai capres 2014. Atas desakan dan masukan dari beberapa orang dekatnya. Megawati tahu diri, tidak akan ada yang memilihnya. Nama Jokowi sudah melambung dan menjadi taruhan yang akan jadi.

Sebagai bos partai PDIP Megawati segera mengambil langkah, setelah membaca arah dan mendengarkan suara rakyat yang menghendaki Jokowi menjadi Presiden RI. Jokowi digadang-gadang dibawa kemakam Bung Karno di Blitar disaat Jokowi tengah kerja jadi Gubernur. Hal ini menjadi isyarat bahwa Megawati akan menjadikan Jokowi sebagai capres 2014.

Bisa ditebak dan seakan dipastikan Jokowi dicapreskan, walau jabatan Gubernur masih baru separo jalan. Dengan segala resiko dan hujatan

Megawati bergeming tetap mengusung Jokowi sebagai capres PDIP. Walau pada saat itu rival Jokowi Prabowo mengecam habis-habisan kepada Megawati yang mengingkari janji batu tulis. Yang konon diantara isi perjanjian batu tulis Megawati akan mencapreskan Prabowo pada 2014.

Entah mungkin karena sudah silau dengan suara-suara rakyat yang menghendaki Jokowi menjadi capres. Jokowi mulus maju menjadi capres. Proses kampanye pilpres 2014 penuh degan intrik, menguras, energi, emosi dan hampir memecah belah persatuan sesama saudara dan sebangsa gara-gara beda pilihan. Begitu hebat dan dahsyatnya pilpres 2014.

Pada hari 'H' pasca pencoblosan Jokowi menang berdasar hasil quickcount dari beberapa lembaga survey. Kubu Prabowo tidak terima dengan kemenangan Jokowi, dia menggugat KPU untuk menganulir kemenangan Jokowi. Persidangan gugatan di MK berlangsung, Jokowi tetap menang dan menjadi Presiden RI ke-7.

Gegap gempita,. Riu-h-rendah menyambut kemenangan Jokowi dimana-mana. Berbagai pesta dilaksanakan di beberapa daerah. Kemenangan rakyat kecil dan terpinggirkan, begitulah kira-kira temanya. Pesta kemenangan berangsur selesai dan mereda. Kehidupan kembali berjalan seperti sedia kala. Belum ada tanda-tanda perubahan kearah perbaikan. Semua masih seperti dulu, sejak jaman orde reformasi.

Kabar buruk menyeruak kepermukaan. Bagai disambar petir di siang bolong ditengah terik matahari. Ketika Jokowi memberi kado 'kenaikan harga BBM dari Rp 6500, menjadi Rp 8500. Rasa kecewa mulai

merasuki relung hati rakyat kecil. Kenaikan harga BBM berimbas kepada kenaikan harga-harga semua yang ada, baik barang dan jasa.

Menjelang kenaikan harga BBM rakyat dibuat bingung dan resah, sebab BBM mulai langka diperedaran. Rakyat dibuat susah. Setelah berjalan beberapa minggu harga BBM diturunkan ke Rp 6600. sebuah harga yang *'mekekok'* tanggung dan tidak profesional. Kenapa tidak 6500 atau 7000 sekalian? sebab harga segitu dipengecer jadi 7500. Dan kini harga BBM jenis premium naik lagi dari Rp 6700 menjadi Rp 6900.- dan terbaru menjadi Rp 7400.-

Dari beberapa pemaparan ringkas diatas, dapat disimpulkan tentang kelas kepemimpinan Jokowi. Bagaimana sewaktu menjadi wali kota, gubernur dan presiden. Saya tidak mengalami langsung sebagai rakyat Jokowi sebagai walikota, hanya dari beberapa berita media yang bisa saya tangkap tentang kepemimpinan Jokowi.

Jokowi sukses menjadi walikota solo. Dengan berbagai prestasinya, terlebih semangatnya menasionalisasikan mobil ESEMKA menjadi mobnas.

Jokowi menjadi Gubernur? Baru dua tahunan berjalan. Problem mendasar Jakarta belum terselesaikan, banjir dan macet. Relokasi kerumah susun juga masih ada konflik dan polemik, walau itu niatnya bagus, tapi banyak rakyat yang kurang setuju, ini bisa jadi karena rakyatnya yang mau menang sendiri dan susah diatur.

Bis Trans Jakarta bermasalah, kepala dinas perhubungan dibui sebab korupsi di era Jokowi. Jokowi baru sukses dengan blusukannya, pemberian kartu sakti, dan gaya yang merakyat, untuk yang lain

belum sepenuhnya bisa dirasakan, tetapi setidaknya sudah mulai terlihat ada perubahan kearah perbaikan, sayang tidak diteruskan, berhenti ditengah jalan.

Jokowi menjadi Presiden RI? Ini anugrah kepada Jokowi. Dari banyak segi serasa tidak mungkin seorang Jokowi bisa menjadi Presden RI. Tapi takdir sudah menghendaki Jokowi menjadi Presiden RI. Dan kini sudah berjalan memasuki 100 hari yang kedua.

Seratus hari pertama awal pemerintahan Jokowi penuh dengan gejolak. Gejolak dari dalam partai sendiri, gejolak digedung DPR yang rebutan kursi, gejolak kenaikan harga BBM, gejolak pengangkatan Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri, gejolak penangkapan Bambang Widjojanto, gejolak perseteruan KPK vs POLRI.

Dari semua gejolak itu Jokowi berkilah, *“ini kan baru 100 hari”*, masih jauh dari perjalanan jabatan. Jokowi boleh berkilah, tapi rakyat sudah membaca indikasi bahwa Jokowi tidak bisa lepas dari bayangan Megawati sang bos partai PDIP yang mengusungnya.

Dengan begitu kita bisa menilai seperti apa kelas kepemimpinan Jokowi, apa hanya sekelas walikota, apa sampai ke tingkat gubernur, atau justru layak menjadi Presiden RI. Untuk yang terakhir kita akan menunggu paling lama lima tahun lagi. Tapi indikasi itu ‘mungkin’ sudah bisa dibaca seperti apa kelas yang pas untuk kepemimpinan Jokowi.

2. Pemilih Jokowi Tertipu?

Lihat babak ke-dua point 8, halaman ...46

3. Jokowi Jangan Kecewakan Dan Jangan Khianati Kami

Sebagai pemilih Jokowi-JK dalam pilpres 2014, saya berharap dengan sepenuhnya Jokowi mampu merubah kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara di bumi tercinta Indonesia. Kehidupan rakyat Indonesia yang selama ini dalam ketidak pastian dalam keamanan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Semua itu membuat rakyat sangat berharap pada pemerintahan yang baru ini.

Kebanyakan pemilih JokowiJK adalah orang-orang yang lebih mengutamakan akal nurani daripada akal emosi. Bukan dari partisan partai termasuk partai PDIP yang telah memberi kendaraan kepada Jokowi untuk maju menjadi capres. Mereka (para pemilih ini) tidak punya kepentingan apa-apa, tidak punya ambisi meraih materi apalagi kursi.

Point itu yang harus pak Jokowi pahami. Kebanyakan kami-kami bukan orang partai, karena itu presiden Jokowi jangan tersandera oleh orang-orang partai dan petinggi-petingginya. Partai seharusnya bersyukur kandidat yang dicalonkannya berhasil memenangkan pertarungan pilpres ini dan harusnya berhenti untuk tidak mencampuri kinerja presiden Jokowi. Sebab awal terbentuknya koalisi, Jokowi mengatakan tidak ada koalisi bersarat dan bagi-bagi kursi. Ini juga yang menjadi pertimbangan kami memilih pasangan Jokowi-JK.

Kenyataannya baru beberapa hari dilantik menjadi presiden, Jokowi sudah mengecewakan kami dengan menaikkan harga BBM. Semua orang pasti tau kenaikan BBM berdampak pada kenaikan semua barang-barang dan jasa. Rakyat dibuat menderita

karena ini, rakyat sulit mendapat BBM. Walau dikemudian hari harga BBM diturunkan lagi, tapi barang yang sudah terlanjur naik, sulit untuk diturunkan. Rakyatlah yang selalu jadi korban.

Diawal pemerintahannya Jokowi juga terindikasi mengkhianati kami, dengan memilih beberapa orang menteri dari partai pendukung yang kredibilitas, kemampuan dan integritasnya tidak memadai. Padahal diawal terbentuknya koalisi tidak akan bagi-bagi kursi.

Kabinet ramping itu juga yang sering digembargemborkan Jokowi, lagi-lagi kenyataan yang terjadi '*kabinet gemuk*' yang terjadi, kami-kami sudah dikecewakan lagi. Kabinet kerja, itu nama kabinet JokowiJK. Entah dalam seratus hari ini apa yang sudah dilakukan para menteri JokowiJK.

Hanya beberapa gelintir menteri yang nampak kerja, entah itu sekedar gebrakan atau pencitraan, tapi kami hargai itu yang penting anda (menteri) mempunyai niat dan iktikad yang baik untuk merubah dan memajukan anak negeri. Sedang menteri yang lain entah tidak terekspose atau memang tidak ada kerja yang berarti alias sekedar menjalankan rutinitas yang sudah membudaya selama puluhan tahun.

Kini pak Jokowi kembali membuat kami-kami galau dan kecewa dengan rencana pengangkatan komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Padahal jauh-jauh hari komjen Budi Gunawan sudah dikasih catatan merah oleh KPK sebagai 'koruptor' tepatnya ketika penjaringan calon menteri 'konon' katanya komjen Budi Gunawan tidak masuk nominasi karena terindikasi korupsi dengan mempunyai 'rekkening gendut'.

Sudah tahu begitu, banyak rakyat juga mengetahui kasus komjen Budi Gunawan, kenapa pak Jokowi masih 'ngeyel' dengan mencalonkan komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri bahkan calon tunggal? Apakah pak Jokowi sudah tuli dan buta matahati degan tidak mau mendengar suara rakyat padahal rakyatlah yang memilih Jokowi bukan partai atau bu Megawati. Ingat itu pak Jokowi.

Akibat dari kasus itu, anda (pak Jokowi) kini menjadi 'bulan-bulanan' masyarakat. Mereka kecewa, galau dan risau dengan terjadinya kegaduhan KPK-POLRI yang sampai kini semakin berlarutan dan berterusan. Rakyat dibuat tidak nyaman dengan kasus KPK-Polri yang terus bergulir ini. Apakah pak Jokowi tidak risau dengan kondisi yang seperti ini?

Sejauh ini kami masih bisa memahami dan menolerir kebijakan pak Jokowi tapi dengan catatan jangan diulang berbuat yang mengecewakan rakyat kebanyakan. Kami memilih pak Jokowi dengan ikhlas dengan melihat trak rekod anda yang kami nilai relatif lebih bersih dan lebih santun dan merakyat. Karena itu jangan kecewakan kami apalagi mengkhianati kepercayaan kami. Bekerjalah untuk rakyat dan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan demi partai apalagi demi pak Surya Paloh dan bu Megawati.

4. Jokowi Jangan Umbar Janji Dan Banyak Alasan

Mulutmu harimaumu, Janji itu hutang. Dua kalimat yang mempunyai makna yang hampir sama. Mulutmu harimaumu mengandung makna, apa yang kamu ucapkan akan memakan dirimu. Janji itu hutang, apa yang telah kau ucapkan sebagai janji

atau memberi harapan wajib kamu tunaikan, sebab itu sama dengan hutang.

Kampanye pilpres yang diucapkan Jokowi banyak memberi harapan kepada rakyat Indonesia. Pengembangan ekonomi kreatif, pembangunan waduk, pembuatan tol laut, revolusi mental, tidak bagi-bagi kursi, bukan koalisi bersarat, kabinet ramping dan lain-lain.

Dari semua yang dijanjikan rasanya banyak yang diingkari, atau belum dilaksanakan. Entah bagaimana waktu mengucapkan itu dalam kondisi sadar apa tidak. Kelihatannya begitu enteng diucapkan, seakan tiada beban dan akan mudah dilaksanakan. Lidah memang tidak bertulang, bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika lidah bertulang.

Bagi yang merasa dijanjikan tentu akan berbunga-bunga penuh harapan. Bayangan dari ucapan itu akan menjadi kenyataan, akan bisa mewujudkan impian. Sebetulnya apa yang dijanjikan pak Jokowi selama kampanye pilpres tempo hari kurang menyentuh persoalan rakyat. Tapi lebih kepada harapan semu yang itu hanya retorika kampanye pada umumnya.

Ada yang mengatakan; *‘apa yang diucapkan waktu kampanye dengan apa yang dikerjakan setelah menjadi pemimpin adalah suatu hal yang berbeda’*. Maksudnya mungkin kampanye hanyalah sekedar rayuan, sedang praktik nyata adalah untuk mewujudkan keinginan dalam kesempatan.

Waktu presiden Jokowi menjabat kekuasaan masih cukup panjang lebih-kurang 4 tahun. Karena itu jangan lagi membuat janji-janji kepada rakyat. Apa yang dijanjikan kepada rakyat akan disimpan dalam

memori dan ingatan, suatu saat akan ditagih, setidaknya rakyat akan selalu mengingat janji-janji itu.

5. Jokowi Jangan Melakukan Blunder

Pasca 100 hari yang bergejolak, sinyal-sinyal gejolak rasa-rasanya masih akan terus berlanjut. Indikasi itu muncul saat pak Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia. Disana pak Jokowi menanda-tangani nota kesepakatan pembuatan mobil nasinoal bekerja sama dengan perusahaan mobil Proton Malaysia.

Keputusan itu bisa menjadi jalan menuju blunder. Banyak orang tidak menyangka kalau hal itu bisa terjadi, termasuk saya. Saya pernah hidup di Malaysia, saya merasakan denyut kehidupan Malaysia. Sistem yang sudah berjalan relatif lebih bagus dibanding negara kita. Itu yang harusnya kita pelajari dan contohi, bukan *menasionalisasi* mobil Proton.

Rakyat kembali mengelus dada dengan keputusan itu, Jokowi kembali melukai perasaan rakyat. Rakyat seakan diremehkan, bagaimana pak Jokowi tega melakukan itu? Bukankah dulu waktu masih menjadi walikota Solo pak Jokowi membanggakan mobil ESEMKA? Dan dengan ESEMKA itu turut mendongkrak popularitas pak Jokowi. Kenapa pak Jokowi melakukan pembunuhan harapan ESEMKA?

Pengangkatan menteri yang tidak profesional tapi lebih karena balas budi alias menteri titipan, pada awalnya digembar-gemborkan kabinet ramping, tapi kenyataannya kabinet gemuk, bagi-bagi kursi kekuasaan/ jabatan kepada kroni pendukung dan tim

sukses, kenaikan harga BBM, kasus Budi Gunawan, KPK versus Polri. Itu sudah cukup untuk menjadi evaluasi dan pelajaran bagaimana kinerja pak Jokowi yang sedikit banyak sudah melukai hati rakyat.

Kalau tidak hati-hati dan waspada, hanya menuruti bisikan kroni dan tunduk pada bos partai, tapi tidak menghiraukan suara dan jeritan rakyat. Tinggal tunggu waktu umur anda pada posisi yang membanggakan ini akan meninggalkanmu pak Jokowi. Lebih dari itu nama pak Jokowi akan terkubur dikenang, bukan karena blusukan untuk mengetahui problem rakyat, tapi blusukan untuk melakukan blunder alias bunuh diri. Sungguh keji dan sangat tidak terpuji.

6. Pemerintahan Jokowi Dalam Bayang-Bayang Balas Dendam

Tidak dipungkiri naiknya Jokowi menjadi presiden RI ke-7 tidak lepas dari peran Megawati Soekarnoputri sang ketua umum PDIP. Sehingga banyak yang mengatakan Jokowi adalah boneka Megawati. Bahkan Megawati dan Puan Maharani anak Mega menganggap Jokowi sebagai *petugas partai* yang ditugaskan menjadi presiden RI.

Fakta Jokowi sebagai boneka semakin nyata ketika Jokowi menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Setidaknya bayang-bayang Megawati aromanya cukup kuat terasa. Selama ini, banyak orang menyimpulkan Megawati tipe orang yang memendam rasa dendam terhadap orang yang pernah berseberangan.

Contoh dendam atau entah apa namanya, Megawati tunjukkan kepada Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY) mantan presiden dua periode sebelum Jokowi. Hampir setiap acara kenegaraan yang diselenggarakan oleh SBY, Megawati tidak pernah mau hadir. Bahkan sampai kini Megawati sepertinya masih memendam rasa dendam kepada SBY, sebab rencana dipertemukan SBY-Mega, Mega tidak mau merespon.

Kini Megawati seakan mendapat durian runtuh dengan terpilihnya Jokowi menjadi presiden RI menggantikan SBY. Kesempatan untuk melampiaskan dendam itu berhembus kuat, ketika Jokowi memberhentikan Jendral Sutarnan sebagai Kapolri sebelum masa pensiun, tepatnya 9 bulan sebelum pensiun.

Aroma balas dendam terus berlanjut ketika, pencalonan Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri dihentikan dengan dijadikan tersangka karena Budi Gunawan mempunyai rekening gendut, alias terindikasi melakukan 'korupsi'.

Setelah Budi Guawan dijadikan tersangka, orang-orang PDIP meradang. Banyak orang mengartikan PDIP melakukan balas dendam kepada KPK dengan menangkap Bambang Widjojanto sebagai wakil ketua KPK dengan memborgolnya dan membawa BW ke bareskrim polri.

Tidak berhenti sampai disitu atau cuma Bambang Widjojanto yang dtersangkakan. Kini PDIP membidik ketua KPK Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja sebagai wakil ketua KPK untuk dijadikan tersangka.

Dengan berbagai dalih dan alasan, PDIP Megawati melalui orang-orang kepercayaannya berusaha menjerat para pimpinan KPK dengan

berbagai macam cara, walau itu terkesan mengada-ada dan dipaksakan.

Begitu juga aroma balas dendam juga ditunjukkan oleh partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat voting untuk menentukan pilkada langsung atau tidak langsung di sidang umum DPR, Demokrat menunjukkan bahwa antara Mega-SBY (PDIP-Demokrat) ada hubungan yang tidak harmonis.

Suara Demokrat yang diharapkan menjadi penentu kemenangan pilkada langsung, tiba-tiba Demokrat berbalik arah mendukung pilkada tidak langsung. Kejadian ini membuat gejolak dimasyarakat sebab 'demokrasi' kembali dikebiri oleh anggota DPR. Dalam komentarnya salah seorang anggota fraksi Demokrat mengatakan; selama ini PDIP sering berseberangan dengan Demokrat, bahkan PDIP sering walkout ketika Demokrat punya rencana keputusan.

Nah ketika PDIP mengharap suara Demokrat, Demokrat tidak mau mendukung PDIP, walau ini sepertinya bertentangan dengan bos Demokrat pak SBY, sehigga SBY mendapat gelar *bapak pilkada tidak langsung*.

Imbas dan aroma balas dendam juga menghinggapi Ahok Gubernur DKI Jakarta versus DPRD DKI. Haji Lulung PPP dan Taufik Gerindra, sejak dulu terkesan berseberangan dengan Ahok sang Gubernur DKI. Moment pembahasan APBD 2015 menjadi ajang unjuk kekuatan dan adu argument. Hingga memunculkan hak angket dari DPRD untuk Ahok.

Tidak menutup kemungkinan, aroma balas dendam akan menjalar keberbagai daerah di seluruh Indonesia.

Kalau sudah demikian, bagaimana pemerintahan Jokowi akan berjalan dengan baik dan sesuai keinginan rakyat, kalau Jokowi dibayangkan aroma balas dendam yang ditiupkan Megawati sang bos PDIP untuk menentukan kebijakan dalam membuat keputusan kenegaraan.

Maka kita tinggal menunggu kehancuran negeri ini. Sebab pemerintah tidak berpihak pada rakyat, tapi lebih menuruti kehendak sang bos partai. Sebab presiden hanya sebagai petugas partai.

7. Revolusi Mental Ala Pak Jokowi versus Revolusi Mental Program Saya

Diantara kampanye Jokowi dalam pilpres kemarin adalah tentang ‘revolusi mental’. Kedengarannya merdu dan menyentuh setiap nurani yang mendambakan perubahan terhadap mental para penyelenggara negara. Mental bobrok, penuh borok, dan jorok sudah mendarah daging, mengalir disetiap aliran darah dan dengusan nafas hampir disetiap petinggi dan pejabat negara. ‘revolusi mental’ itu cara memberantasnya.

Sampai hari keseratus pelantikan Jokowi menjadi presiden, dengung revolusi mental sudah hilang tertelan kepentingan. Sayup-sayup dan semakin jelas yang terdegar adalah suara-suara sumbang orang-orang disekitar Jokowi. Suara-suara yang keluar dari mental bobrok. Mental borok berusaha menguasai, mendikte, mempengaruhi dan menjegal langkah Jokowi.

Revolusi mental ala Jokowi semakin tidak jelas, wujud dan bentuknya. Sudah hilang ‘warna, bau dan rasanya’ .Suaranyapun sudah hilang dari peredaran. Itu bermakna revolusi mental sudah mati atau sama sekali tidak pernah dilahirkan hanya sebatas diwacanakan, alias pemanis bibir.

Mengecewakan sekali kinerja Jokowi memasuki 100 hari yang kedua. Bukan memberi pencerahan justru membingungkan. Saat bab ini ditulis, hari ini Senin 16 February 2015 kemenangan Budi Gunawan (calon tunggal kapolri) atas KPK. Matinya rasa malu direlung petinggi negeri. Kursi kekuasaan dan materi, menjadi hal yang diperjuangkan, bukan rasa keadilan dan tingginya martabat manusia bangsa Indonesia.

Saya menganggap program revolusi mental ala Jokowi sampai hari ini tidak jelas konsepnya dan kemana *‘jlntrungnya’*. Justru yang nampak pembiaran dan pelanggaran mental-mental bobrok bergentayangan diranah kuasa negara Indonesia.

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, saya teramat sangat prihatin degan kondisi bangsa Indonesia. Semakin hari bukan semakin menuju kearah kebaikan, justru semakin terpuruk moral dan kelakuannya. Karena itu, saya membuat program *‘cuci otak’*, *‘revolusi mental’*, berupa “Training Kepribadian dan Kepemimpinan”.

Training ini diperuntukkan untuk anak-anak sekolah mulai SD-SMA, khususnya yang beragama Islam. Setiap tingkatan sekolah mempunyai nama sendiri beserta visinya:

- KEM Anak Sholeh Untuk SD/MI. Dengan Visinya; Penanaman Taqwa dan Akhlak Mulia.
- KEM Cinta Ilahi Untuk SMP/MTs, Dengan Visinya; Pembentukan Karakter Pribadi Mulia
- KEM Insan Mandiri Untuk SMA/MA/SMK) Dengan Visinya; Pengembangan Prestasi 'Tuk Meraih Prestasi.

Output yang diharapkan dari peserta training, setelah lulus sekolah akan menjadi manusia paripurna yang siap tampil dimasyarakat untuk membangun negara dengan ilmu, ketrampilan dan akhlakul karimah. Insya Alloh tidak ada korupsi, bahkan tidak ada mental yang mau menang sendiri dan bersikap semena-mena terhadap rakyat.

Modul, fasilitator, juklak, juknis dan segala perlengkapan sudah saya siapkan baik dalam bentuk hardware maupun softwrenya. Tinggal eksekusi untuk seluruh negara Indoensia. Program ini sudah dilaksanakan di beberapa sekolah. Saya menawarkan kepada pemerintah untuk membantu program saya; revolusi mental, cuci otak, dan training ini. Sebab sudah siap 100%.

8. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu Pak Sby, Kabinet Kerja Pak Jokowi, Dan Susunan Kabinet Ala Saya

Gembar-gembor, koar-koar Jokowi tentang kabinet ramping ternyata sama sekali tidak terbukti. Koalisi tanpa sarat pada awalnya tersembunyi rapi,

fakta akhirnya kabinet tetap gemuk, koalisi bagi-bagi kursi itu yang terjadi. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi dengan kabinet kerja pak Jokowi.

Berikut sekedar perbandingan susunan kabinet kerja Jokowi, Kabinet Indonesia bersatu SBY dan Kabinet versi Seandainya Saya Presiden RI:

9. Daftar 34 Nama Menteri Kabinet Kerja Jokowi JK 2014-2019:

1. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral:
Sudirman Said
2. Menteri Pariwisata: Arief Yahya
3. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
4. Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan
5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman:
Indroyono Soesilo
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/
Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago
7. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi
9. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara
10. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly
11. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu
12. Menteri Luar Negeri:
Retno Lestari Priansari Marsudi
13. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo
14. Menteri Koordinator Bidang Polhukam:
Tedjo Edy Purdijatno
15. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:
Sofjan Djalil
16. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro

17. Menteri BUMN: Rini M Soemarno
18. Menteri Koperasi dan UMKM:
Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga
19. Menteri Perindustrian: M Saleh Husin
20. Menteri Perdagangan: Rachmat Gobel
21. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
22. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri
23. Menteri PU dan Perumahan Rakyat:
Basuki Hadi Muljono
24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
Siti Nurbaya Bakar
25. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN:
Ferry Mursyidan Baldan
26. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan: Puan Maharani
27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saefuddin
28. Menteri Kesehatan: Nila F Moeloek
29. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak: Yohana Yambise
31. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan
Menengah: Anies Baswedan
32. Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi: M Nasir
33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi
34. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja'far

10. Berikut 34 Nama Menteri Kabinet Indonesia Bersatu SBY 2009-2014

Menteri Koordinator

1. Menko Polhukam: Marsekal (purn) Djoko
Suyanto

2. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa
3. Menko Kesra: Agung Laksono
4. Sekretaris Negara: Sudi Silalahi

Menteri Departemen:

1. Menteri Dalam Negeri: Gemawan Fauzi
2. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
3. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
4. Menteri Hukum dan Ham: Patrialis Akbar
5. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
6. Menteri ESDM: Darwin Saleh
7. Menteri Perindustrian: MS Hidayat
8. Menteri Perdagangan
9. Menteri Pertanian: Suswono
10. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
11. Menteri Perhubungan: Freddy Numberi
12. Menteri Kelautan dan Perikanan:
Fadel Muhammad
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigras:
Muhaimin Iskandar
14. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto
15. Menteri Kesehatan:
Endang Rahayu Setianingsih
16. Menteri Pendidikan Nasional: Mohammad Nuh
17. Menteri Sosial: Salim Segaf Al-Jufri
18. Menteri Agama: Surya Darma Ali
19. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata:
Jero Wacik
20. Menteri Komunikasi dan Informasi:
Tifatul Sembiring

Menteri Negara

1. Menteri: Riset dan Teknologi:
Suharna Suryapranata

2. Menteri Koperasi dan UKM: Syarif Hasan
3. Menteri Lingkungan Hidup:
Gusti Muhammad Hatta
4. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak: Linda Amalia Sari
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara:
E.E. Mangindaan
6. Menteri Negara Pembangunan Daerah
Tertinggal: Ahmad Helmy Faishal Zaini
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional:
Armida Alisjahbana
8. Menteri BUMN: Mustafa Abubakar
9. Menteri Pemuda dan Olahraga:
Andi Alfian Mallarangeng
10. Menteri Perumahan Rakyat:
Suharso Manuarfa

Pejabat Setingkat Menteri

1. Kepala BIN: Jendral (Purn) Sutanto
2. Ketua BKPM: Gita Wiryawan
3. Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan
Pengendalian Pembangunan: Kuntoro
Mangkusubroto

Berikut susunan menteri yang akan saya angkat dalam kabinet saya. Susunan ini saya buat pada tahun 2008 saya masukkan dalam buku saya yang berjudul: "Seandainya Saya Menjadi Presiden RI". Susunan menteri ini mengacu pada menteri SBY.

Dalam pemerintahan saya hanya sedikit menteri, tidak ada menko, sebab semua bertanggung jawab kepada saya sebagai Presiden RI, otomatis

saya juga Menkonya semua menteri. Sedang menteri akan mengepalai Dirjen yang dipimpinnya, sekaligus yang bertanggung jawab sepenuhnya, maju mundurnya kementerian yang dia pimpin.

11. Inilah Susunan 15 Kabinet Kementerian Yang Saya Angkat;

1. Menteri Pertahanan, Hukum dan HAM.
2. Menteri Keuangan, meliputi; Perdagangan, Koperasi dan UKM.
3. Menteri Sosial, Perumahan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Menteri Dalam Negeri, didalamnya ada Sekretaris Negara dan Pengembangan Daerah Tertinggal.
5. Menteri Luar Negeri.
6. Menteri pengembangan dan pengolahan Sumber Daya Alam, meliputi: Pertanian, Kehutanan, Kelautan, juga Pertambangan.
7. Menteri Pemuda, Olahraga, dan Tenaga Kerja.
8. Menteri Kesehatan, meliputi lingkungan hidup dan perbaikan gizi keluarga.
9. Menteri Komunikasi dan Informasi, meliputi Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata.
11. Menteri Riset dan Teknologi, termasuk didalamnya Perhubungan dan pengangkutan/transportasi.

12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, meliputi Perencanaan Pembangunan Nasional, BUMN, dan BKPM.

13. Menteri Transmigrasi meliputi pengembangan wilayah dan tata kota. (ini juga mencakup badan pertanahan dan keluasan wilayah Indonesia, darat laut dan udara).

14. Menteri Agama.

15. Menteri Pendidikan Nasional.

Itulah diantara kementerian yang akan saya buat. Ini bisa kurang atau tambah (kalaupun tambah tidak banyak hanya yang saya anggap benar-benar perlu). Adapun kementerian yang diangkat SBY yang akan saya hilangkan adalah:

1. Menteri Koperasi dan UKM.
2. Menteri Lingkungan Hidup.
3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.
5. Sekretaris Negara.
6. Dan semua Pejabat setingkat menteri yang berjumlah tiga orang



Babak ke-Empat

Tentang kePEMILUan

1. Pilkada Serentak Yang Tidak Serentak

Hari Rabu tanggal 9 Desember 2015, untuk pertama kalinya Indonesia akan melaksanakan PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) serentak. Sebanyak 260 Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia akan melaksanakan pilkada secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang sama.

Istilah serentak pada pilkada yang akan dilaksanakan itu, hanya untuk pemilihan Bupati atau Wali Kota saja, itupun tidak seluruh Kabupaten/Kota semua melaksanakan pilkada. Hanya daerah yang pemimpinnya (Bupati/Wali Kota) habis masa jabatan pada tahun 2015. Sedang daerah yang pemimpinnya masih baru menjabat pada tahun 2015 belum melaksanakan pilkada serentak.

Pilkada serentak 2015, tidak menimbulkan efek yang berarti pada perjalanan bangsa Indonesia. Rakyat tidak merasa diistimewakan, tidak merasa akan ada perubahan, semua biasa-biasa saja. Basa-basi politik yang biasa disaksikan rakyat, yang kini hampir setiap tahun terjadi dibelahan negeri.

Pemerintah masih setengah hati, atau justru tidak berani melaksanakan PEMILU secara serentak dalam arti yang sesungguhnya yaitu “Pesta Demokrasi”. Untuk pemilihan DPD, DPRD II (Kabupaten / Kota), DPRD I (Propinsi), DPR RI (Pusat), Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden RI. Secara bersama-sama dalam hari dan tanggal yang sama.

Serentak yang tidak serentak, itu menurut saya. Serentak hanya untuk memilih Bupati / Wali Kota yang habis masa jabatannya pada tahun 2015. Tidak serentak, sebab tidak seluruh daerah melaksanakan pilkada pada tahun 2015. Tidak serentak sebab tidak seluruh ritual pemilu dilaksanakan secara bersama. Masih banyak pemilu yang akan dilaksanakan.

Pemilu nasional akan dilaksanakan pada tahun 2019. Untuk memilih DPD, DPRD II, I dan RI, setelah itu akan memilih Presiden RI. Mungkin di dunia ini hanya Indonesia yang banyak melaksanakan ritual Pemilu / pilkada, tapi nyaris tidak menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang kredibel. Kalaupun ada itu tidak sampai 10% dari total yang dipilih.

Pemborosan pelaksanaan pemilu/pilkada di Indonesia sangat luar biasa. Biaya melaksanakan ritual ini bisa mencapai ratusan trilyun rupiah. Mulai menggaji anggota KPU daerah yang kerjanya tidak efisien tapi gaji besar. Menyenggarakan pemilu setidaknya 4 (empat) kali mulai memilih bupati, dpr, gubernur, dan presiden. Itu belum kalau terjadi pengulangan.

Karena itu laksanakan PEMILU secara serentak untuk memilih anggota DPD, DPRD II, I, Pusat, Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden RI. Sebagai pesta demokrasi lima tahunan. Hal ini akan menghemat biaya.

2. Laksanakan Pemilu Serentak Untuk; DPD, DPRD II, DPRD I Dan DPR Pusat, Serta Pilbup. Pilwakot, Pilgub Dan Pilpres.

Sebagai kelanjutan dari sub bab diatas, sudah seharusnya pemerintah Indonesia merubah sistem pemilu di Indonesia dari yang berserakan dijadikan satu, serentak dan bersama-sama. PEMILU secara serentak untuk memilih anggota DPD, DPRD II, I, DPR Pusat, Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden RI. Sebagai pesta demokrasi lima tahunan.

Semua jenis pemilu tersebut dijadikan satu hari dalam waktu yang bersamaan, baik hari tanggal dan bulan. Dengan begitu akan menghemat banyak biaya dan anggaran untuk ini dan itu.

Bukan perkara sulit dan menyusahkan jika kita ada niat dan kemauan untuk melaksanakan. Buat aturan dan undang-undang yang memudahkan demi kemaslahatan bersama. Rekrut anak-anak muda untuk turut serta mensukseskan. Pemilu serentak akan memberi banyak harapan dan perubahan.

3. Jadikan Pemilu Sebagai Pesta Demokrasi

Masih melanjutkan tentang pemilu serentak. Dengan melaksanakan pemilu secara serentak untuk memilih anggota DPD, DPRD II, I, DPR Pusat, Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden RI. Pesta Demokrasi akan menjadi kenyataan.

Rakyat Indonesia memanfaatkan moment ini untuk turut serta terlibat dalam membuat perubahan, setidaknya rakyat terlibat memilih wakil rakyat dan pemimpinnya.

Pesta Demokrasi menjadi ajang menentukan nasib bangsa setiap lima tahun. PEMILU benar-benar menjadi moment yang ditunggu-tunggu oleh segenap bangsa Indonesia. Melalui pemilu rakyat akan menentukan Indonesia kedepan.

Pesta Demokrasi PEMILU juga menjadi libur nasional selama lima hari berturut-turut. Rakyat di iijinkan bahkan dianjurkan untuk mudik, balik kampung, kerumah asal untuk terlibat dalam proses pemilu demi menentukan masa depan bangsa.

Rakyat diberi kuasa penuh untuk menentukan siapa calon wakil dan pemimpinnya. Tidak ada intimidasi dan tidak ada politik uang. Rakyat bebas memilih sesuai pilihan nuraninya. Rakyat juga dilibatkan dalam mengawasi proses dan jalannya pemilihan.

Dengan begitu pesta demokrasi benar-benar dilaksanakan dengan sesungguhnya dinegara Republik yang menganut paham demokrasi ini.

4. Pilkada, Pilgub, Pilpres Jangan Satu Paket

Selama ini model pemilihan presiden, gubernur dan bupati/walikota dijadikan satu paket antara tokoh utama dan wakilnya. Model pemilihan seperti ini entah menganut atau meniru negara mana dan kenapa harus dibuat satu paket. Padahal banyak terjadi bupati dan wakilnya tidak sejalan dalam arti bupati / walikotanya bekerja maksimal sedang wakilnya hanya sebagai pelengkap yang tidak bisa berbuat apa-apa alias '*Iholak-Iholok*'.

Sudah menjadi rahasia umum sekaligus menjadi momok berat yang mengerikan cara-cara perekrutan kepemimpinan eksekutif di Indonesia. Bukan karena kredibilitas, potensi, prestasi, visi-misi, integritas, dan segala kelebihan sang bakal calon yang dijaring.

Tetapi lebih karena popularitas dan yang utama adalah kemampuan keuangan untuk

memenuhi syarat sebagai calon (baik membayar mahar ke partai pengusung atau mengumpulkan KTP kalau jalur independent / bukan melalui partai) dan menebar uang kepada calon pemilih sebagai 'politik uang' membeli suara.

Dalam pilkada serentak 2015, muncul kasus calon tunggal alias hanya ada satu pasang, yang lebih parah ada beberapa daerah yang tidak mempunyai calon sama sekali yang mendaftar. Itu semua karena kesalahan sistem yang dibuat satu paket antara bupati dan wakilnya, juga beratnya persyaratan dan mahal biaya.

Harusnya pemilihan bupati/walikota, gubernur dan presiden tidak satu paket tapi perseorangan maju menjadi kandidat utama. Sistem pemilihan model ini sering saya alami sewaktu saya masih SD beberapa puluh tahun silam.

Semua siswa berhak mencalonkan diri untuk menjadi ketua kelas, kemudian dibuat voting. Suara terbanyak dialah yang menjadi pemimpin, suara terbanyak kedua menjadi wakil, ketiga sekretaris, kemudian bendahara dan seterusnya seksi-seksi.

Dengan model seperti itu kandidat yang kalah masih mempunyai kesempatan untuk turut serta terlibat secara langsung membangun negara. Bahkan kandidat yang kalah bisa bersaing dengan kandidat pemenang untuk merebut hati rakyat, dengan catatan tidak bertentangan dengan kebijakan pemimpin.

5. Tinjau Ulang Dan Bubarkan Keberadaan KPUD I (Propinsi) Dan KPUD II (Kabupaten / Kota)

Entah apa yang dikerjakan para Anggota / pegawai KPUD Propinsi dan Kabupaten/Kota setelah hajatan Pemilihan Umum Legislatif (pileg) dan Pemilihan Presiden (pilpres) usai, begitu juga dengan selesainya Pemilihan Gubernur, Bupati / Walikota (pilkada).

Sebagai orang awam (bukan anggota KPU) hanya menduga-duga sepertinya mereka sudah tidak ada kerja lagi setelah pemilu usai. Tapi masa kerja/keanggotaan mereka selama lima tahun dan otomatis mereka selama itu mendapat gaji dan tunjangan. Konon gaji mereka cukup banyak, tidak sepadan dengan apa yang dilakukan.

Rekrutmen KPUD diindikasikan penuh rekayasa, kecurangan, dan sarat dengan nuansa KKN. Terbukti dari banyaknya demonstrasi/gugatan terhadap panitia seleksi penerimaa anggota KPUD. Tidak transparan dan tidak menghasilkan anggota yang ‘mumpuni’ (profesional) itu diantara bukti nyata bahwa panitia merekayasa penerimaan anggota KPUD.

Tes/seleksi hanya sandiwara yang sebetulnya personilnya sudah ada. Dari lima anggota KPUD dua atau tiga diantaranya adalah anggota lama yang kredibilitasnya ‘meragukan’ sedang yang dua anggota baru merupakan titipan atau sogokan. Jadi kebanyakan dari kelima anggota KPUD hanyalah orang-orang titipan. Kalaupun ada anggota yang profesional itu hanya 1-2 orang.

Melihat kondisi seperti itu, saya berharap pemerintah perlu meninjau ulang keberadaan KPUD I dan II. Sebab mereka tidak ada kerja tapi mereka mendapat gaji dari negara yang tidak sedikit.

Keberadaan KPUD menjadi bagian dari lembaga pemborosan negara.

Bubarkan KPUD yang sekarang masih bertengger walau itu bentukan baru, sebab hajatan pemilu sudah usai. Bentuk dan susun anggota KPUD berdasar kebutuhan, maksudnya ketika akan dilaksanakan pemilu baru dibentuk. Masa kerja KPUD cukup enam bulan selesai. Tiga bulan sebelum hari H, dan tiga bulan setelah hari H, atau maksimal satu tahun, dengan asumsi untukantisipasi jika ada sengketa pemilu.

6. Mudahkan Sistem / Persaratan Penjaringan Kandidat Calon

Sebagaimana saya tulis diatas persaratan untuk menjadi bakal calon bupati, walikota, gubernur dan presiden sangat berat dan bertele-tele. Berat harus mengeluarkan banyak uang, bertele-tele harus memenuhi syarat dukungan baik dari partai ataupun dari masyarakat yang kesemuanya juga memerlukan modal keuangan yang banyak.

Dari beratnya persaratan tersebut banyak calon perseorangan yang mempunyai kapabilitas, kredibilitas, kemampuan, integritas, bersih, jujur, independent dan mempunyai visi jauh kedepan untuk memajukan bangsa dan negara, hanya mengelus dada, gigit jari tidak bisa berbuat apa-apa sebab terbentur aturan dan peraturan yang tidak profesional.

Pemerintah dan DPR atau lembaga manapun yang punya kewenangan untuk membuat undang-undang dan peraturan pelaksanaan pemilu dan segala persoalan yang berkaitan dengan itu, harusnya berani membuat perubahan dan

pembaharuan demi terciptanya Indonesia yang maju modern dan bermartabat.

Permudah segala persyaratan bakal calon. Buka seluas-luasnya pendaftaran bakal calon, dengan persyaratan yang tidak memberatkan. Persyaratan yang memungkinkan bakal calon mampu dan bisa mendaftar. Saya siap membantu merumuskan tata-cara dan tata-tertib serta aturan persyaratan pendaftaran, sampai hari pelaksanaan pemilihan dan bagaimana cara menangani konflik perselisihan.

Dengan begitu Indonesia tidak dikuasai oleh orang-orang yang hanya mencari keuntungan pribadi, keluarga, kroni, partai, dan tidak jelas kemampuannya dalam memimpin dan memajukan negara serta memakmurkan rakyat.



Babak ke-Lima

Berbau Larangan

1. Jangan Main-Main Dengan Harga BBM

Kenaikan harga bbm akan menimbulkan gejolak perekonomian yang menyeluruh disemua sektor perdagangan dan jasa. Pendek kata semua urusan akan ikut terganggu dengan kenaikan harga bbm. Harga bbm menjadi nafas ekonomi di Indonesia,

Harga bbm naik, bisa dipastikan semua akan ikut naik, bahkan sebelum harga bbm naik pedagang sudah lebih dulu menaikkan dagangannya. Harga-harga barang kalau sudah naik, sulit rasanya akan turun, sudah keenakan naik, walaupun harga bbm diturunkan lagi, harga barang tetap tidak mau turun.

Maka dari itu jangan sekali-kali megutak-atik harga bbm, untuk dinaikkan, sebab dampaknya luar biasa. Kalau alasannya subsidi bbm hanya dinikmati orang-orang kaya, itu alasan yang tidak tepat, sebab jika subsidi bbm dicabut dan harga bbm naik, rakyat kecil justru yang akan sengsara dan menderita, barang-barang semakin jauh tidak terbeli.

Orang kaya memang sudah ditakdirkan hidup kaya dengan memiliki banyak uang, sudah selayaknya menikmati kemudahan yang dimiliki sebab mereka ada uang. Dicabutnya subsidi bbm dan harga bbm naik, orang kaya tetap bisa menikmati dan mampu membeli bbm.

Cara untuk, menarik duit dari orang kaya adalah dengan menaikkan pajak kendaraan bermotor terutama mobil dengan pajak yang tinggi, terlebih mobil mewah, motor mewah dan satu rumah yang

memiliki banyak kendaraan bermotor dikenakan pajak ganda atau pajak progresip. Dengan begitu akan ada subsidi silang dari orang kaya.

Jadi tolong harap dipertimbangkan masak-masak jika akan menaikkan harga bbm. Kecuali negara kita penduduknya sudah kaya dan lebih dari cukup, berpendapatan tinggi, silahkan dinaikkan harga bbm.

2. Jangan Ada Naturalisasi Untuk Pemain Bola

Salah satu diantara cara berbuat dan berfikir orang-orang Indonesia adalah dengan model instan. Ingin cepat mendapat hasil maksimal dan terbaik, tapi proses yang sederhana, enak dan mudah. Banyak kasus-kasus seperti ini berlaku dinegeri ini, terutama dalam meraih kekayaan. Ada yang minta tolong makhluk ghoib, dukun, berjudi, korupsi atau investasi bodong yang tidak masuk akal.

Bukan hanya mencari kekayaan, model instan juga merasuki petinggi sepakbola kita. Untuk mencapai predikat juara, berbagai cara ditempuh. Dan yang paling konyol, menyakitkan dan merendahkan harkat dan martabat anak negeri adalah dengan melakukan '*naturalisasi*' alias memungut orang luar negeri untuk dijadikan warga Indonesia sebagai pemain bola, kononnya guna mendongkrak prestasi sepak bola Indonesia.

Entah ide gila siapa yang dengan '*sembrono*' berani melakukan putusan begitu. Hanya otak '*sinthing*' yang berbuat begitu, sebab itu sudah melecehkan potensi anak-anak negeri. Begitu mudah me'*naturalisasi*' atau memberi kewarganegaraan

kepada orang asing yang sama sekali tidak tahu, tidak paham, apa dan bagaimana seluk-beluk Indonesia.

Jangankan budaya, bahasa Indonesia, dasar negara dan berbagai hal ke-Indonesiaan sama sekali tidak paham. Bagaimana orang seperti itu begitu mudah menjadi warga negara Indonesia? Apalagi mewakili Indonesia diluar negeri. Sungguh memalukan, jika diluar negeri orang ini (hasil naturalisasi) ditanya tentang ke-Indonesiaan, tapi tidak memahami tentang Indonesia sama sekali.

Apa bangganya jika kita menang dalam pertandingan sepak bola dikancah regional Asean, tetapi 40% pemainnya adalah orang luar negeri? Sama sekali tidak patut untuk dibanggakan. Lebih baik kalah terhormat, degan jerih payah dari pemain-pemain putra-putra terbaik anak-anak negri.

Apa hasil yang sudah didapat dari naturalisasi selama ini? Prestasi “NOL” tidak mendongkrak predikat sepa bola kita walau hanya ditingkat lokal Asean. Terus apa yang bisa diperbuat dengan orang-orang yang sudah menjadi warga negara dari hasil naturalisasi? Ada yang berbuat ulah, ada yang ikut klub luar negeri. Dan entah apa yang diperbuat yang lain.

Saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan mereka selanjutnya, apa negara akan menanggung biaya hidup mereka secara keseluruhan, sampai beranak pinak dan mati, walau sudah tidak bermain bola lagi. Sebab negaralah yang menghendaki mereka untuk menjadi warga negara RI.

Hentikan naturalisasi, jika hanya untuk mencari pemain bola. Maksimalkan potensi anak-anak muda negeri, terutama remaja-remaja Papua yang berbakat,

angkat mereka sekolahkan, didik mereka untuk menjadi pemain sepak bola profesional guna mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah dunia Internasional

Naturalisasi dimungkinkan kepada orang-orang yang telah berjasa kepada bangsa Indonesia. Begitu juga syaratnya harus ketat, mereka harus paham ke-Indonesiaan, lancar bertutur kata dalam bahasa Indonesia, paham adat dan budaya Indonesia, yang lebih penting sudah terbukti membawa manfaat kepada bangsa Indonesia.

Negara ini sudah kaya raya baik SDM dan SDA nya, jadi jangan coba-coba meremehkan potensi anak negeri, apalagi sampai melirik orang luar negeri sekedar dijadikan tumbal untuk meraih popularitas semu, *"huh keterlaluan"*.

3. Jangan Demonstrasi Yang Mengganggu Kepentingan Umum Apalagi Sampai Anarkhis.

Demonstrasi sebagai bentuk protes kekecewaan sudah menjadi komoditas bisnis di negara Indonesia. Demonstrasi bukan sebagai wujud dan bentuk kepribadian bangsa Indonesia dan bukan cara-cara Islami. Demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi.

Demonstrasi pada awalnya sebagai wujud penyaluran aspirasi yang tidak tersalurkan melalui jalur formal. Dilakukan oleh para aktifis mahasiswa yang idealis dan berfikir kritis terhadap permasalahan dan ketimpangan yang terjadi di pemerintahan. Kesewenang-wenangan, arogansi dan ketidakadilan, itu yang disuarakan para demonstran.

Demonstrasi kini sudah menyimpang dari jalur idealisme untuk menegakkan keadilan, tapi sudah berubah menjadi unjuk kekuatan untuk memaksakan kehendak, entah itu salah atau benar. Demonstrasi menjadi ajang untuk menekan pihak lawan. Dengan pengerahan masa, menakut-nakuti dan bertindak onar dan kadang bertindak anarkhis.

Sedikit-sedikit 'demo', tidak cocok demo, ingin mempertahankan pendapat demo, ingin merebut kuasa demo, ingin memenangkan masalahnya demo, pendek kata demo sudah menjadi sarana unjuk kekuatan untuk memaksakan keinginan berupa syahwat kuasa yang ujung-ujungnya bermuara pada mencari keuntungan materi.

Demonstrasi menjadi pekerjaan sampingan untuk mendapat tambahan uang saku dan makan siang gratis. Ada juga tambahan atribut berupa kaos, banner. Ada organiser yang berprofesi menyediakan orang-orang untuk melakukan demonstrasi. Jumlah orang atau masa bisa dipenuhi sesuai permintaan

Saya tidak menyalahkan para demonstan semacam itu, sebab itu bisa menjadi mata pencaharian. Asalkan jangan melakukan demonstrasi untuk memperkeruh keadaan dan memperuncing permasalahan. Apalagi demonstrasi yang dilakukan secara emosi yang berlebihan hingga mengganggu ketertiban dan kepentingan umum. Jangan melakukan demonstrasi sampai bertindak anarkhis dengan merusak barang-barang.

Demonstrasi seperti itu hanya dilakukan oleh orang gila atau keserupan. Juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai akal sehat. Orang seperti itu sudah pasti kerasukan setan. Ditunggangi

nafsu emosi yang berujung pengrusakan, ketika sadar pasti akan ada penyesalan.

Karena itu lakukan demonstrasi yang sewajarnya, pakai akal dan nurani yang sehat. Kalau bisa lakukan dialog, cari solusi sebagai pengurangan permasalahan. Tidak perlu gontok-gontokkan dan mau menang sendiri. Kalau bisa dilakukan dialog dengan terbuka dari kedua kubu, sudah pasti tidak akan ada demonstrasi.

Demonstrasi hanya dilakukan pada permasalahan global skup dunia. Bersumber pada isu-isu kemanusiaan dan lingkungan. Dilakukan dengan cara sopan tidak melanggar aturan. Apalagi sampai mengganggu ketertiban dan kepentingan umum, itu tidak akan dilakukan. Dan yang pasti tidak anarkhis.

4. Stop Menebus TKW Dengan Berpuluh Milyar Rupiah

Persoalan TKI dan TKW tidak akan pernah habis selama, kran dan peluang kerja keluar negeri masih dibuka lebar-lebar. Sempitnya peluang kerja didalam negeri dan rendahnya nilai mata uang rupiah berbanding mata uang luar negeri. Itu yang menjadi daya tarik anak-anak muda dengan berbagai latar belakang untuk mengadu nasib, mengais rejeki keluar negeri.

Terlebih bagi tenaga kerja wanita atau TKW, bebas biaya segalanya mulai proses awal sampai tempat tujuan kerja. Baru setelah tkw bekerja akan dikenakan potongan gaji, mulai dari enam bulan sampai satu tahun, atau lebih tergantung perjanjian kontrak kerja.

Latar belakang TKW tidak menjadi persoalan, apapun dan bagaimanapun latar belakangnya, asal ingin dan mau bekerja semua bisa diatur. Yang sering direkayasa adalah masalah umur. Banyak TKW yang masih dibawah umur direkayasa supaya umurnya memenuhi syarat. Disinilah mulai terjadinya pemalsuan data/dokumen TKW.

Secara umum atau kebanyakannya TKW berlatar belakang pendidikan paling tinggi setingkat SMA. Ada yang tidak lulus sekolah walau setingkat SD dan hanya sedikit yang berpendidikan sarjana. Begitu juga background keluarga dari kelas ekonomi menengah kebawah dan berasal dari kampung-kampung pelosok desa.

Berbagai background yang dibawah standart kelayakan, apalagi tidak diimbangi dengan kecerdasan akal dan emosional dalam menangkap dan mencerna persoalan, akan menimbulkan masalah dengan pihak majikan. Pelecehan seksual, perlakuan yang semena-mena dari majikan, gaji tidak dibayar. Itu beberapa problem umum yang sering dihadapi para TKW.

Dalam menghadapi berbagai tekanan kerja dan perlakuan tidak menyenangkan dari majikan beserta keluarganya sering membuat TKW depresi, sehingga menimbulkan gelap akal, gelap mata dan gelap nurani. Melawan majikan, itu sering dilakukan TKW untuk alasan membela diri.

Membunuh, walau kedengarannya sadis, kejam dan hampir tidak mungkin dilakukan seorang wanita TKW, tapi kenyataannya sering kita dengar begitu. Kita tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, atas sebab yang bagaimana dan mengapa. Begitu juga

bagaimana cara melakukan pembunuhan terhadap majikan. Tidak banyak orang yang tahu, saksi-saksi juga pasti sangat minim, sehingga kebenarannya masih perlu diuji dan dibuktikan.

Jika benar tkw membunuh, walau entah apapun alasannya dan itu melanggar hukum yang berlaku dimana tkw berada. Dan balasan hukumannya adalah hukum pancung atau hukuman mati. Sudah seharusnya kita bangsa Indonesia juga menghormati proses hukum yang berlaku dinegara berkenaan. Sejauh mungkin kita akan melakukan pendampingan dan pembelaan.

Jika segala daya upaya pembelaan tidak membuahkan hasil untuk membebaskan dari hukuman pancung/mati atau setidaknya meringankan hukuman. Dan tetap diberlakukan hukuman mati, kita harus hormati itu. Seandainya hukuman mati bisa dibatalkan asal dengan membayar uang tebusan sampai puluhan milyar rupiah, maka negara tidak perlu menuruti permintaan itu.

Beberapa bulan silam semasa pemerintahan presiden SBY, pernah terjadi penebusan TKW dengan membayar uang puluhan milyar. Yang terbaru sampai sekitar dua puluh delapan milyar. Sungguh uang yang sangat banyak, cukup untuk memberi beasiswa beberapa siswa berprestasi atau siswa tidak mampu. Penebusan TKW dengan uang bukan hanya sekali, tapi beberapa kali, hanya untuk membebaskan satu nyawa.

Penebusan itu tidak sebanding manfaatnya jika diberikan kepada orang-orang sakit yang membutuhkan pertolongan untuk biaya oprerasi. Uang puluhan milyar juga bisa menyelamatkan

banyak nyawa di Indonesia yang tidak bersalah apalagi sampai melakukan pembunuhan.

Seharusnya yang bertanggung jawab melakukan pembelaan, yang pertama adalah PJTKI yang memberangkatkan tkw bermasalah tersebut. Sebab dia PJTKI yang mendapat keuntungan, dia juga harusnya yang bertanggung jawab, PJTKI harusnya memberi pembinaan terhadap calon TKW-nya supaya tidak berbuat hal-hal yang melanggar hukum dinegara tujuan.

Jika PJTKI tidak mampu mengatasi masalah ini, maka negara harus turun tangan melakukan pembelaan, tapi tidak berbentuk penebusan uang. Dan jika TKW sudah dihukum mati, maka PJTKI juga yang harus menguruskan pemulangan jenazahnya, sebab sekali lagi PJTKI yang bertanggung jawab dan yang mendapat untung. Jangan dibebankan negara jika ada masalah, negara dibawa-bawa.

Negara harus tegas, buat aturan terhadap PJTKI bagaimana seharusnya mengurus TKW dari awal sampai pulang kerumah dengan segala problemnya. Negara jangan mau dimanfaatkan PJTKI untuk menutupi kesalahan. Dan stop penebusan berupa uang. Terpaksanya negara hanya melakukan bantuan pemulangan jenazah tkw yang dihukum mati dimana nagara TKW berada sampai keluarga TKW di Indonesia.



Babak ke-Enam

Saran, Anjuran, Usulan

1. Tinjau Ulang Sertifikasi

'*Uang nemu*' begitu saya mengistilahkan bagi guru yang sudah pns dan menerima uang sertifikasi. Betapa tidak sejak jaman orde lama, orde baru dan masuk orde reformasi selama itu tidak ada yang namanya 'uang sertifikasi' baik untuk guru honorer atau guru pns.

Entah sejak jaman orde rezim siapa ada gelontoran uang sertifikasi bagi para guru-guru baik pns maupun honorer. Bagi sebagian pns non guru bisa membuat cemburu dengan adanya uang sertifikasi ini. Bukan hanya sesama pns yang non guru, sesama guru sendiri juga menimbulkan 'rasa kurang nyaman'.

Hal itu disebabkan cara pembayaran 'gaji' uang sertifikasi antara guru pns dan guru non pns (honorer) berbeda. Guru-guru pns menerima gaji sertifikasi setiap bulan, dua bulan sekali atau setiap tiga bulan. Sedang guru honorer menerima gaji sertifikasi setiap enam bulan sekali.

Begitu juga dalam jumlah nominalnya antara guru pns dan guru honorer juga berbeda. Guru honorer lulusan S1 menerima 'gaji' sertifikasi sebesar Rp 1.500.000.-. Guru pns menerima gaji sertifikasi disamakan dengan jumlah gaji berdasar golongan yang diterima. Contoh, jika guru pns menerima gaji Rp. 5000.000.- maka gaji sertifikasinya juga menerima Rp 5000.000.- Jadi dalam satu bulan guru pns bersertifikasi menerima gaji Rp. 10.000.000.-

Sekali lagi, 'uang nemu' itulah yang dialami para guru pns bersertifikasi.

Sertifikasi guru entah apa maksudnya. Apakah untuk mengukur standart kelayakan seorang guru dalam mengajar, atau semua guru yang mengajar dengan memenuhi persyaratan tertentu mendapat sertifikasi.

Mengingat kerancuan 'sertifikasi' dalam aplikasinya dan kesenjangan dalam penerimaan jumlah uang serta sistem pembayarannya yang berbeda. Sebaiknya 'sertifikasi' ditinjau ulang. Baik dalam bentuk pemberian sertifikasi ke seorang guru atau cara pembayaran dan jumlah nilai uang.

Dari segi pemberian sertifikasi, seharusnya diperketat cara memperolehnya. Hanya guru yang berprestasi, mempunyai karya ilmiah atau mempunyai beberapa penemuan dalam dunia pendidikan. Guru-guru berprestasi dalam mengajar kepada orang-orang terpinggirkan, lokasi yang sulit dijangkau dan beberapa bentuk pengabdian yang itu jarang mau dilakukan oleh kebanyakan guru yang lain.

Dari segi penerimaan uang sertifikasi, seharusnya kepada guru yang non pns itu yang diutamakan. Dan harus diberikan setiap bulan. Sedang dari segi jumlah harusnya disamakan antara guru pns dengan guru honorer. Atau justru guru pns hanya mendapat separonya dari guru honorer, sebab guru pns sudah mendapat gaji pokok.

Itu kalau sertifikasi yang sudah ada mau diteruskan. Jika sertifikasi mau dirubah ya harus seperti yang saya persaratkan diatas. Hanya guru berprestasi dan sudah teruji dalam dunia pengajaran/pendidikan, itu yang dikasih sertifikasi.

Sebab guru-guru yang mendapat sertifikasi dalam faktanya banyak yang tidak memenuhi standart kelayakan mengajar.

2. Tinjau Ulang Dan Bubarkan Keberadaan KPUD I Dan II

Entah apa yang dikerjakan para Anggota/pegawai KPUD Propinsi dan Kabupaten/Kota setelah hajatan Pemilihan Umum Legislatif (pileg) dan Pemilihan Presiden (pilpres) usai, begitu juga dengan selesainya Pemilihan Bupati/Walikota (pilbup/pilwakot).

Sebagai orang awam (bukan anggota KPU) hanya menduga-duga sepertinya mereka sudah tidak ada kerja lagi setelah pemilu usai. Tapi masa kerja/keanggotaan mereka selama lima tahun dan otomatis mereka selama itu mendapat gaji dan tunjangan. Konon gaji mereka cukup banyak, tidak sepadan dengan apa yang dilakukan.

Rekrutmen KPUD diindikasikan penuh rekayasa, kecurangan, dan sarat dengan nuansa KKN. Terbukti dari banyaknya demonstrasi/gugatan terhadap panitia seleksi penerimaa anggota KPUD. Tidak transparan dan tidak menghasilkan anggota yang ‘mumpuni’ (profesional) itu diantara bukti nyata bahwa panitia merekayasa penerimaan anggota KPUD.

Tes/seleksi hanya sandiwara yang sebetulnya personilnya sudah ada. Dari lima anggota KPUD dua atau tiga diantaranya adalah anggota lama yang kredibilitasnya ‘meragukan’ sedang yang dua anggota baru merupakan titipan atau sogokan. Jadi kebanyakan dari kelima anggota KPUD hanyalah

orang-orang titipan. Kalaupun ada anggota yang profesional itu hanya 1-2 orang.

Melihat kondisi seperti itu, saya berharap pemerintah perlu meninjau ulang keberadaan KPUD I dan II. Sebab mereka tidak ada kerja tapi mereka mendapat gaji dari negara yang tidak sedikit. Keberadaan KPUD menjadi bagian dari lembaga pemborosan negara.

Bubarkan KPUD yang sekarang masih bertengger walau itu bentukan baru, sebab hajatan pemilu sudah usai. Bentuk dan susun anggota KPUD berdasar kebutuhan, maksudnya ketika akan dilaksanakan pemilu baru dibentuk. Masa kerja KPUD cukup enam bulan selesai. Tiga bulan sebelum hari H, dan tiga bulan setelah hari H, atau maksimal satu tahun, dengan asumsi untukantisipasi jika ada sengketa pemilu.

3. Laksanakan Pemilu Serentak Untuk; DPD, DPRD II, DPRD I Dan DPR Pusat, Serta Pilbup. Pilwakot, Pilgub Dan Pilpres.

Konon pemilu dikatakan sebagai '*pesta demokrasi*'. Entah apa maksud dan pengertian pesta demokrasi tersebut. Apakah pesta bagi-bagi uang dari calon (kandidat) kepada pemilih, atau ramai-ramai dalam euforia dan hingar-bingar kampanye atau hanya sekedar memaksa rakyat untuk berpartisipasi datang ke TPS guna memilih calon yang sudah membayarnya.

Sulit dihindari dari praktek politik uang. Begitu juga sulit dibantah bahwa kesuksesan pemilu juga tidak terlepas dari politik uang. Sebab zaman

sekarang ini kebanyakan rakyat sudah paham, siapapun yang jadi tidak akan membawa perubahan pada diri mereka, yang ada hanya membuat mereka para kandidat yang terpilih menjadi kaya-raya sebab korupsi. Karena itu rakyat tidak akan memilih kecuali ada kandidat yang memberi uang.

Era reformasi menciptakan sistem pemilu menjadi bertele-tele. Dimulai dari pemilu memilih anggota DPD dan DPR (DPRD II, DPRD I dan DPR Pusat) pemilu memilih presiden, pemilu memilih bupati, pemilu memilih walikota, dan pemilu memilih gubernur.

Pemilu-pemilu tersebut sangat menghambur-hamburkan uang negara dan waktu. Tidak efisien, tidak hemat dan hanya membuang-buang uang, waktu dan energi. Pemilu yang tidak menghasilkan wakil rakyat atau pemimpin yang berkualitas. Jadi semacam sia-sia saja melaksanakan pemilu.

Karena itu untuk menghemat anggaran, menghemat waktu dan betul-betul bisa disebut pesta demokrasi laksanakan pemilu serentak dalam satu waktu untuk semua jenis pemilu. Pencoblosan satu hari selesai.

Hal ini tidak sulit asal pemerintah dan pihak terkait serius dan ikhlas menjalankannya. Sampai hari ini wacana pemilu serentak pileg dan pilpres masih menjadi polemik, seperti ketakutan dan tidak mampu melaksanakan. Saya siap menjadi tim perumus pelaksanaan pemilu serentak ini, jika pemerintah atau anggota DPR tidak mampu merumuskannya.

Dengan pemilu serentak pesta demokrasi akan benar-benar terjadi. Rakyat merasakan aura dan nuansa pemilu sebagai hajatan lima tahunan.

Diantara bentuk dan nuansa pesta demokrasi tersebut adalah, rakyat khususnya para pegawai mendapat hak cuti libur selama satu minggu untuk menyambut pesta demokrasi lima tahunan ini.

Rakyat yang merantau ke kota bisa pulang kampung untuk ikut berpartisipasi menyampaikan hak pilihnya dalam merubah kehidupan bernegara dan berbangsa di negri Indonesia. Rakyat akan menentukan siapa wakil di dan dari daerahnya, begitu juga rakyat juga akan ikut menentukan siapa calon pemimpin daerahnya.

Mengenai teknis pelaksanaan pemilu serentak, bisa diatur dengan mudah. Dengan niat yang baik dan demi kebaikan bersama yang sulit akan menjadi mudah. Tidak ada sesuatu yang tida mungkin untuk urusan dunia, semua tergantung keseriusan kita. Kita yang membuat dan kita yang memudahkan. Sering kita mempersulit urusan kita sendiri, padahal ini demi rakyat. Rakyat akan ikut dan setuju dengan pelaksanaan pemilu serentak ini. Saya teramat sangat yakin itu.

4. Cabut/Batalkan Wacana Larangan Impor Pakaian Bekas

Wacana pelarangan impor pakaian bekas sebetulnya sudah saya dengar sejak beberapa tahun silam. Tapi tidak tahu apakah wacana itu sekedar wacana atau sudah diputuskan. Pada waktu itu juga terjadi pro-kontra mengenai wacana larangan impor pakaian bekas. Alasan utama pada saat itu adalah, impor pakaian bekas akan mematikan industri garmen, konveksi dan industri tekstil.

Kini wacana larangan itu kembali mengemuka, bahkan cukup santer dengan berbagai pemberitaan media televisi. Kini alasan pelarangan itu bukan hanya karena menjatuhkan industri garmen, konveksi dan tekstil, tapi ditakut-takuti dengan adanya penyebaran virus penyakit yang ada dalam pakaian bekas tersebut.

Anehnya belum ada laporan pemakai pakaian impor bekas tersebut terserang penyakit. Rasanya aman-aman saja, tidak ada kejadian yang meresahkan berkaitan dengan pemakai pakaian impor bekas.

Alasan mematikan industri garmen, konveksi dan tekstil hanya alasan sepihak yang lebih membela kepada golongan kaya atau pengusaha. Pemerintah tidak memikirkan bagaimana manfaatnya untuk orang-orang kecil, miskin dan terpinggirkan.

Pengusaha garmen, konveksi, industri tekstil, sudah pasti mereka orang-orang kaya. Mereka masih punya duit untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan mampu membeli pakaian bermerk internasional di mal-mal besar bahkan shopping keluar negeri hanya untuk membeli sepotong BH.

Bagaimana dengan orang kecil? Membeli pakaian produk lokal saja terasa berat sebab harganya mencapai ratusan ribu perpotong, tidak sebanding dengan penghasilan mereka yang hanya puluhan ribu. Dengan adanya penjual pakaian impor bekas, orang-orang miskin dan orang kecil bisa membeli pakaian bermerk dengan harga murah. Pakaian-pakaian tersebut kualitasnya bisa dijamin bagus dan kondisinya masih 50% bahkan lebih.

Peminat pakaian impor bekas bukan hanya orang-orang kecil dan orang-orang miskin. Tetapi para kaum menengah bahkan kelas atas banyak juga yang mencari pakaian impor bekas ini. Mereka tidak canggung dan tidak berfikir tentang penyakit yang ada pada pakaian bekas.

Bahkan di Malaysia banyak lapak-lapak yang menjajakan pakain bekas. Peminatnya beragam bukan hanya kelas bawah, tapi menengah dan atas nampak memilah dan memilih jenis pakaian yang akan dibelinya. Mereka juga tidak risi dan tidak canggung.

Kalau ada orang yang tidak mau membeli pakaian bekas lebih kepada imej pribadi saja yang merasa gimana gitu. Sedikit yang merasa takut tertular penyakit dan hampir tidak ada yang karena kasihan kepada industri garmen, konveksi dan tekstil.

Karena itu pemerintah harus membatalkan rencana pelarangan impor pakaian bekas. Pemerintah harus berpihak kepada rakyat kebanyakan, kalau ditakutkan tertular penyakit, pemerintah harusnya mecari solusi pencegahanya. Soal akan mematikan industri pertekstilan dan yang bersinggungan dengan itu, pengusaha seharusnya mencari terobosan bagaimana produknya bisa bersaing dipasaran. Sehingga tidak terkesan pemerintah membela pengusaha dan mengabaikan rakyat kecil.

5. Bentuk Komisi Pemberantasan Kemiskinan, Kebodohan Dan Keterbelakangan (KPK3)

Selama ini hampir tidak ada satu lembaga atau instansi pemerintah yang secara serius menangani

dan mendampingi rakyat secara berkesinambungan. Yang ada hanya bersifat temporer, tentatif dan sesaat. Seperti bantuan ternak kambing, sapi, lele, pemberian traktor (alat pembajak sawah), blt (bantuan langsung tunai, kompensasi bbm), dan berbagai bentuk bantuan lain yang sifatnya sesaat.

Bantuan-bantuan itu banyak yang tidak tepat sasaran, berdasar kedekatan dengan si pemberi bantuan atau ada link ke sumber bantuan, dijamin akan dapat bantuan. Banyak orang-orang yang seharusnya wajib mendapat bantuan tapi justru tidak mendapat bantuan apapun. Tragisnya bantuan itu tidak layak dimanfaatkan sebab bantuan itu suda disunat dan dipotong oleh aparat negara.

Begitu juga yang mendapat bantuan berupa ternak, yang seharusnya dikembangkan dan diberdayakan sehingga bisa dikasihkan kepada yang lain, tapi kenyataannya hal itu tidak terjadi. Banyak faktor kenapa hal ini sampai terjadi, dan yang menjadi faktor utama adalah karena tidak adanya pendampingan dan pengawasan dari pemerintah.

Pemerintah lepas tangan, seakan setelah rakyat diberi bantuan akan bisa mengembangkan bantuannya. Padahal bantuan berupa ternak itu kebanyakannya juga tidak sesuai dengan harga nilai bantuan. Atau kata lainnya kondisi ternak tidak layak, sebab kondisinya sakit, sehingga ketika sampai ketangan rakyat tidak lama mati. Atau kalau yang mendapat bantuan ternak cukup banyak karena tidak mampu memelihara, tidak mampu memberi makan, akhirnya ternak dijual dan dibeliakan barang-barang sekunder seperti perabot rumah, gadget, atau kendaraan bermotor, sepeda motor atau mobil.

Untuk merubah kebiasaan itu, pemerintah harus membuat satu komisi atau lembaga baru yang komprehensif. Satu komisi yang mampu mewadahi semua aspirasi kepentingan negara dan rakyat. Bisa menjadi jembatan untuk saling memberi dan menerima antara rakyat dan negara.

Komisi ini lintas sektoral, mengkover semua permasalahan yang ada. Bersifat permanen, profesional, dan tidak betele-tele. Komisi ini sebagai konsultan, pelaksana, pendamping, pengawas, pemberi bantuan dan juga tempat pengaduan segala permasalahan.

Fokus komisi ini lebih kepada pemberdayaan SDM, mulai dari pemberantasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Ketiga kondisi ini menjadi indikasi ketidakmakmuran dan ketidak adanya pemerataan, kesejahteraan dan keadilan dalam suatu negara.

Komisi ini berada disemua daerah mulai dari pusat sebagai penentu kebijakan untuk seluruh negara, daerah tingkat satu (propinsi, sebagai fasilitator dan koordinator dari pusat kedaerah tingkat dua) dan daerah tingkat dua (kabupaten/kota, sebagai eksekutor, pelaksana dan pencari permasalahan untuk diselesaikan). Para pekerjanya bersifat kontrak pertiga tahun dan bisa diperpanjang atau justru diberhentikan sebelum habis kontrak atas sebab dan berbagai alasan. Mereka yang bekerja di komisi ini harus benar-benar pekerja profesional, independen, dan tidak bersifat partisan partai.

Untuk menjadi pekerja/pengurus/relawan dikomisi ini, tidak perlu dengan persyaratan yang bertele-tele, tidak harus sarjana dan berpengalaman.

Yang penting siap untuk bekerja keras, jujur, amanah dan bekerja ikhlas.

Pekerja di komisi ini harus turun lapangan dan wajib mengetahui kondisi rakyat secara keseluruhan, bagaimana kondisi ekonomi (kondisi rumah, pekerjaan dan penghasilan), kondisi sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan agamanya. Degan begitu tidak ada rakyat yang hidup tidak layak dan jauh dari standart kehidupan.

Semua rakyat yang hidup dalam jurang kemiskinan, tidak punya rumah, sulit memenuhi kebutuhan makan, tidak ada pekerjaan, tidak mampu membayar sekolah, sakit-sakitan, tidak mendapat informasi, dan berbagai problem keterbelakangan yang lain akan tertangani secara profesional dan tidak berhenti ditengah jalan.

Begitu juga rakyat yang mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintah, bisa mengadu ke komisi ini. Dan sudah pasti komisi ini akan menindak lanjuti pengaduan ini untuk segera diproses. Selama ini rakyat sering mendapat perlakuan tidak adil dari beberapa instansi dan orang-orang pemerintahan, tapi rakyat tidak bisa berbuat apa-apa.

Saya yakin komisi ini akan banyak manfaatnya kepada negara dan terutama kepada rakyat. Rakyat akan merasa diperhatikan dan depermudah kebutuhannya dan dikembangkan potensi yang dimilikinya. Dengan begitu kesejahteraan kemakmuran dan keadilan negara Indonesia akan tercapai. Saya siap untuk membantu dan mewujudkan komisi ini.

6. Pencarian Dan Pemberian Fasilitas Bibit Unggul (Anak Berprestasi) Sejak Dini

Program ini merupakan program jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara berwibawa, berilmu dan bermartabat. Program ini juga sebagai upaya pelaksanaan revolusi mental, revolusi sosial dan revolusi berbangsa dan bernegara.

Yang kita lihat selama ini penguasa dan pejabat negara dan wakil rakyat terdiri dari orang-orang yang tidak jelas kapasitas dan kapabilitasnya. Mereka hanya bermodalkan keuangan bisa menduduki jabatan yang diinginkan. Sedang orang-orang pintar, jujur dan lurus tersisih dari sistem pemerintahan Indonesia.

Sudah 70 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2015, tapi rasa keadilan dan kemakmuran, kesejahteraan dan pemerataan masih jauh dari panggang. Model dan cara-cara mental penjajahan Belanda masih terasa disetiap sudut perkantoran dan pada orang-orang yang memakai baju korp pns, tni dan polri serta para anggota dpr yang terhormat.

Mereka berperan bukan sebagai pelayan rakyat, tapi justru sebaliknya bersikap sebagai juragan, yang harus dilayani dan dihormati rakyat. Sedang rakyat adalah obyek pemerasan, dipandang sebelah mata, dianggap bodoh dan diperbodohkan serta tidak perlu diperhatikan. Padahal kehidupan para pejabat tersebut ditopang oleh uang rakyat, keringat rakyat dan penderitaan rakyat.

Karena itulah negara harus berani membuat terobosan, membuat perubahan dengan mempersiapkan sebuah generasi yang betul-betul merupakan bibit-bibit unggul dan berkualitas.

Sejak usia dini, setidaknya dimulai masa sekolah dasar, anak-anak berprestasi yang merupakan bibit unggul didata, diperhatikan, dikasih fasilitas, dijaring, dididik dan dibiayahi oleh negara untuk menempuh pendidikan sampai kejenjang tertinggi.

Setiap daerah pasti akan muncul dan lahir bibit-bibit unggul, mereka inilah yang akan kita persiapkan untuk mengisi pemerintahan masa depan. Kasih kesempatan mereka untuk menduduki pos-pos yang sesuai dengan bidangnya. Jangan dipersulit dengan aturan yang mengada-ada dan bertele-tele bagi mereka. Dengan potensi, kemampuan dan kecerdasan yang dimiliki dan yang telah kita persiapkan, insya Allah mereka akan berbuat yang terbaik untuk negara Indonesia.

Sehingga dimasa depan tidak ada orang-orang pintar, jujur, amanah, berpotensi, berbakat dan berkemampuan yang tidak terpakai alias nganggur. Persaingan bukan lagi pada berapa banyaknya uang sogokan dan seberapa kenal/kedekatan dengan orang dalam, tapi pada kecerdasan, dedikasi dan moralitas.

Dengan begitu akan tercapai Indonesia negara berwibawa, bermartabat, disegani dunia internasional, dan penduduknya hidup dalam kemakmuran, kesejahteraan, keadilan dan kedamaian serta ketenangan. Sebagai negara *baldatun toyyibatun warobbun ghofur*.

7. Beri Kesempatan Mereka Yang Berbakat Dan Berpotensi

Banyak anak-anak, remaja dan pemuda berprestasi dan mempunyai bakat untuk menjadi pemimpin dan membangun negara Indonesia. Sayangnya banyak pemuda seperti ini, tidak mendapat tempat di negeri ini, sebab mereka tidak mempunyai uang yang cukup dan koneksi orang dalam untuk mewujudkan kemampuan mereka.

Baik untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, apalagi untuk menjadi pegawai negeri (pns, tni, polri), bahkan untuk menjadi anggota DPR dan jabatan eksekutif yang lain. Negara ini sudah dirasuki oleh kekuatan materialisme yang mengukur segala sesuatu dari segi keuangan dan kebendaan.

Orang-orang berilmu, berbakat, berpotensi, jujur, berintegritas, sering tersisih tidak mendapat tempat sebab kalah oleh mereka yang mempunyai koneksi dengan orang dalam, dan yang mempunyai sumber keuangan yang cukup. Sehingga tidak heran kalau negeri ini dikelola oleh orang-orang yang tidak mempunyai bobot keahlian, integritas dan loyalitas yang bagus.

Mereka hanya kerja karena menjalankan tugas, itupun tidak profesional dan tidak memuaskan, sebab sekedar mencari penghasilan dan kekayaan yang menjadi tujuan mereka, walau dengan cara haram sekalipun.

Sedang anak-anak, remaja dan pemuda berbakat akan tersisih, tidak bisa menyalurkan potensi dan bakat yang dimilikinya. Bahkan mereka akan terbuang dan tenggelam dalam dunia yang penuh persaingan tidak sehat ini. Bagi mereka yang berbakat dan bernasib baik bisa melanjutkan

pendidikan kejenjang lebih tinggi diluar negeri, mereka tidak mau balik Indonsia, sebab dinegeri sendiri tidak dihargai. Mereka lebih memilih tinggal diluar negeri, disana mereka mendapat tempat untuk menyalurkan potensi yang dimilikinya.

Sebagai kelanjutan dari sub bab diatas, seharusnya negara mulai memperhatikan orang-orang berbakat ini untuk dijarah, diberi kesempatan dan dikembangkan segala potensi yang dimilikinya. Setelah itu beri tempat kepada mereka untuk mengisi posisi-posisi yang strategis, dengan tidak perlu bersaing dengan para pemilik uang yang sanggup sogok sana, sogok sini.

Insya Allah jika negara ini diisi dan diurus oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian berdasar bakat yang dimiliki, maka negara bersih, berwibawa, dan bermartabat akan dicapai.

8. Pindahkan Ibu Kota Dari Jakarta Ke Papua

Jakarta sudah tidak layak huni, kurang layak dijadikan sebagai tempat wisata, tidak layak sebagai tempat pengembangan pendidikan, dan tidak layak sebagai Ibu Kota Negara. Tidak kondusif, tidak representatif, tidak aman, apalagi sekarang banyak begal dan preman berkeliaran. Keberanian seorang pemimpin terutama presiden teruji dan terbukti berhasil dalam kepemimpinannya diantaranya jika mampu merubah wajah Indonesia.

Wajah Indonesia bisa dilihat dari kondisi Ibu Kotanya. Presiden RI akan dicatat dengan tinta emas dalam sejarah perkembangan pemerintahan Republik Indonesia jika berani memindahkan Ibu Kota Indonesia yang berada di Jakarta dipindah keluar

Jawa. Ide perpindahan Ibu Kota, sebenarnya sudah diwacanakan sejak Presiden pertama RI Ir Soekarno.

Ide presiden Soekarno untuk memindahkan Ibu Kota RI pada saat itu ke Kalimantan Tengah, sungguh suatu ide berani, brilian dan pemikiran jauh kedepan. Entah apa yang menjadi pertimbangan presiden Soekarno yang pada waktu itu sudah terfikir untuk memindahkan Ibu Kota dan yang menjadi pilihan adalah Kalimantan Tengah.

Padahal pada waktu itu sekitar awal tahun 1960an wajah dan kondisi Jakarta sudah pasti jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Tidak ada kemacetan, banjir, gedung-gedung tinggi dan overload jumlah manusia dan kendaraan. Jakarta waktu itu pasti masih nyaman untuk ditinggali. Belum terkontaminasi virus-virus kemajuan dan kejahatan dalam berbagai bentuknya.

Dalam buku saya berjudul; “Seandainya Saya Menjadi Presiden RI” yang saya tulis tahun 2008, ada sub bab sebagai ide saya, yaitu Ibu Kota akan saya pindahkan ke Kalimantan Timur. Petimbangan saya kenapa Kalimantan Timur sebab daerah ini relatif berada di tengah-tengah Indonesia. Kalimantan Timur juga bisa dekat ke Malaysia Timur (Sabah), Brunei Darussalam, bahkan mungkin bisa tembus darat ke Serawak Malaysia.

Karena itu pilihan Kalimantan Timur relatif lebih adil, bagi Indonesia barat dan Indonesia timur, waktu dan jarak tempuh relatif sama. Tapi setelah mengamati perkembangan dan mempertimbangkan manfaat dan pemerataan kemajuan dan keadilan pilihan semula Kalimantan Timur saya rubah ke Papua.

Papua menjadi pilihan dan usulan saya saat ini. Ada beberapa pertimbangan kenapa harus Papua. Papua adalah pulau kaya akan sumber daya alam yang luar biasa, mungkin pulau paling kaya di Indonesia. Papua pulau terbesar diantara pulau-pula besar yang dimiliki Indonesia. Papua pulau besar diujung paling timur Indonesia.

Papua secara umum masih ketinggalan jauh dengan pulau-pulau besar yang lain. Baik dari segi infrastruktur, SDM, kesejahteraan dan rasa keadilan. Tetapi Papua telah dieksploitasi sedemikian rupa yang berkepanjangan sejak berpuluh-puluh tahun silam. Kekayaan dan sumber daya alam Papua dinikmati oleh segelintir orang yang hidup di Jakarta dan orang Amerika.

Kekayaan alam Papua bisa jadi menghidupi negara Amerika dengan Freeportnya. Bayangkan sebuah gunung emas yang menghasilkan ribuan trilyun rupiah dikeruk dan hasilnya dibawa ke Amerika. Indonesia hanya kebagian ratusan milyar, itupun dibuat bancakan oleh para pejabat di Jakarta. Sedang penduduk asli Papua, pemilik tanah leluhur tidak mendapat bagian apa-apa. Jika ada orang Papua yang berusaha megais-ngais limbah emas, akan ditembaki oleh tentara dari anak negeri sesama bangsa sendiri.

Sebuah gunung yang menjulang, kini menjadi danau yang menggenang. Sungguh tragis dan ironis nasib rakyat Papua, hidup dalam lumbung emas, tapi merana dan menderita karena tidak bisa berbuat apa-apa. Sedikit bergerak rakyat Papua akan ditembak. Rakyat Papua bukan hanya ketinggalan dalam

banyak hal, tapi seakan diterbelakangkan dan dicurigai.

Bagi saya tidak heran jika ada semacam gerakan dari rakyat Papua untuk minta merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan itu bernama OPM (Organisasi Papua Merdeka). Sebagai orang kecil yang juga merasa didzolimi oleh pejabat negeri ini, rasanya saya bersimpati dengan saudara-saudara saya di Papua.

Jika terus-terusan hanya di eksploitasi SDA dan SDM yang ada di Papua, saya yakin gerakan OPM akan terus berlanjut bahkan sampai menimbulkan peperangan besar. Bukan sekedar gerakan separatis yang bentrok dengan TNI atau POLRI sebagaimana selama ini, tapi terjadinya pemberontakan melawan NKRI.

Karena itu untuk menghentikan gerakan OPM dan untuk menebus dosa negara kepada rakyat Papua, sudah saatnya dan sepantasnya jika Papua dijadikan Ibu Kota negara Indonesia.

Papua dijadikan Kota Modern, Ibu Kota Indonesia yang baru, terpadu, komprehensif dan berbasis cyber dengan teknologi mutakhir. Sebagai perbandingan bisa mencontoh Putra Jaya di Malaysia sebagai Ibu Kota negara Malaysia yang baru. Papua dibuat lebih hebat dari Putra Jaya Malaysia dalam banyak hal.

Dalam membangun Papua sebagai Ibu Kota Negara RI melibatkan banyak pakar dan berbagai disiplin ilmu. Setuhan seni, estetika, keindahan, ramah lingkungan, naturalis, modern, berbagai unsur daerah dan negara berpadu dalam pembangunan

Papua. Papua akan berubah dengan wajah baru yang menawan dan mempesona.

Papua menjadi pusat pemerintahan Indonesia, Ibu Kota RI, kantor dan rumah dinas (istana) Presiden RI dan wakilnya, Kantor Menteri, DPR, dan perwakilan beberapa negara sahabat (Duta Besar). Tidak ada perindustrian besar di Pusat Ibu Kota Papua, yang diperbolehkan adalah pengembangan pendidikan. Industri ditempatkan dikawasan tertentu yang jauh dari Pusat Ibu Kota. Semua sistem yang ada di Ibu Kota Papua sudah berbasis teknologi modern dan digital.

Sebagai kompensasi untuk rakyat Papua diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut terlibat dalam pengembangan ini. Rakyat Papua semua dijamin mendapat pekerjaan dengan adanya Ibu Kota yang baru di Papua. Pekerjaan itu akan disesuaikan dengan komposisi dan kemampuan yang dimiliki rakyat Papua. Sudah pasti kemampuan SDM rakyat Papua akan ditingkatkan sehingga tidak akan ketinggalan dengan rakyat Indonesia yang lain, terutama di Jawa.

Dengan begitu tidak akan adalagi gerakan separatis seperti OPM atau apapun namanya yang masih menginginkan Papua merdeka, sebab Papua sudah menjadi Ibu Kota Negara RI.

9. Sederhanakan Sebutan Mata Uang Rupiah

Kebijakan ini juga merupakan bentuk keberanian seorang presiden. Wacana renumerasi nilai mata uang rupiah sudah digulirkan beberapa tahun silam. Lagi-lagi ini sekedar wacana penghias berita di media masa. Mungkin sekedar mengalihkan

opini masyarakat dari kasus tertentu yang bersifat rahasia negara.

Bung Karno memang hebat, berani dan brilian. Negarawan ulung yang belum ada tandingan dinegri ini. Pada masa pemerintahannya presiden Soekarno berani melakukan pemotongan nilai mata uang dan kalau tidak salah fisik uangnya sekalian dipotong. Nilai seribu atau entah seratus menjadi satu, kalau tidak salah begitu. Yang pasti Bung Karno berani mengambil kebijakan itu dengan segala resikonya.

Dalam pandangan saya, salah satu bentuk kedzoliman dalam sistem perekonomian Indonesia adalah berasal dari nilai mata uang. Sudah menjadi olok-olok dikalangan masyarakat sebutan mata uang kita sangat bombastis, menggelegar. Sebutannya sangat besar, berjuta-juta tapi kecil atau tiada nilainya.

Bagi orang luar negeri yang baru masuk Indonesia, akan dibuat kebingungan dengan nilai mata uang kita. Sebab sebutannya sangat besar beribu-ribu dan berjuta. Pernah ada teman Malaysia yang datang ke Jogja, waktu belanja dia sedikit kebingungan waktu membayar, dia berfikir sejenak untuk mengkurskan dengan uang Ringgit Malaysia.

Pecahan nominal uang terkecil kita yang berbentuk koin adalah seratus rupiah. Sayangnya pecahan berbentuk koin recehan ini jarang dijumpai dipasaran. Kita aka mendapat kembalian berupa '*permen*' jika nilainya Rp.100 sampai Rp.1000. Pengembalian model begini hampir dilakukan oleh semua pedagang, mulai kios kecil dipelosok desa sampai mal-mal besar dan mewah di kota besar.

Sadar atau tidak, cara seperti itu merupakan bentuk kedzoliman dan kecurangan dalam perdagangan. Konsumen tidak menghendaki beli permen, tapi dipaksa untuk menerima kenyataan pengembalian uang berupa permen. Katanya uang receh tidak ada. Anehnya juga di mal-mal besar banyak membuat promosi dengan meletakkan harga seperti, 99.99 padahal bentuk uang seperti itu tidak ada. Kenapa tidak dibulatkan seratus ribu atau sembilan puluh sembilan ribu rupiah. Kan pengembalian satu rupiah tidak ada. Berarti ini sudah merampok uang konsumen. Sungguh ironi, inilah yang namanya pembeli itu raja, tapi faktanya raja yang dibodohi dan dipecundangi.

Sudah saatnya nilai mata uang rupiah disederhanakan, dipangkas dan dibuat sedikit masuk akal. Agar tidak terlalu bombastis dan mengagetkan bagi orang asing yang berada di Indonesia. Hidupkan pecahan terkecil satu sen, untuk tidak mencurangi konsumen. Dengan begitu konsumen tidak merasa dirugikan.

Kebiasaan pengembalian berupa permen sudah lama, dan pernah dijadikan sindiran dalam bentuk iklan. Digambarkan pengembalian uang receh dinegara-negara lain berupa uang koin, tetapi pengembalian uang di Indonesia berupa permen. Sungguh lucu dan menohok penguasa pembuat kebijakan. Selama ini tutup mata seakan tidak tahu dan tidak mahu tahu, serta tidak ada usaha untuk membetulkan kedzoliman dalam bentuk nilai mata uang.

Pro-kontra, resiko sudah pasti ada, tentangan juga akan datang terutama dari mereka yang merasa

dirugikan. Kemungkinan orang-orang kaya. Tapi saya yakin gejolak ini tidak akan lama, sekitar tiga bulan, enam bulan atau satu tahun sudah kembali normal, sebab sudah menyesuaikan diri.

Pemangkasan itu dimulai dari pecahan uang Rp 100.00 menjadi Rp 1 sen, Rp 1000,00 menjadi Rp 1.00, Rp 1000.000.00 menjadi Rp 1000.00. Toh selama ini sebagian orang sudah terbiasa menyebut uang satu juta dengan sebutan seribu.

Cara pemangkasan disesuaikan dengan nilai harga emas. Jadi yang mempunyai simpanan uang tidak perlu dirugikan. Uang yang dimiliki jika dibeli emas mendapat berapa. Atau uang kita disetarakan dengan nilai mata uang negara lain. Jika ada yang merasa dirugikan itu sudah bagian dari resiko perubahan. Dan yang merasa dirugikan sudah pasti orang kaya yang tamak dan kikir, sebab banyak uang, sedang bagi orang kecil dan miskin tidak ada efeknya justru menjadi lebih senang.

Dengan pemangkasan nilai mata uang akan terjadi kesejahteraan dan ketenteraman dalam bertransaksi. Sehingga perlahan tapi pasti kamakmuran juga akan tercapai seiring berjalannya waktu dan hilangnya segala bentuk kezoliman dalam perekonomian. Yakinlah itu!.

10. Sejahterakan Rakyat Dan Jangan Dipersulit

Nasib rakyat kecil Indonesia sejak jaman kolonial penjajahan sampai jaman merdeka dan berganti beberapa rezim masih belum merasakan nikmatnya kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Kondisi seperti ini berlangsung ratusan tahun, membuat penderitaan dan hinaan itu sudah menjadi

makanan sehari-hari sehingga hal itu suda menjadi biasa dan bukan derita.

Bangsa kolonial menjajah untuk meraih hasil bumi dan rempah-rempah dari bumi nusantara. Berbagai perlakuan bengis nan kejam diterapkan terhadap rakyat Indonesia. Perampasan tanah, tanam paksa, kerja rodi, dengan tidak ada gaji, bahkan jika rakyat bekerja tidak serius akan dihukum, entah dicambuk, tidak dikasih makan atau berbagai hukuman lain.

Model penjajahan yang mau enak dan menangnya sendiri diatas penderitaan orang lain, kini sepertinya diteruskan oleh para penguasa. Mulai anggota DPR, pegawai negreri dan para pemangku kuasa negeri Indonesia. Mereka bertindak layaknya bos.

Jika kita mendatangi kantor mereka untuk urusan surat-menyurat atau urusan birokrasi yang lain. Kalau kita tidak kenal dengan orang dalam (yang dikantor) maka kita akan dipandang sebelah mata, tidak dihargai. Urusan kita akan lambat, walau mereka tidak ada kerja, tapi mereka akan mengatakan masih sibuk banyak kerja. Minggu depan baru bisa diambil.

Sudah menjadi tradisi dan semacam slogan dinegeri ini. *Kalau urusan bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah.* Jargon itu kuat melekat dalam ruang-ruang dan gedung-gedung perkantoran milik pemerintah. Yang disitu kita jumpai orang-orang dengan baju seragam kebanggaan.

Orang-oramg berseragam tersebut sibuk dengan urusanya sendiri. Ada yang sms-an, bbm-an, whatsapp-an, baca internet, baca koran, ngemil, pacaran sesama satu ruang, asyik telpon dan

berbagai kesibukan pribadi yang tidak ada sangkut-pautnya dengan urusan kerja kantor.

Jika kita menemui mereka untuk urusan administrasi, ada saja alasan mereka untuk mengelak dari menangani tanggung jawabnya. Kalau tidak kenal dan tidak ada uang jangan harap urusan akan kelar dalam hitungan jam, walau jika hal itu dikerjakan tidak sampai memakan waktu 30 menit.

Sakit dan jengkel kita, jika berurusan birokrasi dinegeri ini. Rakyat dibuat tersiksa, geram, dan menderita. Saking putus asanya rakyat ambil jalan pintas dengan menyerahkan uang kepada orang dalam untuk diselesaikan urusan birokasinya. Rakyat tinggal terima bersih, tahu-tahu jadi. Kondisi dan kebiasaan seperti ini jadi membudaya dan menjadi simbiosis mutualis. *Saling terkait saling membutuhkan dan menjadi lingkaran setan. Sehingga ada yang mengatakan “birokrasi itu amoral”.*

Tolong kepada pemangku kuasa negara Indonesia, hentikan budaya seperi itu. Itu salah satu bentuk pembodohan dan penyuburan kkn (kolusi, korupsi dan nepotisme). Rakyat sudah terlalu jauh menderita jagan dibuat sengsara. Bekerjalah dengan profesoinal, jujur dan amanah. Kamu sudah medapat gaji dari negara yang itu berasal dari uang rakyat.

Bantulah rakyat untuk menjalani hidup menuju sejahtera dengan melayani rakyat dan mendahulukan kepentingan rakyat. Jangan dipersulit, permudah urusan mereka. Ingat barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusan kita. Apalagi anda-anda yang menjadi pegawai pemerintah, mendapat gaji dan berbagai fasilitas kemudahan lain yang disediakan

pemerintah. Sudah seharusnya dan hukumnya wajib, anda melayani rakyat dengan mempermudah.

11. Hapus UN, UAN, UNAS Serta Ujian Nasional Yang Lain

Salah satu biang kerok kegagalan pendidikan Indonesia adalah adanya UN, UAN, UNAS atau entah apa namanya, yang intinya mengadakan ujian yang menjadi syarat kelulusan dan itu bersifat nasional, sama-rata seluruh siswa di Indonesia. Tidak peduli di pusat Jakarta atau di pedalaman Papua, semua soalnya sama.

UAN telah mengubah paradigma pendidikan dari mencari ilmu, mengembangkan bakat, menambah ketrampilan, dan memperbaiki diri, berubah menjadi berburu nilai berupa angka-angka yang tertuang dalam selebar kertas bernama ijazah.

Akhlik, moralitas, budipekerti sudah hilang dari sistem pendidikan yang ada. Nilai angka yang bagus, uang yang cukup, dijamin bisa masuk sekolah favorit yang bergengsi. Langkah selanjutnya para siswa dituntut untuk menguasai mata pelajaran yang kadang guru-gurunya jauh dari standart kualitas seorang pendidik.

Akhirnya siswa-siswa kelabakan mencari tempat bimbingan belajar guna mendongkrak ketinggalan pelajaran di sekolah dan yang pasti demi meraih nilai angka tertinggi. Substansi pelajaran tidak menjadi perhatian apalagi pendalaman dan penelitian, yang penting lulus dengan nilai baik.

Efek dari itu, menjamurlah lembaga-lembaga bimbingan belajar yang beraneka macam bentuk dan trik pembelajaran. Semuanya juga demi meraih nilai

kelulusan. Walau untuk ikut bimbel peserta harus membayar sangat mahal. Melebihi biaya sekolah bahkan lebih mahal dari biaya kuliah, bimbel tetap dibanjiri peserta. Padahal mengajari siswa adalah tugas guru. Tugas guru menjadi lebih ringan sebab siswanya sudah ikut bimbel diluar.

Begitu juga pihak sekolah, akan berusaha sedaya upaya untuk seluruh siswanya bisa lulus 100%. Berbagai cara akan ditempuh, cara wajar dan halal dirasa kurang meyakinkan, maka ditempuhlah cara tidak wajar dan menghalalkan segala cara. Bagi-bagi bocoran jawaban, sms berantai, saling contek, jual-beli jawaban, itu diantara modus biar lulus.

Bagaimana dengan siswa-siswa luar jawa yang sekolahnya jauh dari standart layak? Mereka masuk sekolah juga belum tentu setiap hari, sebab lokasinya jauh atau gurunya yang jarang datang. Bagaimana siswa-siswa yang kondisinya seperti ini disamakan dengan siswa-siswa yang hidup di kota besar, yang disekolahnya full fasilitas, lebih dari itu siswa di kota juga ikut bimbel.

Sungguh tidak masuk akal, kalau program UN, UAN, UNAS akan terus dilaksanakan untuk menjadi atau menentukan syarat kelulusan. Hapuskan UN, UAN, UNAS, ganti dengan sistem baru yang tidak memberatkan siswa dan orang tuanya. Rombak sistem dan model pendidikan untuk lebih menekankan kepada perbaikan moral, budi pekerti, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan bakat, potensi dan segala bentuk kelebihan siswa yang lain, demi kebaikan siswa dan kemajuan negara.

12. Galakkan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Perkembangan dunia abad 21, berkembang sangat pesat beberapa dekade silam, dunia komunikasi masih sebatas penggunaan telepon duduk atau telepon rumah, termasuk didalamnya telegram dan faxsimili. kemudian berkembang dengan penggunaan pager, baru memasuki era booming penggunaan telepon seluler, mobile phone, handphone, telepon genggam.

Jalur komunikasi dan interaksi di dunia maya berkembang berkat penemuan jaringan internet. Dunia teknologi komunikasi dan informasi merupakan yang paling cepat dalam pengembangan dan penemuan teknologi hal-hal yang baru.

Handphone yang pada awalnya sebatas untuk penggunaan telepon baik menerima atau menghubungi, berkembang menjadi sarana sosial media. Handphone juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas camera, perekam suara, perekam gambar sekaligus pemutarnya (video), radio fm, televisi, bluetooth dan berbagai fasilitas hiburan yang lain.

Berbagai aplikasi dan fitur komunikasi di handphone juga menjamur. Seperti facebook, twiter, whatsapp, BBM, line, instagram dan berbagai sarana komunikasi lainnya yang semuanya berbasis menggunakan internet. Sayangnya dari semua penemuan-penemuan itu tidak satupun yang diciptakan dari anak bangsa. Kita hanya puas sebagai pengguna.

Lebih dari itu, rakyat Indonesia termasuk bangsa pasar yang super empuk, gurih dan lezat. Betapa tidak jumlah penduduk terbesar nomor empat

didunia, sudah pasti pasar terbuka luas dan lebar-lebar. Harga handphone diobral super murah, walau kualitas kw-3 sampai kw-7, yang penting bisa untuk bergaya dan narsis. Dan terbukti berdasar survey rakyat kita tercatat sebagai pengguna sarana sosmed paling narsis didunia. *Waaaauw!*

Harusnya pemerintah mulai merubah wawasan dan menggalakkan kepada generasi muda untuk lebih menekuni dan memperdalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, daripada sibuk ikut bimbingan belajar sana-sini hanya untuk mengejar nilai berupa angka-angka yang manfaatnya sama sekali

tidak ada kecuali sekedar sebagai persyaratan masuk kuliah, mendapat kerja, tapi nol skill yang itu nyata dibutuhkan dunia.

Untuk menekuni dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak perlu harus berpendidikan S1 dan batasan umur tertentu. Semua rakyat Indonesia yang mempunyai minat dan bakat dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, negara wajib merekrut mereka. Memfasilitasi dan menjamin kebutuhan sehari-harinya. Buatlah wadah khusus sebagai kampus yang sekaligus sebagai laboratorium untuk mengembangkan bakat mereka guna menciptakan penemuan-penemuan baru yang bisa membawa manfaat untuk orang banyak.

Dengan begitu negara akan maju, diperhitungkan, dan disegani dikancah internasional. Rakyat juga dihargai dan bangga dengan penemuan dan produk-produk anak negri sendiri. Indonesia akan menjadi kiblat untuk pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi didunia, sejak abad 21 dan abad-abad kedepan. Sebab Indonesia kaya akan sumber daya manusia dan kaya sumber daya alam. Sudah seharusnya kita ,memanfaatkan anugerah kelebihan ini untuk mensyukuri dan menggali ciptaanNYA untuk manfaat dan kesejahteraan bersama.

13. Dirikan Sekolah Unggulan Disetiap Daerah Tingkat Dua, Dirikan Universitas Unggulan Disetiap Provinsi

Sebagai kelanjutan dan penjangkaran bibit-bibit unggul untuk difasilitasi dan dikembangkan segala potensi yang dimilikinya. Setiap daerah tingkat dua (kabupaten/kota) diharuskan mendirikan sekolah unggulan. Sekolah ini setingkat SMP dan SMA yang dijadikan satu lokasi, sekaligus satu jenjang. Sistem pembelajaran di sekolah unggulan berasrama penuh.

Penjangkaran siswa sekolah unggulan berasal dari sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Sistem yang digunakan setiap sekolah/madrasah diharuskan menyerahkan data siswa terbaik rangking 1-5 dikelas sejak kelas IV sampai kelas VI. Pengambilan lima siswa terbaik ini jika dalam satu kelas siswanya ada 30 siswa, tapi jika siswanya sekitar 20 anak, hanya 3 siswa (rangking 1-3).

Pada catur wulan menjelang berakhir masa study, siswa-siswa dari seluruh sekolah/madrasah tadi dikumpulkan dan dikarantina untuk dikasih matreri persiapan masuk sekolah unggulan. Setelah empat bulan siswa dikarantina, kemudian mereka diadakan tes seleksi untuk memasuki sekolah unggulan. Dari beberapa siswa yang dikarantina ini

akan diambil sekitar 75 atau seratus siswa saja, tergantung sikon yang ada.

Siswa yang tidak lolos seleksi akan disalurkan kesekolah negeri yang ada didekat rumah siswa atau dimana keinginan siswa ingin bersekolah. Siswa yang lolos akan diasramakan untuk menempuh pendidikannya. Lama belajar disekolah unggulan sekitar lima tahun dan tidak lebih. Bisa diperpendek tergantung kecerdasan dan kedewasaan siswa.

Sistem dan kurikulum bisa dibuat yang baru sesuai kurikulum berstandart Internasional dengan tidak meninggalkan muatan lokal. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris, jika ada jurusan agama Islam, maka yang mengambil jurusan ini wajib menguasai bahasa Arab.

Hari belajar Senin sampai Jum'at dari pagi sampai petang. Hari Sabtu dan Minggu hari pengembangan ekstra kurikuler untuk mengembangkan bakat dan ketrampilan skil kehidupan. Sekolah ini gratis tidak dipungut biaya sama sekali, justru kalau memungkinkan siswa akan mendapat uang saku.

Sekolah unggulan juga melatih siswa untuk berorganisasi dan dididik semi militer dan intelijen, sehingga kedepan akan menjadi pemimpin yang siap terjun dimasyarakat untuk membangun negara dan bangsa.

Lulusan dari sekolah unggulan bisa terus masuk universitas unggulan yang ada ditingkat provinsi. Universitas unggulan merupakan kelanjutan dari penjarangan bibit-bibit unggul. Universitas unggulan hanya berada ditiap-tiap provinsi.

Pendirian Universitas unggulan, tidak harus berada di Ibu Kota provinsi, tapi bisa saja berada dimana saja asalkan tetap dalam satu provinsi. Mahasiswa yang belajar disini tidak harus berasal dari siswa sekolah unggulan saja. Tetapi bisa berasal dari beberapa lulusan sekolah yang ada dalam satu provinsi.

Universitas unggulan juga mempunyai asrama, tetapi tidak diwajibkan mahasiswanya tinggal diasrama. Terpenting para mahasiswa ditargetkan mampu menguasai materi atau membuat satu kajian dan penelitian yang baru yang orang lain belum pernah melakukan pekerjaan yang sama.

Standart Universitas unggulan juga berstandart Internasional, bahasa yang dipakai juga bahasa Inggris, dan bahasa Arab bagi yang mengambil study Islam. Universitas unggulan bisa gratis dengan persyaratan tertentu. Fasilitas di Universitas unggulan juga lengkap dan berstandart Internasional. Universitas unggulan bekerja sama dengan beberapa universitas diluar negeri dengan sesungguhnya. Kerjasama bisa berbentuk pertukaran mahasiswa, dosen atau melakukan riset bersama.

14. Kembalikan Nama Sekolah Kejuruan Kenama Semula

Entah sejak jaman menteri siapa nama sekolah kejuruan dijadikan satu atau dirubah dengan nama SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Padahal sekolah-sekolah ini bukan satu jurusan, ada Sekolah Teknologi Menengah (STM), Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), dan beberapa sekolah kejuruan yang lain.

Begitu juga dengan tingkatan sekolah, sekarang ada kelas 12/XII (dua belas). Fantastis, padahal mereka tidak sekolah pada satu sekolahan, tetapi tiba-tiba naik kelas delapan, atau kelas dua belas. Entah ini juga ide menteri siapa yang suka *membombastiskan* penyebutan, sebagaimana mata uang Rupiah yang besar sebutanya, tapi kecil nilainya. Inilah Indonesia, maz bro.

Kebanyakan masyarakat dibuat bingung dengan pemberian nama sekolah SMK. Hanya para guru dan yang berhubungan dengan yang berkenaan akan paham, SMK I itu STM atau SMEA. Begitu juga tingkatan kelas juga membingungkan. Ada kelas dua belas, padahal Sekolah Dasar kelas tertinggi hanya sampai kelas enam, Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya sampai kelas tiga, begitu juga Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya sampai kelas tga.

Untuk tidak membuat rancu dan membingungkan masyarakat mengenai nama sekolah kejuruan, mohon nama sekolah dikembalikan kenama semula. Jika itu STM kembalikan kenama STM begitu juga yang lain kembalikan kenama semula seperti SMEA, SMKK dan SMK yang lain. Untuk tingkatan kelas di SMA juga kembalikan ketingkat semula, dari kelas satu sampai kelas enam untuk SD, atau kelas satu sampai kelas tiga untuk SMP dan SMA.

15. Lindungi Rakyat Dari Kecurangan Pedagang Dan Produsen

'Pembeli Adalah Raja' ugkapan itu sebetulnya tidak tepat, sebab seorang raja bisa memerintahkan kepada rakyat dan bawahannya. Sedangkan pembeli tidak bisa berbuat apa-apa kecuali sekedar memilih

barang yang diinginkannya, itupun kalau ada barangnya. Sedang penentuan harga penjuallah yang menentukan.

Pembeli adalah raja yang lemah dan mudah ditipu. Banyak barang-barang tidak layak yang dijual dengan harga tinggi, tapi pembeli tidak tahu kalau barang tersebut rusak, busuk atau rekondisi. Kondisi seperti ini banyak terjadi disaentero penjuru negeri Indonesia.

Lagi-lagi mental penjajah Belanda masih menyusupi dan merasuki mental sebagian rakyat Indonesia. Ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan orang lain. Berulang kali ditayangkan ditelevisi tentang makanan yang tidak layak konsumsi, ikan laut busuk, daging ayam, sapi, babi, celeng. Minuman, semua makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi disulap menjadi barang segar. Menipu konsumen, itu mental diantara beberapa pedagang kita.

Rakyat tidak tahu sedang pemerintah melalui pejabat berwenang membisu dan tidak berbuat apa-apa. Tidak ada pencegahan, pengecekan, pengawasan dan pelarangan. Pemerintah sekedar basa-basi melakukan sidak dan pengecekan ketika menjelang perayaan hari raya, itupun sebatas mengecek barang-barang kedaluwarsa.

Harusnya pemerintah menggunakan kuasanya untuk mengecek setiap saat semua barang yang dijual. Tentang kelayakan, harga, dan pertanggung jawaban produsen dan pedagang jika terjadi sesuatu pada konsumen yang telah membeli atau menggunakan barangnya. Dengan begitu rakyat menjadi tenang dan nyaman jika membeli barang-

barang sebab tidak ditipu oleh pedagang dan produsen.

Pengecekan itu juga dikenakan kepada makanan dan obat-obatan yang dijual. dipasaran Sampelnya diminta kemudian dicek kadarnya adakah zart-zat yang berbahaya bagi kesehatan, apakah barang tersebut sudah busuk tapi direkondisikan, atau barang segar tapi dikasih bahan berbahaya, bahkan kehalalannya juga harus dipastikan sebab mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, yang diharamkan memakan barang haram.

Begitu juga terhadap model-model investasi yang tidak jelas dan tidak masuk akal. Pemerintah harusnya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap hal-hal ini sebelum jauh terjadi dan menimbulkan banyak korban.

Lowonga kerja yang menipu pelamar, belum apa-apa pelamar (pencari kerja) sudah diminta uang ini-itu. Harusnya pemerintah tegas melarang praktik penipuan seperti ini, andai benar kerja beneran harusnya pelamar tidak perlu mengeluarkan uang, sebab mereka mecari kerja untuk mendapat uang, bukan harus mengeluarkan uang, apapun alasannya.

Bahkan pemerintah harusnya juga melarang bursa kerja yang mengharuskan pengunjungnya membayar. Ini satu praktik pemerasan terselubung terhadap rakyat yang lemah. Kalau mahu buat bursa ya buat saja jangan membebani rakyat dengan pungutan begitu, inikan bukan pertunjukan hiburan yang dengan suka-rela pengunjung membayar tiket masuk.

Lindungilah rakyat dari segala bentuk, pemerasan, kecurangan, penipuan dan pamaksaan

dari pihak manapun. Baik dari pedagang, produsen bahkan dari oknum pemerintah sekalipun. Kepada siapa lagi rakyat akan mengadu dan meminta perlindungan? YLKI hanya sebatas mendapat pengaduan, tapi pemerintah harus melakukan pencegahan, penindakan dan pelarangan semua yang merugikan rakyat. Buat rakyat aman dan nyaman.

16. Minimalkan Kunjungan Keluar Negeri Anggota DPR

Kunjungan keluar negeri bagi para anggota DPR seakan sudah menjadi menu dan jadwal wajib untuk diagendakan. Sebuah alasan untuk nglencer keluar negeri dengan biaya negara, selain gratis, bisa mendapat uang saku yang lebih dari cukup. Bisa bawa istri atau 'maaf' bisa beli perempuan disana untuk melepas syahwat birahi.

Bagi kebanyakan rakyat entah ada efek dan manfaatnya apa tidak dari hasil kunjungan keluar negeri para anggota DPR yang sudah banyak dilakukan berulang kali dengan menghabiskan uang negara yang juga sangat banyak sekali. Konon hampir semua alasan yang diajukan untuk bisa berpelesiran keluar negeri tersebut adalah study banding.

Anehnya tempat-tempat yang dijadikan obyek study banding adalah negara-negara yang tidak sebanding, dalam arti level dan kasusnya tidak sama, sehingga dari segi apanya yang dibandingkan. Bahkan sering terjadi negara yang dituju dan akan dipelajari tidak siap, sebab tidak tahu apa temanya yang akan dipelajari.

Kenyataan yang dijumpai study banding yang dijadikan alasan untuk mengajukan proposal kunjungan kerja keluar negeri tidak sesuai dengan alasan yang diajukan. Mereka lebih terkesan refreshing, cuci mata, makan angin, berbelanja dan hura-hura daripada melakukan tugas negara demi rakyat.

Pernah ada kunjungan ke Jerman, ternyata disana tidak terjadi proses study banding, justru mereka para anggota DPR tersebut tertangkap mahasiswa Indonesia sedang sibuk berbelanja. Sehingga mahasiswa Indonesia yang di Jerman, sempat menolak mereka. Teman-teman PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) Jerman juga melakukan protes yang sama.

Sungguh sangat keterlaluan kelakuan para anggota DPR yang seperti itu. Memboroskan banyak uang rakyat untuk memenuhi hedonisme nafsu serakah

mereka. Uang yang dihaburkan itu cukup untuk membiayahi beberapa mahasiswa untuk menyelesaikan study S1 nya. Atau membiayahi operasi puluhan orang miskin yang sedang sakit, dapat membeli berpuluh-puluh ton beras yang bisa dibagikan kepada orang-orang miskin.

Sebagai rakyat kecil yang hidup jauh dari Ibu Kota, saya tidak tahu dan tidak merasakan efek dan manfaat dari kunjungan kerja keluar negeri para anggota DPR yang terhormat. Bahkan sampai habis masa jabatan sebagai anggota DPR tetap saja tidak ada perubahan. Atau mungkin saya yang tidak tahu dan tidak sempat tahu.

Sebagai cara efektif untuk menggali potensi dan kelebihan negara asing, para anggota DPR atau semua pejabat terkait bisa mengundang para mahasiswa yang kuliah dinegara dimana yang akan dijadikan sebagai perbandingan. Saya yakin informasi mahasiswa lebih komplit dan lebih akurat, sebab para mahasiswa mejalani kehidupan secara langsung dinegara bersangkutan.

Dengan begitu akan menghemat dana, energi dan waktu. Para anggota DPR tetap terhormat, teman-teman mahasiswa dihargai dan semakin memacu untuk mentransfer kelebihan negara yang ditempati. Untuk negara Malaysia saya siap mempresentasikan dari banyak seginya. Setidaknya saya pernah kuliah, dan bekerja disebuah NGO Malaysia, banyak relasi dari orang biasa sampai pejabat tinggi Malaysia.

Mumpung para anggota DPR belum banyak program, tolong untuk rencana program kunjungan kerja keluar negeri mohon dikurangi atau kalau bisa ditiadakan. Sebagai gantinya undang para mahasiswa yang sedang atau pernah kuliah dinegara dimana yang akan dijadikan perbandingan dan pelajaran.

17. Hentikan/Hapuskan 'KARTU SAKTI' (KIS/Kartu Indonesia Sehat, KIP/Kartu Indonesia Pintar, KKS/Kartu keluarga Sejahtera, Dan Macam-Macam Kartu Yang Sifatnya Sering Merepotkan dan Membingungkan)

Dalam setiap kampanyenya Jokowi selalu memamerkan beberapa 'kartu sakti' dan ini menjadi program andalan Jokowi untuk memikat rakyat.

Mungkin dalam bayangan benak Jokowi, dengan memiliki bermacam-macam kartu tersebut rakyat akan terjamin kesejahteraannya dan mudah dalam penggunaannya.

Fakta dilapangan banyak kartu tersebut tidak tepat sasaran dengan implementasi penanganan yang kurang profesional. Mungkin hanya daerah-daerah tertentu yang kondisinya secara umum mudah terdeski, seperti daerah bekas bencana yang langsung dikasih bermacam-macam kartu sakti tersebut.

Kartu-kartu tersebut membingungkan rakyat jelata. Bagaimana cara untuk mendapat kartu tersebut, apa harus mendaftarkan atau akan didaftarkan. Kalau mendaftarkan ke instansi apa, dan kalau di daftar siapa yang akan mendaftarkan. Kemudian apa syarat, kriteria, dan bagaimana penggunaannya.

Keyakinan saya program pembuatan kartu tersebut memakan banyak biaya. Biaya pembuatan kartu mungkin cukup untuk memberi beasiswa 1000 siswa untuk melanjutkan study ke perguruan tinggi. Begitu juga cukup untuk biaya operasi ratusan ribu orang yang tidak mampu untuk melakukan operasi penyakit yang tengah dideritanya.

Mengingat dan mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang, sebaiknya pelaksanaan program ‘kartu sakti’ tersebut dihentikan atau dihapuskan. Selain pembuatannya memakan banyak biaya, bertele-tele dan yang pasti tidak simple.

Karena itu ganti dengan pemaksimalan fungsi KTP. KTP harusnya bisa memuat data-data rakyat secara akurat. Berdayakan SDM pemerintahan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan profesional.

Sehingga data rakyat dari segi apapun bisa terdeteksi. Turun lapangan ambil data mereka dengan amanah, jujur dan benar. Dengan begitu 'kartu sakti' tidak diperlukan lagi, cukup dengan KTP saja beres!.

Terus dampingi rakyat yang memerlukan bantuan dari segi apapun. Jangan biarkan rakyat menderita karena sakit atau kekurangan. Jangan biarkan anak-anak tidak melanjutkan pendidikan karena alasan ketiadaan biaya. Mereka tidak butuh 'kartu sakti', tapi aksi nyata yang mudah dan tidak membingungkan.

Kalau memerlukan bantuan dan konsultan saya siap turun tangan, secara langsung untuk menangani program pengganti 'kartu sakti' ini. Gitu aja koq repot, pakai kartu sakti segala.

18. Gratiskan Biaya Pengobatan, Perawatan Di Puskesmas Atau Rumah Sakit Kelas 3 (Milik Pemerintah).

Tidak perlu membawa kartu sakti, kartu BPJS, KIS atau apapun nama kartunya, cukup dengan membawa KTP untuk mendapat pengobatan dan perawatan di rumah sakit atau puskesmas kelas tiga atau milik pemerintahan. Mendapat pengobatan dan perawatan di rumah sakit, adalah hak rakyat. Negara harusnya memperhatikan ini.

Selama ini hanya para pegawai negeri (pns, tni dan polri) dan keluarganya yang mendapat kemudahan untuk mendapat pengobatan. Sedang bagi rakyat jelata akan mendapat kesulitan untuk mendapat pengobatan dan perawatan. Sehingga ada ungkapan. *Di Indonesia orang miskin dilarang sakit*, sebab tidak mampu untuk membayar biaya dokter,

biaya operasi, biaya opname dan perawatan, biaya membeli obat, dan beberapa biaya yang lain.

Sungguh tidak adil dan bagian dari bentuk kedzoliman dinegeri ini dengan membiarkan orang miskin, rakyat jelata yang tidak mampu berobat. Orang-orang miskin dan rakyat jelata, tidak punya gaji, tidak mendapat fasilitas dari negara tapi sama-sama membayar pajak ke negara. Sedang para pegawai negeri pns, tni, dan polri yang setiap bulan mendapat gaji, mendapat banyak fasilitas negara begitu mudah untuk berobat.

Kalau semua pejabat dan pemegang kuasa bertindak jujur, adil dan amanah, negara ini mampu menggratiskan seluruh biaya pesakit. Ini negara kaya, buktinya para pegawai negeri yang mendapat gaji, tunjangan dan berbagai fasilitas negara gratis mendapat biaya pengobatan. Tidak ada orang yang mau sakit, dan menderita di rumah sakit.

Banyak solusi untuk mengatasi bagaimana cara menggratiskan pengobatan ini. Salah satunya adalah buka sebanyak-banyaknya peluang kuliah di fakultas kedokteran. Gratiskan para mahasiswa kedokteran dengan semacam ikatan dinas, setelah lulus harus mengabdikan kepada rakyat dan negara.

Atau dengan meminta bantuan kepada orang-orang kaya, perusahaan dan beberapa lembaga donor untuk menyisihkan uangnya guna dikumpulkan kusus untuk membiayahi orang-orang sakit yang memerlukan bantuan biaya keuangan. Uang ini dibuatkan rekening kusus dan dikelola juga dimanfaatkan kusus untuk biaya pengobatan orang-orang miskin dan semua yang membutuhkan.

Dengan begitu tidak ada orang sakit yang tidak mendapat pengobatan dan perawatan. Sehat adalah bagian dari nikmat besar yang harus disyukuri dan dimanfaatkan untuk berbuat baik, membantu sesama dan untuk membangun negara dengan sehat lahir batin.

19. Ganti Dan Pecat Pegawai Negeri (PNS, TNI, POLRI), Wakil Rakyat Yang Tidak Produktif, Tidak Disiplin, Tidak Punya Integritas Dan Tidak Melayani Rakyat.

Sering kita jumpai para pegawai negeri berkeliaran pada jam-jam kerja. Mereka ada di mal-mal, rumah makan, pasar, penjual akik, jalanan, dan beberapa tempat yang lain. Mereka masih mengenakan seragam, entah itu sedang dinas luar atau ijin atau menuruti mental dan karakternya.

Sebagai rakyat biasa, saya sering bertanya-tanya tentang kelakuan beberapa oknum pegawai tersebut. Apakah mereka sedang tidak kerja? Atau ijin ada keperluan? Atau memang begitu kerjaannya? Betapa enaknya mereka, kerja santai, bisa keluyuran, dikantor banyak fasilitas, makanan, senda gurau dan yang pasti setiap bulan gajian.

Dalam satu tahun mereka menerima gaji 13 (tiga belas) kali, atau bisa jadi 14 (empat belas) kali dengan adanya tunjangan hari raya, padahal dalam satu tahun hanya ada 12 bulan, dan yang membuat 'ngiler' hampir tiap tahun gaji mereka naik. Belum lagi berbagai fasilitas dan kemudahan yang dia dapat, yang konon katanya mereka adalah 'abdi negara'.

Jika kita mendatangi kantor-kantor dinas pemerintah, disana akan kita jumpai orang-orang

berseragam yang hilir mudik entah apa yang mereka kerjakan. Ada juga yang asyik bermain handphone, entah sms, fb, wa, main game dan sejenisnya. Ada juga yang asyik membaca koran bahkan ada yang pacaran, ironisnya mereka dirumah masing-masing punya pasangan resmi (suami/istri).

Dan jika kita mengurus surat-surat keadministrasian, mereka seakan tergopoh-gapah sok sibuk dan sok kerja keras. Sehingga urusan kita akan disuruh ditinggal, minggu depan baru bisa diambil. Padahal kalau betul-betul kerja profesional tidak sampai 15 menit selesai. Mereka selalu ada alasan. Kita selalu dirugikan, rugi waktu, tenaga dan dana.

Minggu depannya waktu kita mendatangi untuk mengambil surat atau berkas kita, bisa dipastikan belum selesai atau malangnya, *'ketelesut'*, hilang atau entah dimana menaruhnya. Itulah pengalaman yang biasa saya alami lebih dari satu kali, dengan berbeda instansi. Semua sama etos kerjanya.

Pengalaman banyak orang khususnya rakyat biasa yang sering dipersulit dan diperlakukan semena-mena oleh beberapa oknum pegawai negeri, harusnya pemerintah mengevaluasi kinerja mereka. Buatlah lembaga pengaduan yang akan mengusut oknum nakal tersebut.

Jika tidak ada perubahan, ganti dan pecat mereka. Masih banyak generasi muda yang ingin bekerja apalagi menjadi pegawai negeri. Pegawai negeri yang tidak disiplin, tidak melayani, mempersulit, tidak kooperatif dan tidak produktif harus dipecat. Jangan dikasih toleransi, sebab mereka sudah disumpah, makan gaji dan mendapat fasilitas yang dibiayahi dari uang rakyat.

20. Jadikan Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Bisnis Dan Bahasa Pergaulan

Bahasa daerah adalah ‘bahasa ibu’, bahasa Indonesia adalah ‘bahasa pemersatu bangsa, bahasa nasional, bahasa sumpah pemuda, bahasa administrasi dan pemerintahan’, bahasa Inggris adalah ‘bahasa Internasional’, bahasa Arab adalah bahasa agama dan bahasa Al-Quran.

Setiap anak daerah yang berasal dari suku tertentu wajib menguasai bahasa ibunya atau bahasa sukunya. Hal ini untuk menunjukkan identitas aslinya. Bukan untuk memecah belah atau menonjolkan kedaerahannya, tetapi untuk melestarikan budaya yang sudah turun-temurun.

Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan pemersatu sesama anak bangsa yang berbeda suku dan bahasa. Bahasa Indonesia digunakan untuk administrasi pemerintahan, bahasa kenegaraan dan bahasa sekolahan secara umum. Setiap warga negara Indonesia wajib menguasai dan bisa bertutur bahasa dan menulis dengan bahasa Indonesia.

Begitu juga kepada orang asing yang akan mengajukan menjadi warga negara Indonesia diantara persyaratan wajibnya adalah menguasai bahasa Indonesia baik lisan atau tulisan. Jika belum menguasai, negara tidak boleh memberikan kewarganegaraan kepada orang asing.

Ada yang berobsesi ingin menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional setidaknya bahasa Asean. Syah-syah saja, tetapi jangan bermimpi itu akan terwujud. Sebab banyak orang Indonesia sendiri tidak PD dan tidak

mensosialisasikan bahasa Indonesia ke kancah Internasional.

Lihat saja para petinggi negeri kita lebih suka menggunakan istilah-istilah asing (bahasa Inggris) dalam kosa katanya. Baik eksekutif maupun legislatif. Kecuali presiden Jokowi yang hampir tidak pernah berkosa kata asing. Begitu juga para artis, mungkin terasa lebih 'keren' jika dalam setiap kata-katanya disisipi kosa kata asing.

Kecuali Syahrini yang memang tidak mampu berbahasa asing, tapi kadang memaksakan diri, jadinya aneh kaya Vikinisasi. Media televisi yang sering mempromosikan kosa kata dan istilah-istilah asing (khususnya Inggris) dan ini membias kepada pemirsa televisi. Jadi hentikan mimpi besar menginternasionalkan bahasa Indonesia.

Riil bahasa Inggrislah yang menjadi bahasa Internasional. Kalau kita ingin melanjutkan study keluar negeri bahasa Inggris menjadi persyaratan utama. Untuk memperoleh beasiswa Internasional bahasa Inggris juga menjadi persyaratan. Kalau kita ingin memperbanyak pergaulan Internasional sudah pasti bahasa Inggris yang kita gunakan. Pendek kata bahasa Inggris adalah bahasa pergaulan Internasional.

Jadi kalau rakyat Indonesia ingin maju dalam peradaban dunia, wajib juga menguasai bahasa Inggris. Negara wajib memfasilitasi dan membantu kemudahan kepada rakyat untuk mempelajari dan menguasai bahasa Inggris. Jadikan bahasa Inggris sebagai bahasa bisnis dan bahasa pergaulan.

Yakinlah dengan menguasai bahas Inggris akan memudahkan kita untuk meniti karir dalam

kemajuan perkembangan dunia. Kemana-mana akan lebih mudah, sebab modal bahasa sudah kita kuasai.

21. Perkuat KPK Dengan Memperbanyak Penyidik Dan Perangkatnya

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah satu-satunya lembaga negara yang sangat dipercaya oleh rakyat. Rakyat menaruh harapan penuh kepada lembaga ini untuk mengusut tuntas semua kasus korupsi di negara ini. Begitu banyak, kompleks dan menggurita korupsi dinegara ini, sehingga petugas KPK teramat sangat kewalahan untuk menanganinya.

KPK bukan hanya kewalahan mengusut kasus korupsi, tapi juga mendapat ancaman dari beberapa oknum yang mempunyai kedudukan kuat dan harta yang banyak. Orang-orang kuat ini akan menggunakan segala cara untuk membungkam KPK. Terbaru perseteruan KPK versus POLRI bukti bahwa KPK mau dihabisi.

Rakyat bergerak membela KPK, satu persatu orang KPK dipreteli. KPK menjadi musuh utama para pelaku koruptor, nyaris saja KPK lumpuh. Gerak cepat Jokowi untuk menyelamatkan KPK dengan menunjuk PLT ketua KPK sedikit banyak bisa menghadang kekuatan jahat yang ingin mengebiri KPK.

Sejarah KPK dari dulu begitu, selalu mendapat ancaman dan permusuhan dari pihak-pihak yang merasa terganggu. Karena itu hendaknya pemerintah memperkuat KPK dengan memperbanyak pegawai dan relawan.

Pegawai KPK bisa saja sebagai wakil ketua, penyidik, intelijen dan apapun namanya dilingkungan KPK. Mereka para pegawai ini bekerja penuh waktu

sebagaimana pns yang lain. Bahkan jika diperlukan bekerja lebih waktu.

Relawan KPK bisa sebagai petugas free lane yang bekerja tidak terikat waktu, tapi terikat tanggung jawab. Mereka terdiri dari semua golongan masarakat dengan persaratan tertentu. Relawan siap bekerja kapan saja sewaktu-waktu dibutuhkan atau tidak seberapa dibutuhkan. Mereka siap menjadi bember KPK.

Sekiranya perlu KPK bisa membuka cabang diseluruh daerah kabupaten kota. Dalam hal ini jika tidak memungkinkan KPK bisa kerjasama dengan lembaga yang kami bentuk yaitu KPK3 (Komisi Pemberantasan Kemiskinan, Keterbelakangan dan Kebodohan) sebagaimana yang saya tulis dalam bab lain dalam buku ini.

Perangkat yang saya maksud disini adalah segala hal yang berkenaan dengan penambahan kekuatan KPK. Bisa manusia atau apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat KPK termasuk perangkat teknologi.

Pendek kata KPK harus diperkuat melebihi lembaga yang lain. Sebab lembaga ini satu-satunya yang masih dipercaya oleh rakyat. KPK harus berperan bukan saja sebagai pemberantas korupsi, tapi juga harus berperan sebagai pencegah korupsi. Karena itu harus diperkuat untuk menyelamatkan uang rakyat biar tidak dirampok dijadikan bancakan oleh segelintir orang.

22. Batasi Tayangan Sinetron Yang Tidak Bermutu

Tayangan sinetron sudah menjadi candu dan menjadi penyakit bagi sebagian besar ibu-ibu, remaja, dan sebagian bapak-bapak. Sangat tidak mendidik, menipu dan menjerumuskan itulah sebagian besar sinetron. Lebih dari itu, sinetron membuat rumah tangga berantakan dan yang pasti membuang-buang waktu dengan nyata.

Tipikal penduduk Indonesia yang menyukai tayangan gosip, sampah dan rekayasa, sinetron menjadi suguhan yang mendapat tempat disebagian besar rakyat Indonesia. Ibu-ibu bisa melupakan atau menomor duakan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga karena sudah dimabuk sinetron.

Sungguh tayangan pembodohan dengan nyata didepan mata. Akting yang dibuat-buat, cerita yang tidak jelas ujung-pangkalnya, permusuhan, dengki, dan balas dendam, itu sebagian besar tayangan sinetron kita. Yang ditonjolkan adalah kesan glamour, menjual agama, kehidupan remaja, hampir tidak ada yang memberi tayangan edukatif atau inspiratif.

Sudah seharusnya pemerintah bertindak tegas membuat aturan dan regulasi yang memberi rambu-rambu bagaimana sinetron layak dibuat tontonan. Sinetron juga harus dibatasi penayangannya supaya tidak mengganggu aktifitas rumah tangga. Akan lebih baik kalau sinetron dibuat semacam filem pendek yang sekali tayang selesai, atau maksimal satu bulan selesai.

Kalau diterus-teruskan penayangan sinetron seperti yang sedang tayang pada saat ini, bisa dipastikan Indonesia akan semakin tenggelam dalam dunia kepura-puraan. Dunia kamufase, dunia semu yang diliputi rasa dendam dan kebencian. Tidak

rasional, menghilangkan akal sehat dan penuh tipu daya. Karena itu batasi atau hentikan.

23. Beri Slot 1 Jam – 1,5 Jam Perminggu Untuk Tayangan Edukatif

Untuk menghindari kesan monopoli dunia keartisan dan memberi kesempatan kepada mereka yang mempunyai bakat dibidang akting, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia seni hiburan, entertainmet. Sebaiknya stasiun televisi memberi peluang dan kesempatan kepada publik untuk ikut berkreasi.

Kesempatan ini bisa ditawarkan kepada sekolah-sekolah, kampus atau ormas untuk mengisi sebuah program atau acara. Bentuk acara bisa berupa drama, fragmen, filem pendek, cerita animasi atau bentuk dialog atau monolog yang lain. Buatlah tema dan tawarkan. Dari beberapa yang mengajukan akan diseleksi dengan ketat, dan yang lolos akan ditayangkan.

Pemberian slot jam tayang kepada publik, otomatis persaingan program acara akan semakin sehat. Tidak diisi oleh orang/artis itu-itu saja. Tayangan televisi tidak melulu berisi tayangan sampah gosip dan sinetron. Kalau usulan ini bisa direalisasikan, sedikit demi sedikit paradigma berfikir rakyat Indonesia akan berubah kearah yang lebih cerdas dan sehat.

24. Batasi Tayangan Infotainment Yang Mengangkat Artis Sensasional Dan Tidak Mendidik

Setali tiga uang degan tayangan sinetron, tayangan infotainment gosip mendapat tempat yang subur dihati rakyat. Sesuai dengan karakter sebagian besar rakyat Indonesia yang suka ngrumpi, gosip dan membicarakan aib orang.

Tayangan infotaintmen gosip juga tumbuh subur bak cendawan dimusim hujan. Hampir semua stasiun televisi mempunyai program ini dengan berbagai nama dan berbagai model dan bentuk tayangan. Semua intinya sama saja, membicarakan kegiatan orang yang dianggap selebritis, artis atau tokoh. Tidak peduli bersifat kebaikan, keburukan atau bahkan aib orang lain.

Meminjam istilah *Mister Doyok* alumni Universitas Lawak Srimulat pernah mengatakan 'gosip=semakin digosok semakin sip'. Terasa sedap dan mengasikkan ketika kita membincangkan aib atau kekurangan orang. Tayangan infotainmet gosip mengalahkan tayangan berita secara umum.

Rakyat penonton digiring untuk turut serta menikmati kehidupan glamour para selebritis yang bernama artis. Antara info mendidik dan inspiratif dengan info menyesatkan lebih kepada menyesatkan. Lebih parah lagi yang dijadikan obyek sekaligus subyek tayangan tidak jelas profesi keartisannya.

Sudah seharusnya pihak televisi menyeleksi siapa-siapa yang layak dijadikan bahan gosip dan sensasi. Bukan beberapa orang yang konon disebut artis tapi tidak jelas jenis kelamin keartisannya, hanya terbiasa membuat sensasi kemudian diangkat jadi pemberitaan. Orang model gini sama sekali tidak memberi inspirasi yang ada cuma sensasi, syahwat, adu domba dan permusuhan.

Stop menayangkan orag-orang seperti itu, cekal dan buang jangan lirik dan jangan dekati orang-orang macam itu. Mereka adalah karakter sampah dan mulut ember yang tidak layak ditonton apalagi jadi panutan. Tayangkan kehidupan artis yang berprestasi, memberi inspirasi dan menumbuhkan nilai-nilai positif dalam kehidupan.



Babak ke-Tujuh

Membangun Negara

1. Maksimalkan Potensi Anak Negeri

Dalam sebuah pidatonya Bung Karno mengatakan: “Berikan saya sepuluh pemuda, maka akan kuguncang dunia”. Kata-kata ini sangat bermakna dan memberi semangat kepada pemuda. Lebih dari itu Bung Karno sangat menghargai peran pemuda untuk terlibat dalam membangun negara.

Namun kenyataannya zaman sekarang kondisinya sangat menyedihkan. Banyak pemuda terlibat dalam kasus kejahatan, banyak pemuda menjadi pengangguran, banyak pemuda tidak jelas arah dan tujuannya.

Siapa yang salah dalam kasus seperti itu? Tentu sang pemimpin negara, sang pembuat dan penentu kebijakan. Mereka tidak mampu memberi pencerahan kepada generasi muda. Mereka sibuk dalam rebutan kursi, sibuk mengurus konflik partai yang ujung-ujungnya tidak ada yang memikirkan dan membela pemuda.

Dan yang terjadi banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada generasi muda berprestasi. Semua akan fokus untuk mengurus segala sesuatu dengan uang, menyogok, dan kong kalingkong dengan memanfaatkan kedekatan, kekerabatan dan koncoisme.

Hentikan segala bentuk praktik kotor seperti itu yang telah mengebiri dan menutup kesempatan kepada pemuda berprestasi.

Undang para pemuda dan mahasiswa yang masih diluar negeri untuk diberi kesempatan berkiprah memanfaatkan segenap kemampuan dan potensi yang dimiliki. Guna membangun negeri.

Beri peluang dan kasih kesempatan kepada seluruh pemuda sesuai dengan bakat, kemampuan, kelebihan dan potensi yang mereka miliki. Hargai mereka dengan merekrut semuanya dengan tanpa pandang bulu. Saya yakin mereka mempunyai segala kelebihan sesuai yang Tuhan telah anugerahkan kepada generasi muda.

2. Undang Pakar Dan Tenaga Kasar Dari Luar Negeri Untuk Terlibat Dalam Membangun Negara

Sekiranya kemampuan pemuda dan anak negeri kurang memadai, undang pakar dari luar negeri untuk menjadi mentor sekaligus terlibat dalam proses pembangunan negara. Tapi harus dengan batas dan peraturan tertentu yang tidak merugikan bangsa dan negara.

Para pakar dibatasi pada bidang yang dikuasainya. Jika ada pakar yang betul-betul berjasa pada negara, tawari untuk menjadi warga negara Indonesia. Jangan mudah memberi kewarga negaraan (naturalisasi) kepada pemain bola yang sama sekali tidak jelas segalanya.

Begitu juga sekiranya diperlukan tenaga kasar untuk membangun negara, undang tenaga kerja asing yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kerja kasar. Hargai hak-hak mereka, jangan didzolimi dan memperbudak mereka. Kita

manfaatkan tenaga mereka untuk terlibat dalam membangun negara.

3. Tidak Perlu Mengundang Investor Dari Luar Negeri

Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup melimpah, mulai darat, laut dan udara. Andai saja bisa dimaksimalkan sebesar mungkin negara kita tidak akan kekurangan. Semua bisa ditutup dari potensi SDA dan SDM yang kita miliki.

Anehnya semua presiden kecuali Bung Karno, selalu berusaha mencari investor (mengemis) kepada negara-negara kaya di dunia. Jokowi sudah menjual negara kepada China dan beberapa negara lain, dengan istilah investasi.

Kita tidak sadar, masuknya investor sama dengan mengundang penjajah dan penjarah kekayaan negara. Negara investor sudah pasti tidak otomatis “nyoh” (mengasih) atau dengan sukarela tanpa meminta imbalan apa-apa.

Investor juga tidak mau rugi, karena itu investor akan mengambil keuntungan entah dalam bentuk apa. Ini yang harusnya kita waspadai dan antisipasi. Bukan dengan begitu mudah kita mengundang mereka untuk berinvestasi. Bukankan negara kita kaya?

Akan lebih terhormat kalau kita mengundang para pakar untuk membantu membangun negara. Kita bayar mereka, kita hargai dan fasilitasi. Bukan menanamkan modal, tapi menularkan ilmu.

Stop mengundang investor luar negeri untuk menanamkan modal. Gali sumber kekayaan alam sendiri untuk dieksplorasi sebanyak-banyaknya demi kemakmuran rakyat Indonesia seluruhnya. Jangan

sampai kekayaan alam justru dibawa investor keluar negeri. Kasus freeport cukup menjadi pelajaran pahit sebab mengundang investor luar negeri.

4. Manfaatkan Kekayaan Sumber Dan Hasil Kekayaan Alam Untuk Kemakmuran Rakyat Indonesia Seluruhnya.

Jangan adalagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir orang, atau sekelompok lembaga yang mengatas namakan apapun. Negara ini bukan negara Kapitalis yang individu perseorangan bebas menguasai sumber kekayaan alam untuk memperkaya diri sendiri.

Namun anehnya itulah yang terjadi banyak orang kaya (individu) juga sekelompok orang bebas menguasai sumber daya alam yang seharusnya itu dimiliki oleh negara demi kemakmuran bersama.

Buat aturan, regulasi, dan segala bentuk kebijakan yang riil yang mengatur segala sumber kekayaan alam untuk kepentingan dan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk rakyat.

Keyakinan saya, kalau itu dilaksanakan dengan amanah, jujur dan adil, tidak ada orang miskin yang sesungguhnya di Indonesia. Rakyat akan hidup makmur sejahtera dengan standart hidup layak sesuai perkembangan kemajuan jaman yang ada didunia.

5. Buka Dan Kembangkan Pulau-Pulau Tidak Berpenghuni Dengan Memaksimalkan Potensi Sumber Daya Alam Yang Ada.

Indonesia terkenal dengan negara kepulauan terbesar dan terbanyak didunia. Ada yang

menyebutkan jumlah pulau lebih dari 15 000 pulau baik besar atau kecil.

Dari puluhan ribu pulau yang ada, ironisnya sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal dan menduduki pulau Jawa. Yang luasnya tidak mencapai 5% dari luas daratan Indonesia. Begitu padat dan berjejal-jejalnya penghuni pulau Jawa, hingga dirumorkan pulau Jawa suatu saat akan tenggelam sebab tidak mampu menampung jumlah penghuninya.

Dan juga yang menjadi ironi lagi, Jakarta sebagai Ibu Kota negara Indonesia, sekaligus menjadi pusat bisnis, menjadikan Jakarta sebagai pusat perputaran uang terbesar. Sekitar 60-70% peredaran uang ada di Jakarta.

Bisa dibayangkan daerah-daerah lain terutama pedalaman dan pelosok luar Jawa, berapa persen sebagian perputaran uangnya?

Bukan hanya itu, seakan-akan semua pusat pembangunan juga berada di Jakarta dan pulau Jawa. Orang Jawa tidak mau beranjak keluar Jawa, orang luar Jawa juga berbondong-bondong ke Jawa, khususnya Jakarta.

Sudah seharusnya pemerintah membuka pulau-pulau yang selama ini tidak dilirik, tidak dibuka, tidak dimanfaatkan. Untuk dibuka dan dikembangkan potensinya. Kirimkan para pemuda yang mempunyai keahlian guna mengembangkan pulau yang ada.

Jangan sampai negara luar merebut dan mengkalaim pulau kita dimilikinya. Hanya karena kita tidak mengelola dan memanfaatkannya. Jadikan pulau-pulau itu sebagai dunia (Indonesia) masa depan, yang penuh kemajuan, keindahan, kedamaian dan kemakmuran.

Babak ke-Delapan

Untuk Para Menteri

1. Untuk Menteri Jonan I

Saya sedikit mengamati kiprah anda semenjak menjadi direktur kereta api. Gebrakan anda yang mengubah tampilan kereta api terutama jarak jauh bisa dirasakan. Baik dari jadwal keberangkatan dan ketibaan yang sekarang relatif lebih bisa dipercaya. Fasilitas AC dan toilet untuk kereta api kelas ekonomi, tempat duduk yang tertib dan kenyamanan penumpang dari gangguan pengemis dan pengamen.

Semua perubahan sudah pasti menimbulkan pro dan kontra. Asal perubahan untuk kebaikan bersama tentu akan didukung semua orang. Soal ada yang merasa dirugikan itu bagian dari resiko perubahan. Saya mendukung dan bisa merasakan nyaman ketika naik kereta api kelas ekonomi, terutama dari tersedianya tempat duduk bagi penumpang.

Sayangnya perubahan dan perombakan dalam kereta api kelas ekonomi krusalnya. Menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, krusalnya pedagang asongan dan pembelinya. Pelarangan pedagang asongan di kereta api kelas ekonomi sempat menimbulkan demonstrasi yang berkepanjangan dari berbagai daerah.

Harusnya dipertimbangkan kembali untuk diperbolehkannya pedagang asongan berjualan di kereta api krusalnya kelas ekonomi. Sejauh tidak mengganggu kenyamanan penumpang, tidak menimbulkan keributan dan kejahatan sebaiknya para

pedagang asongan diperbolehkan berjualan di kereta api kelas ekonomi dengan persaratan dan peraturan tertentu.

Hal ini selain menolong para pedagang, produsen lokal, juga menolong penumpang. Banyak orang tahu makanan yang dijual oleh restoran di kereta api sangat mahal. Satu contoh sepirig nasi goreng harganya Rp 15.000, dibanding harga nasi goreng asongan cuma Rp 5000.- Soal rasa dan volume nasi tidak jauh beda, justru nasi goreng asongan volumenya lebih banyak.

Bagi penumpang kereta api kelas ekonomi, ketiadaan pedagang asongan sangat menyusahkan. Kalau biasanya berbagai macam barang dan makanan diajakan, kini tidak ada sama sekali. Terjadilah monopoli perdagangan makanan yang dilakukan oleh pihak kereta api. Dan sudah pasti harga akan mahal. Padahal kereta api adalah transportasi milik publik.

Kasus jatuhnya pesawat Air Asia QZ 8501 yang itu murni kecelakaan, telah membuat munculnya banyak kebijakan yang juga merugikan konsumen. Penghapusan tiket promo, pelarangan konter penjualan tiket di bandara semua itu merugikan konsumen.

Bagaimana cara berfikir anda hingga keluar kebijakan seperti itu? Selama ini pihak maskapai tidak pernah merasa dirugikan, toh itu bagian dari program promosi maskapainya. Maskapai sudah pasti mempertimbangkan dan memperhitungkan untung ruginya. Maskapai juga tidak akan gegabah dalam arti asal-asalan mengoperasikan pesawatnya seandainya tidak layak.

Keberadaan harga tiket promo telah menolong banyak orang. Efeknya sangat luar biasa, penumpang bisa lebih menghemat waktu sebab memilih pesawat sebagai sarana transportasinya. Sebab harga tiket dibanding dengan naik bis, kereta api atau kapal laut tidak jauh beda bahkan ada yang lebih murah sebab dapat harga tiket promo.

Tiket promo meningkatkan kunjungan wisata ke Indonesia sebab harga tiket murah. Otomatis hal ini akan mendongkrak perekonomian rakyat Indonesia, sebab banyak orang berkunjung ke berbagai tempat wisata di Indonesia. Itu diantara manfaat adanya tiket promo yang murah.

Tebaru larangan maskapai membuka konter penjualan tiket di bandara. Maksudnya mungkin baik untuk mencegah adanya calo tiket. Tapi itu tidak membuat masalah menjadi ringan. Calon penumpang tidak semuanya bisa menggunakan internet sehingga bisa beli tiket secara online. Jadi dengan membeli langsung ke konter di bandara itu yang dilakukan.

Sering terjadi penumpang lupa jadwal penerbangannya, sehingga tiba di bandara ketinggalan pesawat. Kalau sudah begitu calon penumpang akan mengadu ke konter atau agen penjualan tiket di bandara. Agen tiket akan menawarkan penerbangan berikutnya yang terdekat. Jika di bandara tidak ada agen penjualan tiket penumpang akan dibuat lebih susah. Sebab harus mencari agen penjualan tiket yang jauh dari bandara.

Kalau tujuannya untuk menghilangkan calo tiket, seharusnya pihak bandara bekerja secara profesional

untuk mengatasi hal ini. Sehingga tidak akan ada calo tiket yang bergentayangan. Begitu juga pihak maskapai harusnya mengecek tiket dengan betul, sehingga penumpang yang namanya tidak sesuai antara KTP dan tiket tidak diperbolehkan naik pesawat.

Kepada menteri Jonan, tolong beberapa hal diatas yang berupa pelarangan mohon dipertimbangkan ulang untuk dicabut larangan itu. Berpihaklah pada rakyat. Buatlah kebijakan yang membuat rakyat senang dan merasa dipermudah. Dengan begitu pekerjaan anda akan membawa banyak manfaat untuk banyak orang.

2. Untuk Menteri Jonan II, Lion Air Si Raja Delay

Sudah puluhan mungkin ratusan kali Lion Air mengecewakan penumpang dengan kebiasaan delay (lambat/tertunda)nya. Lion Air layak mendapat anugerah muri (museum rekor indonesia) sebagai pesawat super delay atau si raja delay. Gelar ini sangat cocok dan pas untuk maskapai Lion Air.

Sebetulnya Lio Air bukan hanya buruk dalam jadwal, tapi krunya juga tidak kalah buruknya dalam memberi servis kepada penumpang. Banyak orang mengalami perlakuan mengecewakan dari kru Lion Air.

Harusnya menteri Jonan menindak tegas Lion Air, entah apa dan bagaimana bentuknya. Keseringan delay sebetulnya tidak dapat ditolerir, itu jadi kebiasaan dan seakan meremehkan penumpang. Menteri Jonan mungkin tidak pernah mengalami kondisi seperti ini. Sangat menjengkelkan pak

menteri, kita sudah setkan waktu, tapi ditunda berjam-jam dengan tidak ada kepastian.

Kenapa terhadap Air Asia yang itu musibah dan baru pertama kali, menteri Jonan begitu cepat mengambil tindakan yang justru merugikan konsumen? Sedang Lion Air yang sudah jelas-jelas berbuat curang kepada konsumen dan dilakukan berulang kali, menteri Jonan tidak mengambil tindakan? Kenapa dan ada apa pak Jonan?

3. Untuk Menteri Susi Pudjiastuti

Saya sedikit mengetahui sosok bu Susi Pudjiastuti melalui sebuah artikel beberapa tahun silam jauh sebelum menjadi menteri. Pada saat itu saya sudah respect dengan kiprah bu Susi yang luar biasa. Sehingga ketika bu Susi terpilih menjadi menteri saya langsung mendukung.

Dari beberapa menteri kabinet kerja JokowiJK, hanya beberapa gelintir menteri yang saya menaruh harapan. Tidak sampai hitungan lima jari dari 34 menteri yang ada dikabinet Jokowi. Salaha satunya adalah Susi Pudjiastuti, sang menteri Kelautan dan Perikanan.

Integritas dan sepak terjangnya sudah saya pahami. Dalam negara yang berburu gelar dan menjadikan gelar sebagai standart status sosial, bu Susi sepertinya sama sekali tidak berminat untuk membeli gelar akademik, sebagaimana banyak pejabat yang gila gelar sarjana, sampai menipu. Sekedar menaikkan status dan gengsi, sebagaimana orang-orang yang tidak percaya diri atau demi menaikkan posisi dan gaji.

Sebagaimana kita tahu bu Susi hanya lulusan SMP dan protolan SMA. Sebuah jenjang pendidikan menengah pertama, namun pola pikir dan kebijakan bu Susi dalam mengambil dan menentukan beberapa kebijakan mengalahkan pendidikan tinggi bergelar doktor, phd dan jendral bintang empat sekalipun.

Sebuah keberanian untuk menegakkan keadilan dan menghukum yang salah patut diacungi jempol. Selama puluhan tahun Indonesia berganti presiden dan rezim, selama itu pula terjadi pencurian kekayaan negara yang berasal dari laut. Dan sama sekali tidak ada tindakan, bahkan terjadi kong-kalingkong antara perampok dan penguasa.

Satu kerja nyata sudah dikerjakan bu Susi, semoga kerja keras bu Susi tidak ada niatan untuk mengejar popularitas, pencitraan atau mencari keuntungan pribadi. Semua yang dilakukan bu Susi demi mensejahterakan nelayan dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Harapan rakyat semoga, hasil laut Indonesia bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Harga ikan bisa terjangkau dan terbeli, mudah didapat dan ikan dalam kondisi sehat, layak konsumsi sebab tidak mengandung formalin dan bahan pengawet lain yang membahayakan kesehatan.

Terima kasih bu Susi untuk keberaniannya menenggelamkan kapal pencuri ikan. Semoga kerja keras bu Susi bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, dengan begitu kesejahteraan dan kemakmuran akan segera tercapai. Teruslah bekerja jangan berhenti ditengah jalan, perjuangkan nelayan dan rakyat Indonesia.

Akhir-akhir ini terjadi banyak demonstrasi menentang kebijakan bu Susi kususnya mengenai larangan penangkapan udang/ikan pakai jaring.cantrang. saya tidak tahu sama sekali mengenai seluk-beluk dunia kelautan dan perikanan. Sehingga tidak paham apa manfaat dan mudlorot dari kebijakan itu. Semoga saja kasus itu cepat selesai dengan jalan keluar yang tidak merugikan rakyat dan negara.

Saya berharap bu Susi Pudjiastuti berkerja dengan, cerdas, keras dan ikhlas demi rakyat. Segala kebijakan bu Susi akan berpihak pada rakyat. Namun tidak merugikan negara dalam arti kelangsungan kehidupan laut. Dalam hal ini rakyat juga harus memikirkan tentang efek kedepan, jangan hanya demi keuntungan semata, sebab anak cucu kita akan menggantikan posisi kita.

4. Untuk Menteri Khofifah

Saya rasa bu Khofifah termasuk menteri yang boleh diandalkan dalam kinerjanya. Sebagai ketua muslimat (ibu-ibu warga nahdlatul ulama) bu Khofifah tentu paham kondisi riil masyarakat kelas bawah. Sebab kebanyakan warga NU adalah menengah kebawah yang hidup dipedesaan.

Saya mendapat infromasi lowongan untuk pendamping dan operator program keluarga harapan. Setelah saya cek ternyata tidak semua propinsi menjadi sasaran program keluarga harapan. Jawa Timur termasuk yang tidak mendapat sasaran program keluarga harapan. Padahal semua propinsi di Jawa semua mendapat jatah. Kenapa Jatim tidak?

Saya tidak tahu alasan yang pasti, tapi hanya menduga-duga saja kenapa Jatim koq tidak mendapat jatah. Gakpapa itu urusan dan hak bu Khofifah. Cuma yang menjadi pertanyaan apa kriteria daerah yang menjadi sasaran program? Bukankah setiap daerah pasti punya problem sosialnya? Bukankah bu Khofifah menjadi menteri untuk seluruh rakyat Indonesia?

Apakah tidak lebih baik seandainya bu Khofifah membuat program untuk seluruh provinsi dan seluruh daerah tingkat dua? Dengan membuat tim untuk mengidentifikasi problem sosial yang ada di masing-masing daerah? Kami siap membantu program kemensos bu. Hubungi kami.

5. Untuk Menteri Anis Baswedan, Unas Sistem Online?

Bab ini bisa dibaca di babak ke-dua, halaman.....54

6. Untuk Menteri M Nasir, (MenRistek dan Pendidikan Tinggi)

Terima kasih pak M Nasir yang telah berusaha menguak ijazah palsu, gelar palsu, perguruan tinggi abal-abal dan palsu. Masih banyak pak yang melakukan hal seperti itu. Terutama para pejabat, tokoh masyarakat yang kemaruk, gila pangkat dan yang pasti ingin naik pangkat.

Teruskan dan tuntaskan sampai keakar-akarnya untuk mengusut dan membongkar kasus ini. Bersihkan Indonesia dari orang-orang palsu yang tidak percaya diri hanya memenuhi nafsu hedonisme pribadi.

Bubarkan perguruan tinggi palsu, perguruan tinggi abal-abal yang tidak memenuhi standart

akademik dan keilmuan. Perguruan tinggi yang hanya mengejar keuntungan harta benda semata, dengan tidak mengindahkan etika dan keilmuan.

Musuh bapak pasti banyak dan sangat kuat. Sebab mereka terdiri dari orang-orang berpangkat dilingkungan pemerintahan yang mempunyai jabatan kedudukan dan keuangan.

Karena itu bapak perlu merekrut tim intelijen sendiri untuk mengusut kasus-kasus ini. Terjunksan ditiap daerah seluruh Indonesia untuk mengecek para pegawai dilingkungan pemerintahan dan lembaga negara yang lain didaerah. Cek ijazah dan gelar yang disandangnya. Asli dikeluarkan oleh perguruan tinggi terakreditasi atau hanya sekedar beli.

Kasihlah teman-teman yang bersusah payah menempuh pendidikan tinggi dengan membayar mahal, belajar keras, membuat tugas, menjalani ujian dan berbagai penelitian yang lain. Hanya disamakan dengan para pejabat yang dengan mudah membeli gelar dan ijazah palsu dengan tidak melalui proses akademik sama sekali.

Dengan pemberangusan praktik kotor seperti ini bapak akan menjadi pahlawan pendidikan yang menegakkan kemurnian dunia keilmuan dan akademik. Saya siap membantu untuk menegakkan bidang ini.

Jadikan perguruan tinggi sebagai ladang dan medan penelitian, pengembangan potensi, dan membuat beberapa penemuan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan untuk orang banyak.



Babak ke-Sembilan

Sentilan

1. Kebijakan Publik Pemerintah Sering Menyengsarakan Rakyat

Mental kolonial Belanda rasa-rasanya masih terus berlanjut sampai sekarang. Model Belanda dalam menjajah yang memecah belah, mengeruk sebanyak mungkin keuntungan, merampok hak-hak rakyat, mau menang sendiri, tidak berperikemanusiaan. Itu diantara yang dilakukan Belanda kepada rakyat Indonesia.

Model-model mental seperti itu, terus dipelihara oleh para pejabat di Indonesia. Seakan para pejabat dan mereka yang bekerja pada pemerintah terlebih mereka yang mempunyai jabatan dan kedudukan sering menganggap rendah dan memandang sebelah mata kepada rakyat biasa.

Para pejabat itu seakan bos yang harus dilayani dan dihormati, sedang rakyat adalah budak-budak yang harus taat pada aturan bos. Malangnya mental bos-bos itu sering memanfaatkan rakyat untuk keuntungan mereka dan kroninya. Rakyat akan diperalat, dipecundangi untuk kepentingan mereka dan orang-orang kaya.

Entah bagaimana cara berfikir para pejabat tersebut, apakah tidak pernah memikirkan nasib rakyat. Setidaknya mencoba berfikir pada posisi rakyat. Koq hampir semua kebijakan dan keputusan pemerintah sering menyengsarakan rakyat kecil. Rakyat dibuat bingung, kesal dan menderita.

Kebijakan menaikkan harga BBM sudah bisa dipastikan akan menambah penderitaan rakyat kecil. Apapun alasannya, penghematan, pengalihan subsidi, tetap saja efek penderitanya menimpa rakyat kecil. Walau kompensasi kenaikan harga BBM rakyat diberi uang, tapi itu tidak seberapa dan tidak merata. Banyak yang harusnya berhak menerima tapi tidak mendapat apa-apa.

Kebijakan publik sering tidak menyelesaikan atau setidaknya menyederhanakan dan mengurai masalah, justru menimbulkan masalah baru yang lebih parah. Seharusnya sebelum memutuskan sebuah kebijakan publik, rakyat dan beberapa komponen lain dilibatkan dulu dalam pembahasannya. Jangan asal membuat keputusan, tapi tidak mempertimbangkan efek dan resikonya. Rakyat sudah cukup menderita, jangan dibuat sengsara dan merana lagi. Tolong perhatikan itu, wahai para pembuat kebijakan dan keputusan.

2. 100 Hari Yang Bergejolak

Sering menjadi barometer pada kepemimpinan baru dengan membuat ukuran 100 hari sebagai kinerja awal. 100 hari dalam hitungan bulan selama tiga bulan. Waktu tiga bulan relatif prematur untuk menilai sebuah kesuksesan sebuah kinerja lima tahun. Tapi setidaknya bisa sebagai acuan untuk melihat indikator-indikator yang akan terjadi. Setidaknya bisa dirasakan apakah ada perubahan kearah kesejahteraan atau justru sebaliknya.

Jokowi (Joko Widodo) dilantik menjadi Presiden RI ke-7 pada tanggal 20 Oktober 2014, pada akhir Januari 2015 genap 100 hari pemerintahan

JokowiJK. Mungkin meleset dari yang dibayangkan oleh para pemilih Jokowi, disangkanya dengan gaya 'wong solo' nya Jokowi akan bersikap lembut dan halus dalam menapaki kerja awalnya. Sebagaimana kasus pemindahan PKL di Solo yang tidak menimbulkan gejolak sebagaimana di daerah-daerah lain.

Persangkaan bahkan harapan itu bertolak belakang dengan fakta yang terjadi. Selama 100 hari memerintah Jokowi sudah membuat 'gejolak' yang membuat semua kalangan resah. Diawali dengan ributnya anggota DPR yang berebut kursi, disusul dengan kenaikan harga BBM, mencalonkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang disusul dengan perseteruan antara KPK dan POLRI.

Sulit ditepis bahwa imej Jokowi yang menjadi '*boneka*' bos partai yang selama musim kampanye pilpres kemarin menjadi bahan olok-olokkan tentang profil Jokowi. Pencalonan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri berhembus isu yang cukup kuat bahwa itu atas desakan Megawati sebagai ketua umum PDIP yang telah mengantarkan Jokowi menjadi presiden RI. Begitu juga pengangkatan ketua MA (Mahkamah Agung) atas permintaan Surya Paloh ketua umum NASDEM yang juga pendukung Jokowi.

Penangkapan Bambang Widjojanto (BW) sebagai wakil ketua KPK takpelak telah memantrk emosi dikalangan masyarakat sipil biasa yang selama ini lebih percaya KPK daripada lembaga-lembaga lain, bahkan POLRI dan DPR sekalipun.

Kenaikan harga BBM, penangkapan Bambang Widjojanto menjadi gejolak terbesar dan pemerintahan Jokowi diawal 100 hari

pemerintahannya. Kasus ini merembet kemana-mana dan berimbas dengan penangkapan wakil ketua KPK yang lain. Muncul istilah ‘kriminalisasi’ pada penegak hukum KPK.

Gejolak itu melahirkan satu badan (tim) yang dikenal dengan nama tim sembilan yang bertugas memberi masukan kepada Jokowi khususnya kasus KPK-POLRI. Penunjukan tim sembilan juga sedikit menimbulkan gejolak di kalangan elit negeri, terutama anggota DPR yang merasa dilangkahi. Seharusnya Jokowi melakukan dialog dengan DPR.

Secara pribadi saya juga bertanya-tanya; “Apa fungsi dan tugas watimpres?” Bukankah seharusnya watimpres memberi masukan dan nasehat kepada presiden? Terus berapa lama dan sampai kapan tim 9 akan bekerja? Bagaimana kedudukannya dalam struktur rumah tangga kepresidenan? Bagaimana dengan gaji mereka?

Kni 100 hari yang penuh gejolak sudah dilalui, semoga 100 hari kedepan, 1000 hari dan entah berapa hari kedepan tidak adalagi gejolak yang meresahkan masyarakat. Kita menunggu kiprah Jokowi dan pemerintahannya dalam membangun negara Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan di bumi pertiwi.

3. Blusukan Bukan Tugas Dan Kerja Seorang Presiden

Istilah blusukan seakan sudah menjadi “*branding*” yang melekat pada diri Jokowi. Kebiasaan mengunjungi tempat-tempat kumuh, pasar dan berbagai tempat yang lain sering dilakukan Jokowi sejak menjadi Walikota Surakarta. Kebiasaan

blusukan Jokowi berlanjut sampai menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Seakan sudah menjadi naluri Jokowi, setelah menjadi presiden RI, Jokowi masih melakukan model-model blusukan. Syah-syah saja melakukan hal itu, tetapi sebetulnya saat ini pak Jokowi tidak perlu lagi melakukan blusukan lagi dalam bentuk formal dan menyolok mata.

Terlalu kecil untuk ukuran Presiden Indonesia melakukan blusukan seperti itu. Negara ini terlalu besar untuk diblusuki, habis waktu dan tenaga tetapi tidak fokus untuk membangun negara jika disibukkan dengan blusukan.

Blusukan idealnya dilakukan pejabat setingkat bupati/walikota, sebab pejabat itulah yang bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat yang dipimpinnya. Bupati/walikota bisa saja mendelegasikan kepada camat dan jajarannya. Begitu juga camat kepada lurah beserta stafnya. Tetapi bupati/walikota wajib mengetahui kondisi riil rakyat yang dipimpinnya.

Jika ada warga atau rakyat yang kelaparan, tidak terurus dan tidak mendapat hak hidup layak dengan standart minimal, maka itu tanggung jawab sepenuhnya berada ditangan bupati/walikota. Sebab dialah penguasa langsung yang berhubungan dengan rakyat.

Banyak rakyat yang hidup teramat sangat melarat, hidup dalam kubang kemiskinan, kekurangan makan, dipasung, gila, idiot dan berbagai bentuk kekurangan yang lain. Kondisi-kondisi itu banyak terjadi di saentero negeri ini. Tetapi tidak pernah mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah,

ironisnya aparat pemerintah hidup dalam kemewahan dan serba glamour. Sungguh dzolim dan dosa besar pemimpin yang berlaku seperti itu. Hidup dalam kemewahan sedang rakyat melarat tidak berkesudahan sampai sekarat dan wafat.

Presiden adalah kepala negara, seharusnya mendelegasikan segala bentuk kebijakan kepada seluruh bawahannya baik menteri, gubernur, bupati dan walikota. Tidak perlu blusukan, beri tugas dan wewenang kepada kepala daerah untuk mengurus daerahnya dengan baik dan bijaksana. Tugaskan intelijen untuk mengorek segala hal yang sudah dan akan terjadi dimasyarakat.

Presiden memikirkan, mengorganisir dan membuat kebijakan bagaimana rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera, makmur, merasa aman dan nyaman serta mendapat keadilan. Presiden menggalang komunikasi dengan seluruh komponen bangsa untuk menjalin persatuan dan kesatuan demi keutuhan dan kemajuan bangsa. Presiden menjalin kerjasama dengan berbagai negara untuk keuntungan bersama dengan menjaga wibawa dan martabat bangsa. Boleh blusukan, sekedar untuk mengetahui suara rakyat apa yang sudah terjadi dengan kepemimpinnya. Sehingga bisa untuk bahan evaluasi.

4. PLN Ku Yang Menyedihkan

Saya tidak tahu pasti kenapa penyambungan jaringan listrik di Indonesia dibuat berkelas-kelas. Mulai dari 450kwh, 900kwh dan 1300kwh untuk rumah tangga pada umumnya. Apakah karena jumlah rumah dan pengguna sambungan listrik sangat banyak, sedang sumber pasokan listrik sangat

terbatas, sehingga harus dibagi-bagi berdasar kelas sosial rumah tangga.

Begitu juga yang mengerjakan sambungan pemasangan jaringan listrik ke rumah-rumah bukan orang PLN, tetapi dikerjakan oleh sub kontraktor yang harga sambungan antara kontraktor satu dengan kontraktor yang lain berbeda harganya. Konon kata orang PLN, PLN tidak ada pegawai untuk itu, aneh dalam hati saya, perusahaan negara tapi tidak punya pekerja.

Berdasar pengalaman hidup di Malaysia, saya tahu di Malaysia sepertinya tidak ada beda jaringan PLN rumah. Rumah orang miskin (warga Indonesia yang sudah ber KTP Malaysia) tidak punya perabot elektronik sama sekali kecuali TV. Tapi rumah tersebut pasokan listriknya sangat besar. Bahkan beberapa orang menyalurkan sambungannya dengan digunakan banyak peralatan elektronik.

Hampir tidak pernah terjadi listrik '*njeglek/turun*' daya sebagaimana yang sering terjadi disambungan listrik rumah tangga di Indonesia. Sambungan listrik dengan daya 450kwh, berdasar informasi yang saya peroleh dari orang dalam PLN, tidak sampai 450kwh melainkan Cuma 390kwh. Sehingga tidak aneh jika sering '*njeglek*'

Itulah kenyataan PLN dalam melayani sambungannya kepada rakyat. Bisa jadi PLN sudah menipu rakyat, mengambil untung besar dengan monopoli dan mengakali rakyat. Tidak heran jika banyak pencuri aliran listrik di negeri ini, sebab PLN sendiri berbuat tidak adil dan semaunya sendiri.

Beberapa tahun silam rakyat kesulitan memasang jaringan listrik dengan daya 450kwh.

Konon katanya daya 450kwh sudah habis atau tidak ada. Sebetulnya masih ada asalkan mau membayar mahal, dan begitulah faktanya yang terjadi.

Pada era Dahlan Iskan menjadi direktur PLN, pak Dahlan mempromosikan sambungan baru satu juta dalam sehari. Nah, buktinya ada, berapapun yang diminta rakyat PLN bisa menyediakan sesuai permintaan, terus selama ini kenapa PLN kata tidak ada?

Sangat menyedihkan perilaku orang PLN yang monopoli sambungan listrik, tetapi masih bergaya feodal ala penjajah Belanda. Tidak kalah menyedihkan adalah sambungan listrik dirumahku. Daya 450kwh tapi untuk 'nyetel' atau menyalakan tv 'njeglek' padahal listrik dalam kondisi nol, alias tidak dipakai untuk apa-apa. Akhirnya harus menggunakan 'alat kusus yang dinamakan slow start atau auto stat'.

Sungguh menyedihkan sebagai konsumen tapi tidak mendapat servis yang menyenangkan. Mau mehidupkan komputer juga begitu pasti 'njeglek'. Sangat jauh berbeda degan di Malaysia yang dipakai apapun tidak njeglek, kecuali konslet.

Entah, sampai kapan PLN terus berbuat seperti itu, kapan mau melayani rakyat dengan sesungguhnya, demi kesejahteraan rakyat. Dulu PLN sering gambar-gembor PLN rugi, sungguh aneh, monopoli dan mengakali koq rugi. Itu mungkin karena kebodohan atau keserakahan orang PLN yang ternyata syarat dengan korupsi.

5. Negara Ini Dimiliki (Dinikmati) Oleh Para Pejabat, Wakil Rakyat, Pegawai Negeri (PNS, TNI dan POLRI) Serta Para Cukong Dalam Dan

Luar Negeri Serta Konglomerat

** Tulisan ini saya muat dalam buku saya berjudul; "Seandainya Saya Menjadi Presiden RI" tahun 2008.*

Dimana rakyat? Siapa itu Rakyat? Apa peran Rakyat? Dan mendapat bagian apa Rakyat? Hampir semua pejabat, wakil rakyat, Lembaga Swadaya Masyarakat, semua mengatas namakan demi kepentingan rakyat, membela rakyat dan kesejahteraan Rakyat. Tapi rakyat yang mana?

Selama ini gambar-gembor membela rakyat itu hanya ibarat gonggongan anjing ketika ada orang lewat. *Omong kosong kalau ada pejabat yang mau sengsara dan rela miskin demi membela dan mensejahterakan rakyat. 100% para pejabat dan wakil rakyat di Indonesia tidak ada yang hidup melarat melebihi melaratnya dan penderitaan rakyat.*

Mereka getol mencari celah untuk menumpuk pundi-pundi kekayaan kanthong pribadi, keluarga, kroni dan partai. Alasan yang digunakan selalu mengatas namakan demi kepentingan rakyat. Lagi-lagi rakyat dijadikan alat untuk memenuhi ambisi dan memuaskan syahwat duniawinya.

Orang-orang itulah yang menikmati semua fasilitas negara yang kita semua tahu berasal dari duit rakyat. Mereka mendapat gaji rutin tiap bulan, dapat tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan kendaraan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, tunjangan jabatan, tunjangan anak, tunjangan istri/suami, tunjangan beras sampai tunjangan kematian akan dia dapatkan.

Betapa enaknyanya mereka. Kerja semaunya, tidak memeras keringat dan tenaga, tidak berpanas-panasan, sebab diruangan ber-ac yang penuh fasilitas

dan kecukupan. Semua gaji, fasilitas, tunjangan itu dirasakan oleh semua pejabat, wakil rakyat, pegawai negeri (pns, tni dan polri), saking berjasanya mereka dalam membangun negara dan membela rakyat, ditambahkan atau diberi bonus gaji ke 13. padahal gaji mereka setiap tahun mengalami kenaikan.

Tidak heran kalau orang-orang seperti itu menjadi warga negara kelas satu dan super vip. Menjadi impian banyak orang untuk menduduki kursi itu. Berbagai macam cara dan berapa ratus juta akan dibayarkan untuk menjadi komunitas itu. Mereka juga menjadi dambaan gadis-gadis dan para orang tua untuk dijadikan suami dan menantunya.

Siapa tidak '*ngiler*' melihat betapa enakannya mereka menjalani dan menikmati kehidupan. Ditengah kepayahan hidup, mereka begitu mudah menikmati hidup. Kerja tidak kerja setiap bulan mendapat gaji dan berbagai fasilitas dan tunjangan. Kemapanan dan jaminan masa depan yang sudah terang-benderang membius jutaan rakyat Indonesia.

Banyak daerah yang hampir bangkrut karena APBD nya lebih dari 60% untuk membayar gaji para pegawai padahal jumlah pegawainya hanya sekitar 15% dari total jumlah penduduk. Lantas rakyat kebagian apa? Pengaspalan jalan dikampung-kampung dibebankan rakyat, perbaikan gorong-gorong juga dibebankan rakyat. Betapa sengasarnya rakyat.

Di kabupaten Ngawi Jawa Timur salah satu contoh daerah hampir pailit. 70% APBD untuk belanja dan menggaji pegawai. Bayangkan kita contohkan anggaran bantuan untuk pembangunan semisal Rp 1 milyar, tapi yang 700 jt untuk membiayai dan

menggaji para pegawai sisa 300 jt dibagi 20 kecamatan dibagi lagi 300 desa dibagi lagi 3000 RT, dapat berapa? Rp 100rb/RT. Kita teruskan taruhlah 1 RT ada penduduk sekitar 30 KK, berarti 1 KK dapat Rp. 3.333.4 dan dalam satu keluarga ada 5 nyawa, jadi 1 nyawa dapat 666.7/bln tidak sampai Rp 1000.- . Sedang pegawai negeri satu orang minimal Rp 2jt/bln. Bahkan rata-rata sudah di atas Rp 3jt/bln.

Itu sekedar contoh dan ilustrasi betapa mereka para pegawai yang menikmati kekayaan negara Indonesia. Rakyat yang membayar pajak, rakyat yang selalu diperalat, rakyat juga yang dijadikan perahan pejabat.

Ada sebuah gunung di Papua yang sekarang gunung itu telah dikeduk dijadikan uang. Gunung itu sekarang sudah hilang dan menjadi lubang berganti nama menjadi danau. Gunung itu menyimpan cadangan emas dan logam mulia. Berapa trilyun rupiah telah dinikmati oleh para cukong, konglomerat dalam dan luar negeri serta para pejabat.

Tapi apa yang dirasakan penduduk dan rakyat sekitar? Orang-orang asli Papua yang berhak memiliki gunung atau lahan itu? Bedanya bak ibarat langit dan bumi, mereka masih dibiarkan hidup primitive dan sengsara. Bahkan mereka yang mencoba memanfaatkan limbah emas itu untuk dijadikan penghasilan harus berhadapan dengan aparat dan nyawa sebagai taruhannya.

Bukan hanya di miskinakan, dibodohkan tapi ditipu dan disengsarakan. Tidak heran kalau banyak orang Papua yang tidak terima dengan keserakahan dan kebiadaban para pejabat di Jakarta. Mereka

menuntut hak mereka bahkan menuntut kemerdekaan Papua.

Sungguh malang nasib saudaraku sebangsa disana, mempunyai bumi berlimpah kekayaan tapi sedikitpun tidak bisa merasakan. Penderitaan, kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan masih mewarnai kebanyakan kehidupan rakyat Papua.

Anehnya mereka sekarang dijadikan komoditas untuk dieksploitasi dari berbagai sudutnya. Bukan hanya kekayaan alamnya yang dari dulu telah dirampok, tapi juga tata cara kehidupan keseharian mereka dijadikan bahan bisnis orang-orang Jakarta. Berbondong-bondong stasiun televisi menayangkan kedloifan dan kekurangan mereka untuk dijadikan bahan hiburan dan tontonan. Ujung-ujungnya para cukonglah yang menikmati dari keuntungan mereka.

Begitulah negara ini seakan hanya milik pejabat, pegawai dan orang kaya, merekalah yang menikmati semua kekayaan bumi air dan pegunungan semua yang ada di Indonesia. Berbagai fasilitas dan kemudahan mereka yang merasakan. Berbalik dengan rakyat kecil dan kebanyakan orang Indonesia, hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan yang seakan tiada ujungnya.

Bukan karena negara miskin yang tidak mempunyai sumber daya alam, tapi kekayaan alam itu dirampok, disimpan dan dibagi-bagikan hanya kepada orang-orang tertentu yang telah masuk jaringan, yang entah apa nama dari jaringan itu.

Rakyat menunggu datangnya sang pemimpin yang berjiwa seperti Umar bin Abdu Aziz yang rela menderita demi kesejahteraan rakyat. Pemimpin yang tidak rakus dan serakah terhadap duniawi, pemimpin

yang benar-benar pemimpin yang bisa mengayomi, melindungi, menenteramkan, mensejahterakan, dan menjadi tumpuan penyelesaian segala permasalahan rakyat

6. Apa Yang Diberikan Negara Kepada Rakyat Biasa?

Isi bab ini bisa dibaca dibabak ke-dua point 9 halaman 47

7. Reformasi Itu Ternyata Hanya Sebuah Kudeta Belaka

Gerakan reformasi 1998 yang telah menimbulkan huru-hara dimana-mana, penjarahan, pembakaran, pemerkosaan terhadap etnis tionghoa. Menimbulkan banyak korban jiwa termasuk para mahasiswa, ternyata hanya sukses menggulingkan Soeharto sebagai presiden RI yang sekaligus penguasa orde baru.

Tidak *'sumbut'* atau tidak sebanding dengan segala pengorbanan yang telah dikorbankan oleh masyarakat yang tidak terlibat dalam ranah kekuasaan orde baru. Mereka tidak tahu apa-apa, tiba-tiba terseret oleh arus gerakan reformasi. Kekacauan itu masih membekas kepada sebagian rakyat Indonesia, kebrutalan dan kebringasan rakyat terlepas liar dan membabi buta.

Kerugian tidak terkira, harta benda, kehormatan bahkan nyawa. Kondisi pada saat itu benar-benar kacau-balau dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Terus siapa yang bertanggung jawab terhadap semua itu? Siapa yang akan bersedia memberi ganti rugi?

Waktu terus berjalan, tahun 2015 era redormasi memasuki tahun ke- 15. Keadaan yang diharapkan akan merubah kesejahteraan, pemerataan, keadilan dan memberangus korupsi kolusi dan nepotisme (kkn) hanyalah sebuah utopia dan angan-angan. Yang ada korupsi semakin menjadi-jadi,

Kalau jaman orde baru korupsi dibawah meja alias sembunyi-sembunyi, jaman reformasi korupsi dimana saja tanpa segan-silu dan tanpa basa-basi. Bahkan sudah menjadi tersangka korupsi masih, petantang-petenteng di khalayak publik dengan tanpa rasa malu. Fenomena terbaru adalah mengajukan pra peradilan, merasa bersih dan tidak bersalah.

Reformasi hanya sepotong dan setengah hati. Seharusnya bukan saja menggulingkan presiden Soeharto, tapi juga membubarkan seluruh kabinet, partai politik dan segala yang berbau orde baru. Diganti dengan pemerintahan yang baru dan sama sekali berbeda dengan orde baru. Reformasi tanpa konsep yang matang, mungkin itu yang terjadi.

Efek reformasi melahirkan tokoh-tokoh '*reformis gadungan*' yang memanfaatkan keadaan kebebasan untuk memasuki sistem yang belum jelas. Dan yang terjadi kelakuan mereka lebih parah dari orang-orang jaman orde baru. Menumpuk dan menggarong uang negara sebanyak-banyaknya mumpung ada kesempatan, itu praktik tokoh-tokoh baru jaman reformasi.

Jadi secara umum era reformasi justru lebih buruk keadaannya. Rakyat dibuat semakin tidak menentu. Kelangkaan menjadi menu yang sering disuguhkan. Kelangkaan pupuk, kedelai, bbm, beras,

dan banyak kebutuhan yang sering dibuat langka. Mahalnya harga barang-barang dan rendahnya nilai mata uang.

Kualitas pejabat, wakil rakyat juga lebih buruk, sebab kompetisinya hanya lebih berdasar kekuatan dana yang dimiliki, bukan kualitas pribadi. Jadi tidak mengherankan kalau tidak menghasilkan kebijakan-kebijakan pro rakyat dan membanggakan. Ya reformasi itu hanya sebuah kudeta untuk menggulingkan kekuasaan.

8. Kasus Ahok vs DPRD DKI Menguak Perselingkuhan Eksekutif dan Legislatif Di Indonesia

Terima kasih Mister Ahok Gubernur DKI Jakarta yang telah membuka mata terhadap kebobrokan kelakuan para penyelenggara negara. Semoga kasus DKI ini bisa menyadarkan terhadap semua orang. Baik di jajaran pejabat, wakil rakyat dan rakyat sendiri.

Bukan tidak mungkin, bahkan sangat mungkin kasus itu menyebar dan terjadi diseluruh daerah di Indonesia. Kong-kalingkong antara eksekutif (gubernur, bupati, wali kota) dengan anggota DPRD (DPRD I dan DPRD II) dalam merampok uang rakyat melalui penentuan APBD. Tidak menuduh, tap aroma begituan kental terasa.

Rakyat tidak tahu, seberapa banyak anggaran yang digelontorkan untuk rakyat. Akhir-akhir ini ada beberapa anggota dewan yang memberi bantuan untuk sekedar membantu ini dan itu. Rakyat tidak tahu berapa sesungguhnya dana itu.

Yang rakyat tahu, hampir setiap anggota dewan hidupnya semakin makmur setelah menjadi anggota DPR akan merenovasi rumah dan membeli kendaraan baru. Rumor yang sudah familiar ditelinga, para anggota dewan itu akan berebut proyek. Itu tidak aneh dan sudah biasa kita dengar.

Dana siluman APBD DKI Jakarta sebesar 12.1 Trilyun terungkap berkat keberanian Ahok mengungkap kasus ini. Bola liar ini menggelinding hebat hingga memunculkan hak angket dari anggota DPRD DKI terhadap Ahok.

Bisa dibayangkan berapa trilyun uang yang dijadikan bancakan para pemegang kebijakan negara melalui para pemegang kuasa penentu dan pengguna anggaran di tiap-tiap daerah. Kong-kalingkong menjadi perselingkuhan yang lazim dilakukan para penguasa untuk membagi-bagi uang rakyat diantara mereka

Siapa yang mengawasi mereka? Mencegah mereka? Mengingatkan dan melarang mereka? Dan berani mengatakan; 'Stop! jangan lakukan itu, itu korupsi, jangan makan dan menggunakan uang haram, itu hak, milik dan untuk kesejahteraan rakyat!'

9. Jalan Terjal Perindo

Sebelumnya minta maaf kepada Bapak Harry Tanoesoedibyo, jika tulisan saya ini membuat anda gerah dan tidak nyaman. Ini sekedar pandangan orang luar yang tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi di internal diri dan partai anda. Semoga saja bapak bisa membaca dan mencerna dengan bijak sehingga tidak sampai ada gejolak. Kalau dianggap ini sebuah kritikan yang monggo, yang pasti bukan hinaan dan pelecehan.

Hari gini dan situasi negara seperti ini, sungguh teramat sangat berani dengan mendirikan partai. Rakyat kebanyakan sudah jenuh dan muak dengan perilaku partisan partai yang tidak menunjukkan sebagai pembela rakyat. Mereka masuk dan memanfaatkan partai hanya untuk mencari kedudukan dan kekuasaan yang ujung-ujungnya mencari kekayaan dengan jalan korupsi.

Saya tidak melihat sesuatu yang menarik dari Perindo. Baik dari segi logo, program, juga pendiri, pemilik dan bos partai. Tidak ada yang layak untuk dijual.

Harry Tanoesoedibyo (HT) sebagaimana kita tahu, beliau awal mula masuk partai bergabung dengan Nasdem, partainya Surya Paloh. Entah apa masalahnya HT keluar dari Nasdem dan Masuk Hanura partainya pak Wiranto. Bahkan dengan berani HT mencalonkan diri menjadi cawapresnya pak Wiranto padahal pileg masih jauh belum dilaksanakan.

Pada pencawapresan ini HT mengikuti jejak Surya Paloh dengan mendirikan ormas Perindo yang kemudian kini perindo berubah menjadi partai. Walau dengan segala daya upaya menjual pak Wiranto, faktanya pasangan WinHT gagal total dari rencana.

Setelah loncat dari Nasdem ke Hanura, HT kemudian loncat ke KMP. Masih kurang puas dan rasanya masih menyimpan ambisi, HT kemudian merubah ormas perindo menjadi partai. Saya hanya bisa menduga apa langkah dan keinginan HT dengan semua itu.

Kini perindo syah menjadi partai politik dan sudah dideklarasikan. HT sebagai ketua umum atau

apa sebutanya. Tapi semua orang akan menanamkan imej HT adalah pemilik dan bos partai Perindo.

HT sebaga bos MNC group yang menaungi RCTI, GlobalTV, MNCTV dan beberapa media yang lain. Menjadikan ekonomi menjadi judul kampanyenya ekonomi makro yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia dikritik HT. Maka HT menyodorkan paket ekonomi yang menyentuh seluruh lapisan rakyat, terutamanya rakyat kelas bawah. Tidak jelas apa maksud, konsep dan bagaimana praktek pelaksanaan dari konsep ekonomi yang diusung HT.

Rakyat hanya menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan HT dengan Perindonya. Saya hanya membayangkan jalan terjal yang akan dialami Perindo kedepan. Saya tidak yakin Perindo akan lolos ikut pemilu pada tahun 2019 apalagi sampai lolos ke senayan. Kecuali Perindo mampu dan mau menggelontorkan uang trilyunan untuk membeli suara, atau Perindo menjadi Partai semi malaikat, atau otak rakyat Indonesia yang sudah berubah.

10. Amin Rais, Sudahlah

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, justru saya '*mengeman*' kepada bapak agar tidak terlalu jauh tenggelam dalam rasa kebencian banyak orang kepada bapak. Sayang kan, mantan seorang tokoh besar, tokoh reformasi, mantan ketum pp Muhammadiyah, ketum PAN, ketua MPR seorang profesor, guru besar, kalau ternyata diakhir hayatnya tidak bisa memberi pencerahan justru menimbulkan kekacauan.

Sepak terjang bapak bagi banyak pihak dan bagi khalayak ramai rakyat Indonesia sering menimbulkan kontroversi dan tidak konsisten. Saya masih ingat dengan teramat sangat jelas waktu bapak menjadi bintang tamu sebuah talk show bapak saat itu mengatakan 'Hatta Rajasa adalah orang terbaik di Indonesia dan paling layak menjadi Presiden RI'. Tapi dihari ini dalam konggres PAN ke IV di Bali bapak menghujat Hatta Rajasa, dan membuat konggres PAN ricuh.

Bapakpun pernah sesumbar kalau Jokowi terpilih menjadi presiden RI akan melakukan jalan kaki Jakarta-Jogjakarta (yang ini saya tidak tahu komentar bapak, tapi ramai dibicarakan di media online). Saya juga pernah tau sendiri waktu Jokowi maju menjadi cagub DKI bapak juga menghina dan meremehkan Jokowi. Sebuah ucapan yang tidak seharusnya keluar dari seorang tokoh politik nasional.

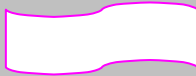
Saya juga masih ingat dijamin orde baru, bapaklah yang dengan berani dan tegas menentang proyek tambang emas 'Busang' di Kalimantan dan bapak juga marah-marah terkait Freeport di Papua. Tapi setelah bapak mejadi ketua MPR kegarangan itu senyap tidak terdengar walau sekedar sayup-sayup. Konon rumor yang saya dengar bapak sekarang mempunyai saham di Freeport. Apa itu benar?

Dalam pilpres 2014 kemarin bapak masih aktif bermanuver. Sayangnya manuver bapak bukan untuk memberi pencerahan dan kesejukan kepada rakyat Indonesia, tap justru terkesan mengadu domba. Awal maret 2015 PAN mengadakan konggres ke IV di Bali bapak juga masih bermanuver dengan menghujat Hatta Rajasa dan terang-terangan mendukung Zulkifli

Hasan yang nota bene besan bapak untuk menjadi ketum PAN.

Tidak layak seorang ketua dewan pertimbangan partai tapi masih ikut campur dalam hal teknis. Bahkan menghujat sang mantan ketum yang dulu bapak gadang-gadang. Mungkin bapak tidak sadar bapak mungkin *'kuwalat'* dengan dua presiden RI yang bapak hujat dan turunkan paksa, Soeharto dan Gus Dur. Bapak juga mungkin tidak tahu atau tidak merasa tahu, kalau sekarang ini bapak mendapat gelar *'sengkuni'* tokoh pewayangan mahabarata yang kerjanya mengipas-ngipasi dan mengadu domba. Kini bapak kembali menurunkan Hatta Rajasa.

Sudahlah bapak Amin Rais akan lebih baik kalau bapak *'mendito'*, bertapa dipuncak gunung, didalam gua atau dimana saja yang bapak suka. Tidak perlu ikut campur mengurus perpolitikan Indonesia saat ini. Biar nama bapak tidak terlalu jauh semakin kotor. Era bapak sudah usai, sekarang eranya anak-anak muda yang kreatif dan inovatif, bapak sepertinya sudah tidak dibutuhkan lagi oleh bangsa ini. Terima kasih.



Babak ke-Sepuluh

Datar-Datar Saja

1. Andai Indonesia Diembargo Seluruh Dunia, Indonesia Masih Bisa Hidup

Ketegasan Jokowi yang menetapkan hukuman mati kepada terpidana kasus narkoba menuai pro-kontra, baik didalam negeri maupun diluar negeri terutama negara yang warganya menjadi terpidana mati di Indonesia.

Berbagai bentuk protes dilakukan oleh negara-negara yang rakyatnya mendapat putusan hukuman mati karena kasus narkoba di Indonesia. Lobby-lobby, pembelaan hukum, pengecaman, pengungkitan bantuan sampai pelecehan duta besar dilakukan terhadap Indonesia.

Seharusnya negara berkenaan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Silahkan melakukan pembelaan sebagai bentuk tanggung jawab anda membela warga negaranya yang terkena hukuman di negara orang. Tapi seharusnya jangan sampai mengintervensi Indonesia sebab kita juga punya aturan hukum.

Jika tidak ingin warganya atau rakyatnya dihukum mati di Indonesia ya kasih tahu dan beri wawasan tentang keputusan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga jika akan melakukan bisnis narkoba jangan sampai masuk Indonesia sebab hukumnya mati.

Indonesia harusnya tidak gentar menghadapi segala cemoohan, hujatan atau hinaan dari negara sahabat yang rakyatnya dihukum mati di Indonesia.

Cuekin dan biarkan mereka berbuat apa saja, kalau perlu kita jual mahal, seakan kita tidak butuh mereka. Kita negara kaya, kaya SDM dan kaya SDA, sudah seharusnya kita mandiri. Tidak perlu bergantung kepada negara luar. Kalau Indonesia mau diembargo silahkan, kita masih bisa hidup dengan berkecukupan dan berlebihan. Asalkan para pejabat jujur, amanah dan tidak korupsi. Begitukan pak Jokowi?!

2. Semua Yang Nampak Tidak Bermasalah Belum Tentu Tidak Ada Masalah

Rakyat di negara ini sudah terbiasa hidup dengan berbagai cobaan, rintangan dan berbagai penderitaan. Semua nampak berjalan seperti biasa, karena sudah terbiasa hidup dalam penjajahan selama 350 tahun. Waktu yang cukup panjang, telah melahirkan mental-mental kolonial, feodal dan penindasan dengan gaya arogansi penguasa.

Kejahatan, kesalahan yang dilakukan berulang kali, menjadi hal biasa, lumrah dan bukan cela. Kebiasaan mau enak sendiri, jalan pintas, tidak mau bertele-tele dalam berurusan birokrasi melahirkan percaloan dan membunuh kreatifitas dan kejujuran.

Kita sudah biasa mengurus surat-menyurat administrasi kenegaraan dengan melalui jasa orang lain. Ini disebabkan rumit dan berte-telenya jika kita mengurus sendiri. Dengan memberi sejumlah uang pada calo urusan cepat selesai dan tidak perlu bersusah payah, tinggal terima jadi.

Budaya-budaya seperti itu sudah mendarah daging dalam segala penjuru kehidupan di Indonesia. Semua urusan dicalokan, akhirnya percaloan yang

menguasai kehidupan, jalur lurus legal formal akan kalah dengan calo.

Kondisi seperti itu jadi biasa dan nampak tidak ada masalah apa-apa padahal, hal itu adalah bentuk pembodohan dan pemalasan kepada rakyat Indonesia. Semua urusan lewat calo, apapun itu. Ini sebetulnya sudah menjadi masalah besar yang harus segera diatasi.

Tolong hentikan praktik dan bentuk percaloan seperti ini, didik rakyat untuk kreatif dan mandiri, jangan tergantung pada orang lain. Jasa pengurusan silahkan ada tapi terbatas pada hal tertentu yang bersifat umum dan bisa diwakilkan. Sebab yang bersangkutan tidak ada waktu untuk membuat urusan tersebut.

3. Syahrini Super Lebay Yang Top Markotop

Dimata saya kemunculan dan ketenaran Syahrini tidak bisa dilepaskan dari peran Anang Hermansyah. Pada saat itu, Anang Hermansyah yang dirundung duka lara sebab ditinggal selingkuh oleh Krisdayanti sang istri, membuat Anang hidup dalam kegalauan. Keluarlah lagu-lagu yang mengekspresikan suasana hatinya.

Disaat '*menggalau*' seperti itu, entah bagaimana awal mula ceritanya, Anang menemukan Syahrini dan menjadikannya sebagai teman duet dalam menyanyikan lagu-lagunya. Jadilah nama Syahrini perlahan tapi pasti mulai dikenal oleh khalayak dan dunia gosip selebritis sebagai teman duet Anang.

Syahrini yang sebelum itu tidak ada yang mengenal apalagi memperhitungkan, sayup-sayup

mulai masuk incaran pencari berita gosip. Seiring dengan melantunnya tembang-tembang Syahrini beserta Anang yang sering menghiasi dunia hiburan televisi, muncul gosip bahwa Syahrini dan Anang tidak hanya mesra dilantunan lagu, tapi juga mesra dalam buaian asmara dana.

Keduanya nampak berbuga-bunga dalam dawai asmara. Pada saat itu Anang mengeluarkan simbul-simbul bersatunya hati. Kemana mereka berdua pergi akan menjadi bahan berita gosip dan sensasi. Begitulah awal mula kemunculan Syahrini yang perlahan-lahan mulai menghiasi pemberitaan gosip yang syarat dengan sensasi.

Tanpa diduga dan direncana, pada suatu kesempatan Anang bertemu Asanty yang singkat cerita langsung merebut suasana hatinya yang pada saat itu sudah ada Syahrini. Proses petualangan Anang-Asanty klimaksnya mempertemukan mereka pada perjudohan. Menikahlah Anang-Asanty dan kini Asanty sudah beranak.

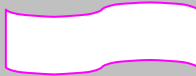
Syahrini bagaimana? Sebagai artis pendatang baru yang mulai menemukan jati-dirinya dalam dunia hiburan dan selebritis. Syahrini semakin melejit dengan karakter sensasinya. Sadar itu yang terbaik bagi dirinya, sebab dari segi intelektualitas biasa-biasa saja, dari segi kualitas entertainment kurang memadai. Jadi sensasi demi sensasi itu yang dimanfaatkan.

Karakter dan tipikal penduduk Indonesia yang masih dalam taraf suka sensasi dan pergosipan, semakin melejitkan nama Syahrini dalam dunia selebritis. Menyadari akan hal itu Syahrini makin menjadi-jadi. Segala sesuatu berbau Syahrini menjadi

sumber gosip yang makin dikejar dan ditunggu-tunggu masyarakat *Indonesiana*.

Syahrini makin top-markotop. Didukung wajah yang cantik, body bagus, kulit putih mulus, rambut panjang terurai membuat banyak lelaki terpesona. Sayangnya kondisi itu justru membuat Syahrini terjebak dalam perangkapnya sendiri. Status jet-set dan sosialita yang disandanginya membuat dirinya 'menyulitkan diri' dalam menemukan jodohnya.

Segalanya dalam pengertian materi sudah dimillki Syahrini. Bagi sebagian orang melihat penampilan Syahrini yang super lebay membuat 'muak, neg' dan tidak ngeh dengan segala apa yang diperbuatnya. Sebaliknya bagi penggemar Syahrini apapun yang dilakukan Syahrini menjadi bahan tontonan yang menyegarkan, menghibur dan menggairahkan. Begitulah Syahini yang *men'cetar membahana* dengan segala tingkahnya.



Babak ke-Sebelas

Untuk Rakyat

1. Jujurlah Dan Jangan Ngeyel

Berani jujur hebat, ungkapan ini menjadi tantangan baru kepada seluruh rakyat Indonesia. Ungkapan ini terpampang menggantung besar didinding gedung KPK Jakarta. Sebuah sindiran sekaligus tantangan kepada para koruptor kususnya untuk mengatakan dengan sejujurnya dari mana mendapat uang dan kekayaan.

Kejujuran harus diterapkan dalam setiap kehidupan. Tulisan pada bab ini saya tujukan kepada para pedagang. Karena bab ini saya tujukan kepada rakyat dan diantara profesi rakyat adalah berdagang. Jadi saya menyarankan dan mengingatkan kepada rakyat yang berprofesi sebagai pedagang.

Sering kita saksikan di beberapa televisi, banyak para pedagang berbuat tidak jujur dalam mencari keuntungan. Berbagai cara dilakukan, mengurangi takaran, memalsukan barang, merekayasa barang (merekondisi), menjual barang tidak layak dijual tapi dipoles supaya layak jual. Memberi bahan pengawet yang berbahaya dan segala bentuk kecurangan.

Ada sebuah hadits yang maksudnya kurang lebih, diantara penghuni surga adalah pedagang yang jujur. Karena itu kejujuran dalam berdagang mutlak wajib dilakukan. Hal ini supaya tidak menimbulkan kerugian pada konsumen. Berdaganglah dan carilah keuntungan dengan sewajarnya dengan tidak mengurangi takaran, tidak merekayasa merekondisi),

memalsukan, apalagi membubuhi bahan yang merusak kesehatan dan berakibat kematian.

Begitu juga kepada semua rakyat '*jangan ngeyel*' ingin menang sendiri dan tidak taat aturan. Kejadian ini banyak terjadi ditempat-tempat umum yang seharusnya untuk umum tapi dikuasai para pedagang. Tempat yang bukan haknya, tapi dibangun rumah pemukiman.

Semua itu sudah menyalahi aturan, jika ditertibkan, jangan ngeyel jangan menentang sebab itu bukan hak anda, itu hak bersama yang dikelola negara. Penggusuran pemukiman, relokasi pedagang kaki lima, itu semua dilakukan demi ketertiban dan kebaikan bersama.

Tapi kebanyakan kita tidak terima dengan kebijakan itu, kita protes dan ngeyel tidak terima. Merasa pembeli sepi kurang keuntungan, rugi terus, dan segala alasan yang intinya tidak mau dipindahkan. Mengalahlah, ikuti aturan yang sudah diputuskan, semua akan berproses, tidak serta merta seperti sedia kala.

Jangan ngeyel ikuti peraturan dalam apapun itu, supaya berjalan tertib dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Larangan berdagang di trotoar, larangan mengendarai kendaraan melawan arus, larangan parkir sembarangan dan banyak lagi larangan. Jangan terjang dan jangan langgar sebab akan berakibat fatal bukan hanya pada diri anda tapi juga pada orang lain.

Jangan ngeyel terhadap persoalan yang kamu tidak tahu dan tidak memahami seluk-beluk dan sejarahnya. Itu akan menyakitkan dan menyinggung

perasaan orang yang kau ajak bicara yang menguasai dan mengalami kejadian. Jujurlah dan jangan ngeyel.

2. Jangan Demonstrasi Yang Mengganggu Kepentingan Umum Apalagi Sampai Anarkhis.

Demonstrasi sebagai bentuk protes kekecewaan sudah menjadi komoditas bisnis dinegara Indonesia. Demonstrasi bukan sebagai wujud dan bentuk kepribadian bangsa Indonesia dan bukan cara-cara Islami. Demonstrasi sebagai bagian dari demokrasi.

Demonstrasi pada awalnya sebagai wujud penyaluran aspirasi yang tidak tersalurkan melalui jalur formal. Dilakukan oleh para aktifis mahasiswa yang idealis dan berfikir kritis terhadap permasalahan dan ketimpangan yang terjadi dipemerintahan. Kesewenang-wenangan, arogansi dan ketidak adilan, itu yang disuarakan para demonstan.

Demonstrasi kini sudah menyimpang dari jalur idealisme untuk menegakkan keadilan, tapi sudah berubah menjadi unjuk kekuatan untuk memaksakan kehendak, entah itu salah atau benar. Demonstrasi menjadi ajang untuk menekan pihak lawan. Dengan pengerahan masa, menakut-nakuti dan bertindak onar dan kadang bertindak anarkhis.

Sedikit-sedikit 'demo', tidak cocok demo, ingin mempertahankan pendapat demo, ingin merebut kuasa demo, ingin memenangkan masalahnya demo, pendek kata demo sudah menjadi sarana unjuk kekuatan untuk memaksakan kenginan berupa syahwat kuasa yang ujung-ujungnya bermuara pada mencari keuntungan materi.

Demonstrasi menjadi pekerjaan sampingan untuk mendapat tambahan uang saku dan makan siang gratis. Ada juga tambahan atribut berupa kaos, banner. Ada organiser yang berprofesi menyediakan orang-orang untuk melakukan demonstrasi. Jumlah orang atau masa bisa dipenuhi sesuai permintaan

Saya tidak menyalahkan para demonstran semacam itu, sebab itu bisa menjadi mata pencaharian. Asalkan jangan melakukan demonstrasi untuk memperkeruh keadaan dan memperuncing permasalahan. Apalagi demonstrasi yang dilakukan secara emosi yang berlebihan hingga mengganggu ketertiban dan kepentingan umum. Jangan melakukan demonstrasi sampai bertindak anarkhis dengan merusak barang-barang.

Demonstrasi seperti itu hanya dilakukan oleh orang gila atau keserupan. Juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai akal sehat. Orang seperti itu sudah pasti kerasukan setan. Ditunggangi nafsu emosi yang berujung pengrusakan, ketika sadar pasti akan ada penyesalan.

Karena itu lakukan demonstrasi yang sewajarnya, pakai akal dan nurani yang sehat. Kalau bisa lakukan dialog, cari solusi sebagai pengurangan permasalahan. Tidak perlu gontok-gontokkan dan mau menang sendiri. Kalau bisa dilakukan dialog dengan terbuka dari kedua kubu, sudah pasti tidak akan ada demonstrasi.

Demonstrasi hanya dilakukan pada permasalahan global skop dunia. Bersumber pada isu-isu kemanusiaan dan lingkungan. Dilakukan dengan cara sopan tidak melanggar aturan. Apalagi sampai mengganggu ketertiban dan kepentingan

umum, itu tidak akan dilakukan. Dan yang pasti tidak anarkhis.

3. Bersatulah Untuk Membangun Negara

Singkirkan segala bentuk perbedaan SARA atau apapun itu namanya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Negara kita kaya raya, baik SDA dan SDMnya, janganlah kita merasa lebih hebat, lebih berhak atau merasa paling kuasa. Semua sama kedudukannya dalam negara.

Hentikan gontok-gontokan dalam partai politik, hentikan nafsu ambisi ingin menguasai dan hentikan kepentingan pribadi, keluarga dan kroni. Hentikan segala bentuk permusuhan. Mari kita bergandeng tangan, bahu-membahu, bersatu-padu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul untuk membangun negara demi kebaikan, kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Agama adalah urusan keyakinan pribadi tidak perlu dijadikan alat untuk menekan atau bermusuhan. Partai soal selera, semua partai di Indonesia intinya sama, tergantung individunya. Mari kita sama-sama menjaga kekayaan Indonesia untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Sebelum lebih jauh terlambat, jangan sampai sisa-sisa kekayaan ini hanya menjadi bancakan para pejabat dan wakil rakyat.



Sedikit Tentang Penulis

Huda Hadi, “*Saya adalah manusia biasa, tapi tidak seperti kebanyakan manusia pada umumnya*”. Sebagai penulis kelas ‘*jalan*’ bermadzhab ‘*indie*’ saya tidak terikat oleh pakem dan gaya penulisan ilmiah pada umumnya. Saya menulis berdasar apa yang saya lihat, saya dengar dan saya rasakan. Sehingga mengalir begitu saja berdasar mod sesuai dengan karakter gaya penulisan saya.

Tipikal saya mudah dan cepat bereaksi yang terkesan marah bila melihat kezholiman yang terjadi. Ini juga sebagai bentuk ‘idealisme’ saya untuk menegakkan keadilan dan menentang kesewenang-wenangan. Saya termasuk orang yang memegang teguh komitmen, disiplin, bisa dipercaya dan berintegritas.

Sejak kecil sampai sekarang saya terbiasa menjadi ketua, pimpinan dan yang selalu disuruh didepan. Dimanapun saya berada berdomisili akan mewarnai setidaknya saya akan dibutuhkan oleh lingkungan komunitas yang ada. Tapi dalam kancah negara ini, seakan saya tidak ada gunanya, saya tenggelam dalam idealisme saya.

Beberapa buku yang sudah saya tulis:

1. Seandainya Saya Menjadi Presiden RI, Membangun Negara Dengan Kebersamaan. (belum terbit)
2. Indonesia Dalam Kuasa Roh Jahat. (belum terbit)
3. Indonesia versus Malaysia. (belum terbit)

4. Diary Sospol Indonesia 2013-2014 dalam FB (belum terbit)
5. Panduan Wirid Dengan Asmaul Husna Untuk Memperoleh Ketenangan Jiwa. (terbit di Malaysia)

Hidup harus dinikmati dan disyukuri dimanapun dan bagaimanapun keadaanya.

Jadikan diri kita bermanfaat, walau sekecil apapun itu.

Perbanyak Sholat Sunat, biar murah rezeki.
Perbanyak Puasa, untuk kesehatan dan kekuatan
Perbanyak Dzikir untuk ketenteraman dan kebahagiaan.

huda_hadi@yahoo.com
mashuda369@gmail.com

